



# KEGIATAN PERCEPATAN PENYEDIAAN DATA STATISTIK

DALAM RANGKA

## KEBIJAKAN DANA PERIMBANGAN TAHUN 2015



**BADAN PUSAT STATISTIK**

© **Badan Pusat Statistik**

KEGIATAN PERCEPATAN PENYEDIAAN DATA STATISTIK  
dalam rangka  
KEBIJAKAN DANA PERIMBANGAN TAHUN 2015

ISBN :978-979-064-786-2

No. Publikasi :07310.1407

Katalog BPS : 1103014

Diproduksi : CV. Nario Sari

Editor : Subdirektorat Analisis Statistik  
Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik  
Badan Pusat Statistik

Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2014

vi + 128 halaman; 17,6 x 25 cm

**KEGIATAN PERCEPATAN  
PENYEDIAAN DATA STATISTIK  
DALAM RANGKA  
KEBIJAKAN DANA PERIMBANGAN  
TAHUN 2015**



# TIM PENYUSUN

- Pengarah : Dr. Suhariyanto  
Drs. Wynandin Imawan, M.Sc  
Dr. Ir. Sasmito Hadi Wibowo, M.Sc
- Anggota : Dr. Margo Yuwono, S.Si, M.Si  
Buyung Airlangga, M.Bus.  
Drs. Razali Ritonga, MA  
Yunita Rusanti, M.Stat.  
Harmawanti Marhaeni, M.Sc  
Nina Suri Sulistini M.T.  
Dr. Indra Murty Surbakti MA  
Dewi Sri Takarini SE, MA
- Asisten : Ema Tusianti, SST, SAB M.T.,M.Sc  
Yoyo Karyono SST  
Dimas Hari Santoso, S.Si  
Adi Nugroho SST  
Ari Sugih Mulia, SE MSE.,MA  
Ir. Yoshep PAC Yuda MBA  
Dendi Handiyatmo, S.ST, M.Si.  
Trophy Endah Rahayu M.Si.  
Yogo Aryo Jatmiko SST  
Riduan M.Si.  
Dwi Jayanti SST
- Penyiapan Naskah : Oki Heryanto, A.Md., Taufan Tirtayasa

# Pengantar

**P**ublikasi “Kegiatan Percepatan Penyediaan Data Statistik dalam rangka Kebijakan Dana Perimbangan Tahun 2015” merupakan publikasi tahunan hasil kerjasama antara Kementerian Keuangan dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Publikasi ini berisi data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penyalokan Dana Alokasi Umum (DAU) ke daerah tahun 2015.

Sesuai dengan perannya, BPS harus menyediakan empat dari lima indikator yang digunakan dalam penyusunan DAU. Data dasar tersebut antara lain: Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2014, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2013, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita 2013, dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) 2014. Selain data, publikasi ini juga dilengkapi dengan ulasan ringkas dan penjelasan teknis masing-masing indikator. Besar harapan kami, informasi yang disampaikan dalam publikasi ini dapat membantu Kementerian Keuangan dan pihak lain dalam menyusun perencanaan pembangunan.

Publikasi ini masih jauh dari sempurna sehingga penyempurnaan terus menerus dilakukan oleh tim penyusun. Kepada semua pihak yang secara aktif memberikan sumbangsih hingga terbitnya publikasi ini, kami memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya. Akhirnya, kami mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan publikasi serupa di masa mendatang. •

Jakarta, Oktober 2014  
Kepala Badan Pusat Statistik



Dr. Suryamin, M.Sc.



# Daftar Isi

PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	v
<b>1</b>	<b>BAB 1 OVERVIEW</b>
<b>5</b>	<b>BAB 2 PENDUDUK PERTENGAHAN 2014</b>
<b>11</b>	<b>BAB 3 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2013</b>
<b>21</b>	<b>BAB 4 INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI 2014</b>
<b>25</b>	<b>BAB 5 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PERKAPITA 2013</b>
<b>31</b>	<b>BAB 6 CATATAN TEKNIS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN</li><li>• INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA</li><li>• INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI</li><li>• PDRB PERKAPITA</li></ul>
<b>41</b>	<b>109</b>
<b>TABEL RINGKASAN</b>	<b>LAMPIRAN</b>

# Daftar Tabel

<b>Tabel 2.1</b>	Persebaran Jumlah dan Persentase Penduduk Indonesia, 2014	7
<b>Tabel 2.2</b>	Kepadatan Penduduk Indonesia Pertengahan Tahun 2014	8
<b>Tabel 3.1</b>	Kabupaten/Kota dengan IPM Tertinggi dan Terendah, 2013	16
<b>Tabel 3.2</b>	Sepuluh Kabupaten/Kota yang Menghasilkan <i>Reduksi Shortfall</i> terbesar, 2013	17
<b>Tabel 3.3</b>	Perbedaan Kemajuan Pembangunan Manusia antar Wilayah Indonesia Bagian Barat dan Bagian Timur, 2013	18
<b>Tabel 6.1</b>	Daftar Paket Komoditas yang Digunakan dalam Penghitungan PPP	37
<b>Tabel R1</b>	Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 33 Provinsi	42
<b>Tabel R2</b>	Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 491 Kabupaten/Kota	43
<b>Tabel R3</b>	Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2013 menurut Kabupaten/Kota	76

# Daftar Gambar

<b>Gambar 2.1</b>	Dua Puluh (20) Kabupaten/Kota dengan Penduduk Terbesar di Indonesia , 2014	9
<b>Gambar 3.1</b>	Provinsi dengan IPM Tertinggi, 2012-2013	12
<b>Gambar 3.2</b>	Reduksi Shortfall Provinsi dengan IPM Tertinggi, 2012-2013	13
<b>Gambar 3.3</b>	Provinsi dengan IPM Terendah , 2013-2014	13
<b>Gambar 3.4</b>	Reduksi Shortfall Provinsi dengan IPM Terendah, 2012-2013	14
<b>Gambar 3.5</b>	Kisaran IPM Tingkat Provinsi, 2014	14
<b>Gambar 3.6</b>	Kesenjangan Status Pembangunan Provinsi di Wilayah Indonesia Barat dan Wilayah Indonesia Timur dalam IPM, 2013	16
<b>Gambar 3.7</b>	Status Pembangunan Manusia antara Kabupaten/Kota Wilayah Indonesia Bagian Barat dan Timur, 2013	19
<b>Gambar 5.1</b>	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas (Juta Rupiah), 2012-2013	27
<b>Gambar 5.2</b>	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Tanpa Migas (Juta Rupiah), 2012-2013	28





# OVERVIEW



# OVERVIEW

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan potensi dan daya saing antar wilayah yang beragam. Oleh sebab itu, selayaknya setiap daerah memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Secara konstitusional, kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Harapannya kesejahteraan masyarakat dapat terwujud berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan diluncurkannya undang-undang tersebut, pengelolaan keuangan daerah mengalami perubahan. Setiap daerah otonomi dapat memanfaatkan sumber-sumber pendapatan sendiri berupa pendapatan asli daerah (PAD), pinjaman daerah, maupun penerimaan lainnya yang sah menurut peraturan yang berlaku. Selain itu, pemerintah berhak untuk menerima transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari bagi hasil pajak dan bukan pajak. Tujuan transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik di seluruh negeri.

DAU merupakan sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) di seluruh Indonesia setiap tahunnya yang bersumber dari pendapatan APBN dan menjadi bagian dari APBD. DAU bersifat “*Block Grant*” yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan. Sehingga, DAU merupakan sarana pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Setiap provinsi/kabupaten/kota menerima DAU dengan besaran yang berbeda, dan hal ini diatur secara detail dalam peraturan pemerintah. Namun, secara nasional, besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN. Secara spesifik, besaran DAU dihitung menggunakan rumus/formulasi statistik yang kompleks.

Metode penghitungan DAU mencakup dua hal, yaitu alokasi dasar (AD) dan celah fiskal (CF). Alokasi dasar dihitung berdasarkan realisasi gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah tahun sebelumnya ( $t-1$ ), yang meliputi gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang melekat sesuai dengan peraturan penggajian PNS yang berlaku. Alokasi berdasarkan celah fiskal pada suatu daerah dihitung dengan mengalikan bobot celah fiskal daerah bersangkutan (CF daerah dibagi dengan total CF nasional) dengan alokasi DAU CF nasional.

Besaran CF diperoleh dengan rumus:  $CF = \text{Kebutuhan Fiskal} - \text{Kapasitas Fiskal}$ . Komponen variabel kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) adalah sumber pendanaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Sedangkan komponen variabel kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) yang digunakan untuk pendekatan perhitungan kebutuhan daerah, terdiri dari 5 variabel, yaitu Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Empat dari kelima variabel tersebut (Penduduk, IPM, IKK, PDRB) disediakan oleh BPS.

Data jumlah penduduk yang digunakan dalam penghitungan DAU adalah jumlah penduduk pertengahan tahun. Pada pertengahan tahun 2014, tercatat penduduk Indonesia sebanyak 252,16 juta jiwa, terbanyak di Pulau Jawa (143,58 juta jiwa atau 56,94 persen), diikuti oleh Pulau Sumatera (54,41 juta jiwa atau 21,58 persen). Akibatnya, kepadatan tertinggi sebagian besar terdapat di Pulau Jawa, khususnya di DKI Jakarta (15.173 jiwa/Km<sup>2</sup>), Jawa Barat (1.301 jiwa/Km<sup>2</sup>), dan Banten (1.211 jiwa/Km<sup>2</sup>). Selain itu, 19 dari 20 besar peringkat Kabupaten/Kota berpenduduk terbanyak juga berada di Pulau Jawa, dimana Kabupaten Bogor merupakan Kabupaten/Kota yang memiliki penduduk terbesar di Indonesia dengan jumlah penduduk 5,3 juta jiwa, diikuti Kabupaten Bandung (3,5 juta jiwa).

Peningkatan jumlah penduduk tampaknya juga diiringi dengan capaian pada pembangunan manusianya. Angka IPM Indonesia pada tahun 2013 meningkat sebesar 0,52 poin dibanding tahun 2012. Hal positif juga ditunjukkan dengan disparitas antar provinsi yang relatif menurun. Tidak hanya itu, pencapaian pembangunan manusia di seluruh provinsi di Indonesia telah memasuki kelompok menengah atas (skala 66-80), berdasarkan pengkategorian internasional. Sayangnya, dalam level kabupaten/kota, pencapaian IPM masih menunjukkan variasi yang cukup besar, terlebih lagi, masih ada sekitar 7 persen kabupaten/kota yang terkategori rendah dalam pencapaian pembangunan manusianya (kurang dari 50).

Variabel ketiga adalah Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang membandingkan tingkat kemahalan harga konstruksi antar wilayah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Pada level Provinsi, di tahun 2014, IKK tertinggi terdapat di Provinsi Papua (191,86), diikuti Provinsi Papua Barat (125,79), sedangkan indeks terendah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (81,00). Pada level Kabupaten/Kota, indeks tertinggi terdapat di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua (462,84) dan terendah di Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (71,64).

Terkait dengan PDRB per kapita, terdapat disparitas yang sangat tajam baik antar provinsi maupun antar kabupaten/kota. Sebagaimana diketahui, adanya korporasi multinasional maupun multiregional dengan kapasitas faktor produksi terpasang di berbagai wilayah akan mempengaruhi besaran pendapatan regional per kapita. Dengan demikian, dapat terjadi suatu wilayah dengan PDRB perkapita sangat tinggi tetapi memiliki pendapatan regional sangat rendah. Sebagai ukuran agregat produktivitas per kapita, provinsi yang memiliki PDRB per kapita tertinggi pada tahun 2013 adalah DKI Jakarta (Rp 125,97 Juta) dan Kalimantan Timur (Rp 116,47 Juta), sedangkan terendah adalah Maluku Utara (Rp 6,93 Juta). Sementara untuk tingkat kabupaten/kota, yang memiliki PDRB per kapita tertinggi adalah Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebesar Rp 445,32 Juta dan yang terendah adalah Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, sebesar Rp 3,59 Juta.

Adapun besaran PDRB per kapita tanpa migas, tertinggi di tahun 2013 adalah DKI Jakarta (Rp 125,42 Juta) dan Kalimantan Timur (Rp 73,69 Juta), sedangkan terendah adalah Maluku Utara (Rp 6,93 Juta). Sementara untuk tingkat kabupaten/kota, yang memiliki PDRB per kapita tanpa migas tertinggi adalah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, sebesar Rp 370,93 Juta dan Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, sebesar Rp 306,55 Juta dan yang terendah adalah Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, sebesar Rp 3,59 Juta. •

# PENDUDUK PERTENGAHAN 2014



# PENDUDUK PERTENGAHAN 2014

**DEFINISI:**

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap.

**SUMBER DATA:**

Sensus Penduduk 2000, Sensus Penduduk Aceh Nias 2005, Sensus Penduduk 2010, Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

**CAKUPAN:**

34 provinsi dan 511 kabupaten/kota

## PERSEBARAN PENDUDUK

Tabel 2.1 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia pertengahan tahun 2014 sebesar 252.164.786 jiwa. Bila dilihat dari sisi persebaran penduduk, sebagian besar penduduk Indonesia berada di pulau Jawa yaitu 143.579.836 jiwa atau sekitar 56,94 persen dari total penduduk Indonesia tahun 2014. Kemudian di ikuti oleh pulau Sumatera dengan penduduk sebesar 54.412.201 jiwa atau sebesar 21,58 persen dari total penduduk Indonesia. Sementara pulau yang memiliki jumlah penduduk terendah terdapat di pulau Maluku dan Papua dengan jumlah penduduk sebesar 6.736.932 jiwa atau sebesar 2,67 persen.

Jumlah penduduk per provinsi menunjukkan bahwa provinsi yang paling banyak penduduknya adalah Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk sebesar 46.029.668 jiwa atau sebesar 18,25 persen dari total penduduk Indonesia. Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua dan ketiga adalah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah, masing-masing sebesar 38.610.202 dan 33.522.663 jiwa atau sebesar 15,31 dan 13,29 persen dari total penduduk Indonesia.

Provinsi yang memiliki jumlah penduduk terendah adalah provinsi yang baru saja terbentuk yaitu Provinsi Kalimantan Utara dengan jumlah penduduk 584.538 jiwa atau hanya sebesar 0,23 persen dari total penduduk Indonesia. Provinsi Papua Barat merupakan provinsi yang memiliki jumlah penduduk terendah kedua dengan jumlah penduduk sebesar 849.809 jiwa atau 0,34 persen.

**Tabel 2.1** Persebaran Jumlah dan Persentase Penduduk Indonesia Tahun 2014

No	Provinsi	Jumlah Penduduk	Persentase
<b>Pulau Sumatera</b>		<b>54.412.201</b>	<b>21,58</b>
1	Aceh	4.906.835	1,95
2	Sumatera Utara	13.766.851	5,46
3	Sumatera Barat	5.131.882	2,04
4	Riau	6.188.442	2,45
5	Kepulauan Riau	1.917.415	0,76
6	Jambi	3.344.421	1,33
7	Sumatera Selatan	7.941.495	3,15
8	Bangka Belitung	1.343.881	0,53
9	Bengkulu	1.844.788	0,73
10	Lampung	8.026.191	3,18
<b>Pulau Jawa</b>		<b>143.579.836</b>	<b>56,94</b>
11	DKI Jakarta	10.075.310	4,00
12	Jawa Barat	46.029.668	18,25
13	Banten	11.704.877	4,64
14	Jawa Tengah	32.522.663	13,29
15	DI Yogyakarta	3.637.116	1,44
16	Jawa Timur	38.610.202	15,31
<b>Pulau Kalimantan</b>		<b>15.048.381</b>	<b>5,97</b>
17	Kalimantan Barat	4.716.093	1,87
18	Kalimantan Tengah	2.439.858	0,97
19	Kalimantan Selatan	3.922.790	1,56
20	Kalimantan Timur	3.385.102	1,34
21	Kalimantan Utara	584.538	0,23
<b>Pulau Sulawesi</b>		<b>18.471.854</b>	<b>7,33</b>
22	Sulawesi Utara	2.386.604	0,95
23	Gorontalo	1.115.633	0,44
24	Sulawesi Tengah	2.831.283	1,12
25	Sulawesi Selatan	8.432.163	3,34
26	Sulawesi Barat	1.258.090	0,50
27	Sulawesi Tenggara	2.448.081	0,97
<b>Pulau Bali &amp; Nusa Tenggara</b>		<b>13.915.582</b>	<b>5,52</b>
28	Bali	4.104.890	1,63
29	Nusa Tenggara Barat	4.773.795	1,89
30	Nusa Tenggara Timur	5.036.897	2,00
<b>Pulau Maluku &amp; Papua</b>		<b>6.736.932</b>	<b>2,67</b>
31	Maluku	1.657.409	0,66
32	Maluku Utara	1.138.667	0,45
33	Papua	3.091.047	1,23
34	Papua Barat	849.809	0,34
<b>Indonesia</b>		<b>252.164.786</b>	<b>100,00</b>

## KEPADATAN PENDUDUK

Kepadatan penduduk Indonesia pada pertengahan tahun 2014 sebagian besar masih berpusat di pulau Jawa. Kepadatan penduduk terbesar terletak di Provinsi DKI Jakarta yaitu sekitar 15.173 jiwa/Km<sup>2</sup>, diikuti Jawa Barat dan Banten masing-masing sebesar 1.301 jiwa/Km<sup>2</sup>, dan 1.211 jiwa/Km<sup>2</sup>. Di sisi lain, Provinsi Kalimantan Utara, Papua Barat dan Papua merupakan provinsi dengan kepadatan penduduk terendah sekitar 8 jiwa/Km<sup>2</sup>, 9 jiwa/Km<sup>2</sup> dan 10 jiwa/Km<sup>2</sup>. Perbedaan ini menunjukkan disparitas kepadatan penduduk yang cukup tinggi antar provinsi di Indonesia.

No	Provinsi	Kepadatan Penduduk Pertengahan Tahun 2014 (jiwa/Km <sup>2</sup> )
1	Aceh	85
2	Sumatera Utara	189
3	Sumatera Barat	122
4	Riau	71
5	Kepulauan Riau	234
6	Jambi	67
7	Sumatera Selatan	87
8	Bangka Belitung	82
9	Bengkulu	93
10	Lampung	232
11	DKI Jakarta	15.173
12	Jawa Barat	1.301
13	Banten	1.211
14	Jawa Tengah	1.022
15	DI Yogyakarta	1.161
16	Jawa Timur	808
17	Kalimantan Barat	32

**Tabel 2.2**

Kepadatan Penduduk Indonesia  
Pertengahan Tahun 2014

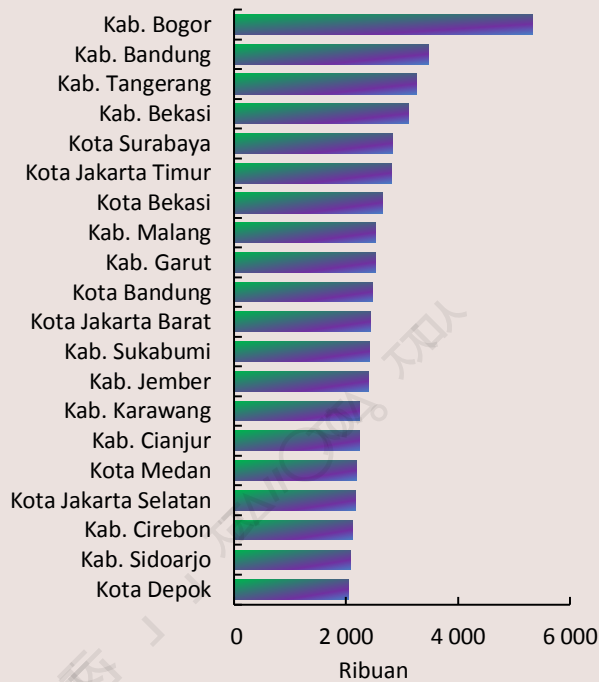
No	Provinsi	Kepadatan Penduduk Pertengahan Tahun 2014 (jiwa/Km <sup>2</sup> )
18	Kalimantan Tengah	16
19	Kalimantan Selatan	101
20	Kalimantan Timur	26
21	Kalimantan Utara	8
22	Sulawesi Utara	172
23	Gorontalo	99
24	Sulawesi Tengah	46
25	Sulawesi Selatan	180
26	Sulawesi Barat	75
27	Sulawesi Tenggara	64
28	Bali	710
29	Nusa Tenggara Barat	257
30	Nusa Tenggara Timur	103
31	Maluku	35
32	Maluku Utara	36
33	Papua	10
34	Papua Barat	9
Indonesia		132



## PENDUDUK KABUPATEN/KOTA

Gambar 2.1 menunjukkan peringkat 20 besar jumlah penduduk menurut kabupaten/kota di Indonesia, 19 kabupaten/kota diantaranya adalah kabupaten/kota yang terletak di pulau Jawa. Sedangkan satu kabupaten/kota lainnya terletak di pulau Sumatera yaitu Kota Medan.

**Gambar 2.1**  
Dua Puluh (20)  
Kabupaten/Kota  
dengan Penduduk  
Terbesar di Indonesia  
Tahun 2014



Kabupaten Bogor masih merupakan kabupaten yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia yaitu sekitar 5,3 juta jiwa. Jumlah ini hampir setara dengan jumlah penduduk Singapura pada tahun 2013 yang berjumlah 5,4 juta jiwa (sumber: [www.singstat.gov.sg](http://www.singstat.gov.sg)). Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terbanyak urutan kedua adalah Kabupaten Bandung sekitar 3,5 juta jiwa dan urutan ketiga adalah Kabupaten Tangerang dengan jumlah penduduk 3,3 juta jiwa. Urutan peringkat 7 besar jumlah penduduk menurut kabupaten/kota ini tidak mengalami perubahan. Perubahan urutan peringkat terlihat mulai urutan peringkat 8 sampai 20 kabupaten/kota jika dibandingkan keadaan urutan peringkat pada tahun 2013.

Perubahan peringkat yang cukup signifikan terlihat di Kota Depok, pada tahun 2013 Kota Depok masih berada di luar peringkat 20 besar kini menjadi peringkat 20 pada tahun 2014 menggeser Kota Tangerang. Beberapa kabupaten/kota juga mengalami pergeseran peringkat jumlah penduduk namun tidak signifikan seperti Kabupaten Malang, Kota Jakarta Barat, Kabupaten Karawang dan Kota Jakarta Selatan. •



# INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2013



# IPM 2013

## DEFINISI:

Indeks komposit yang disusun dari tiga indikator : (i) lama hidup yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir; (ii) pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas; dan (iii) standar hidup yang diukur dengan pengeluaran per kapita (PPP rupiah). Nilai indeks berkisar antara 0-100.

## SUMBER DATA:

Susenas (Kor dan Modul Konsumsi), Sensus Penduduk 2000 (SP2000), SUPAS 2005, IHK.

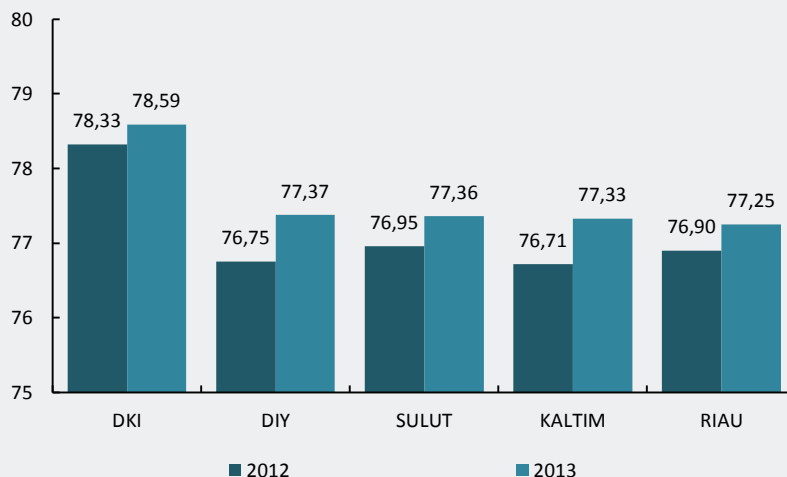
## CAKUPAN:

34 Provinsi dan 511 Kabupaten/Kota. Untuk keperluan DAU, jumlah Kabupaten/Kota tanpa DKI Jakarta adalah 505 Kabupaten/Kota.

## CAPAIAN IPM PROVINSI

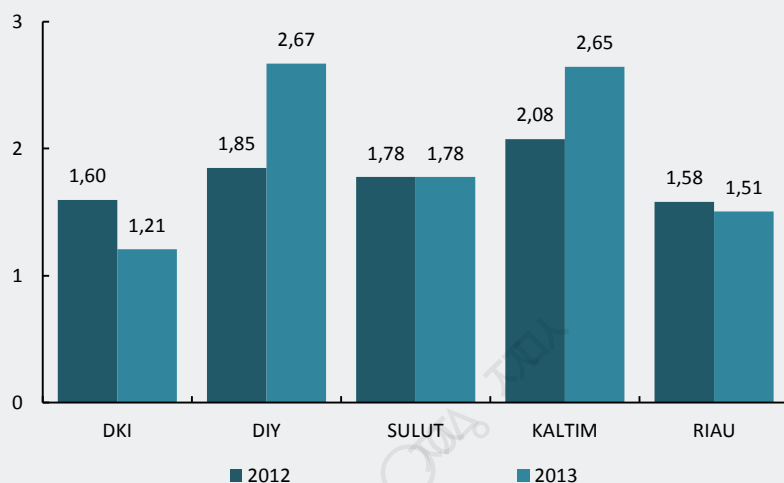
Pembangunan manusia Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan hal yang positif. Peningkatan pencapaian IPM diiringi dengan penurunan disparitas antar provinsi. Angka IPM Indonesia pada tahun 2013 meningkat sebesar 0,52 poin dibanding tahun 2012 yaitu dari 73,29 menjadi 73,81. Perbedaan pencapaian antara IPM tertinggi dengan IPM terendah sekitar 12,34 poin dengan rentang 78,59 untuk DKI Jakarta dan 66,25 untuk Papua. Dibandingkan dengan perbedaan pencapaian tahun 2012 yang sebesar 12,47 poin, maka perbedaan tahun 2013 relatif lebih rendah, dengan demikian berarti kesenjangan pembangunan manusia di tingkat provinsi relatif menurun.

**Gambar 3.1**  
Lima Provinsi  
dengan IPM  
Tertinggi,  
2012-2013



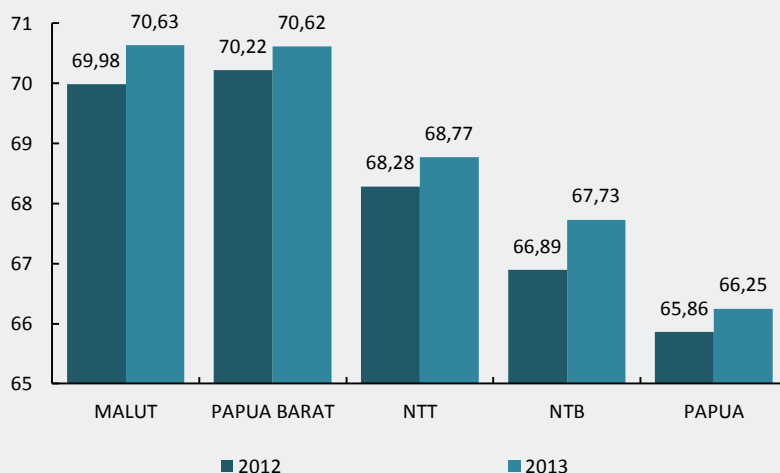
DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan IPM tertinggi yaitu mencapai 78,59. Kemudian berturut-turut diikuti oleh DI Yogyakarta sebesar 77,37; Sulawesi Utara sebesar 77,36; Kalimantan Timur sebesar 77,33; dan Riau sebesar 77,25 (Gambar 3.1). Selama lima tahun terakhir, kelima provinsi ini selalu tercatat sebagai lima provinsi terbaik dalam capaian pembangunan manusia di Indonesia.

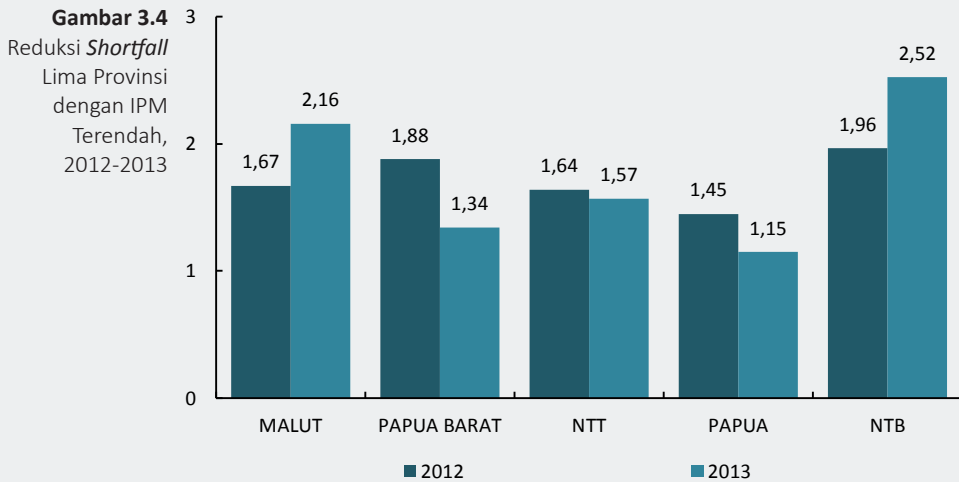
**Gambar 3.2**  
Reduksi *Shortfall*  
Lima Provinsi  
dengan IPM  
Tertinggi,  
2012-2013



Kecepatan pembangunan manusia pada kelima provinsi ini berada pada rentang 1 dan 3. Dari kelima provinsi dengan IPM tertinggi, DI Yogyakarta memiliki kecepatan tertinggi dalam pembangunan manusia yang ditandai dengan nilai reduksi *shortfall* sebesar 2,67. Kemudian diikuti oleh Kalimantan Timur sebesar 2,65; Sulawesi Utara sebesar 1,78; Riau sebesar 1,51 dan yang terendah DKI Jakarta sebesar 1,21.

**Gambar 3.3**  
Lima Provinsi  
dengan IPM  
Terendah,  
2012-2013

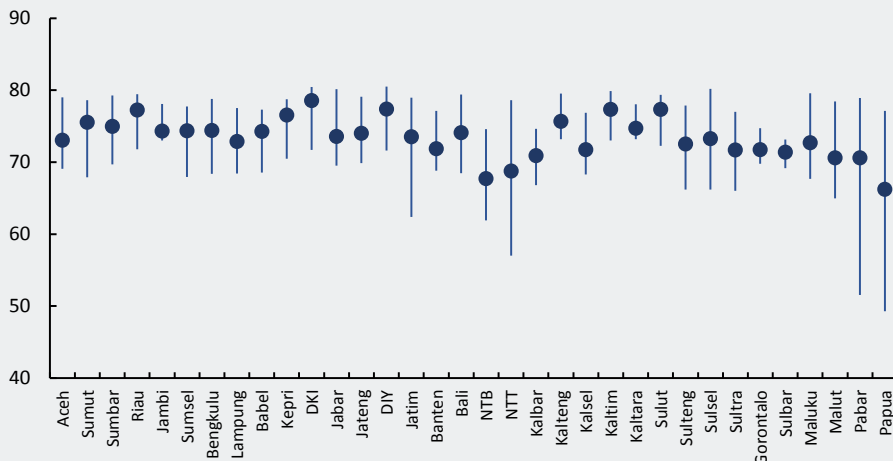




Provinsi dengan pencapaian IPM terendah didominasi oleh provinsi yang berada di Kawasan Timur Indonesia, yaitu Provinsi Papua, dengan nilai IPM sebesar 66,25. Selanjutnya empat provinsi lain yang memiliki IPM terendah berturut-turut adalah Nusa Tenggara Barat (67,73), Nusa Tenggara Timur (68,77), Papua Barat (70,62), dan Maluku Utara (70,63) (Gambar 3.3). Kelima Provinsi ini juga menempati posisi terendah dalam capaian IPM tahun 2012.

Reduksi *shortfall* kelima provinsi tersebut pada tahun 2013 berada pada rentang 1 dan 3, dengan capaian tertinggi diraih oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sementara Provinsi Papua, selain capaian IPM-nya yang paling rendah di antara kelima provinsi tersebut, capaian reduksi *shortfall*-nyapun terendah yaitu sebesar 1,15.

**Gambar 3.5** Kisaran IPM Tingkat Provinsi, 2013



Variasi pencapaian pembangunan manusia antar provinsi memberikan gambaran adanya ketidakmerataan perkembangan di berbagai sektor pembangunan. Indikator variasi pencapaian IPM terlihat dari kisarannya. Gambar 3.5, menunjukkan bahwa sebaran IPM di hampir semua provinsi relatif homogen, kecuali untuk beberapa wilayah seperti Papua, Papua Barat, NTT dan Jawa Timur yang memiliki rentang pencapaian IPM lebih dari 15,00. Hal ini mengindikasikan bahwa pencapaian IPM kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan sebarannya sangat beragam. Sebagai ilustrasi, di Provinsi Papua angka IPM tertinggi sebesar 77,12 (Kota Jayapura), sedangkan IPM terendah sebesar 49,29 (Kabupaten Nduga). Hal ini berarti disparitas IPM antar kabupaten/kota di Provinsi Papua sebesar 27,83.

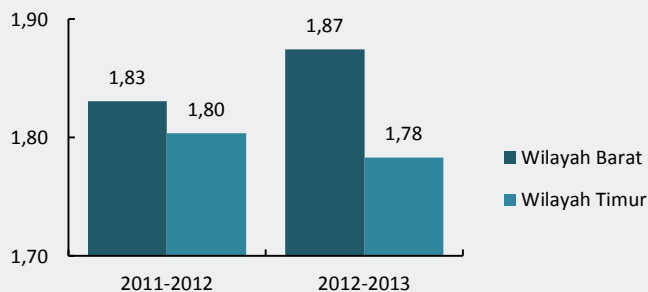
Provinsi yang memiliki sebaran IPM relatif paling homogen dibandingkan provinsi lainnya adalah Sulawesi Barat, dengan nilai IPM tertinggi sebesar 73,16 (Kabupaten Majene) dan IPM terendah sebesar 69,17 (Kabupaten Polewali Mamasa). Hal ini berarti disparitas IPM di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 3,99. Provinsi lain yang juga memiliki sebaran IPM relatif homogen yaitu Provinsi Kalimantan Utara, dan Gorontalo yang memiliki rentang IPM kurang dari 5,00.

## STATUS PEMBANGUNAN PROVINSI

Berdasarkan skala internasional, capaian IPM dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu kategori tinggi ( $IPM \geq 80$ ), kategori menengah atas ( $66 \leq IPM < 80$ ), kategori menengah bawah ( $50 \leq IPM < 66$ ), dan kategori rendah ( $IPM < 50$ ). Jika diukur menurut skala internasional, dari 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2013, semua provinsi termasuk dalam kategori IPM menengah atas. Berdasarkan penghitungan IPM tahun 2013 tidak terjadi kesenjangan pencapaian pembangunan manusia baik di provinsi wilayah bagian barat dan wilayah bagian timur Indonesia, di mana seluruh provinsi tergolong pada kategori IPM menengah atas. Hal yang membedakan hanyalah perbedaan kecepatan dalam pencapaian pembangunannya. Di wilayah timur, pencapaian IPM 2013 terlihat melambat dibandingkan periode sebelumnya. Sebaliknya, di wilayah barat justru mengalami percepatan.

Gambar 3.6 juga mengindikasikan bahwa pembangunan manusia di wilayah timur cenderung meningkat dari tahun ke tahun, akan tetapi peningkatannya masih relatif lebih lambat dibandingkan wilayah barat. Diperlukan kebijakan yang komprehensif agar pembangunan manusia di wilayah timur tidak jauh tertinggal dengan wilayah barat. Oleh sebab itu, pembangunan berkesinambungan disektor lain seperti infrastruktur mutlak diperlukan.

**Gambar 3.6**  
Rata-rata Reduksi  
*Shortfall* di Wilayah  
Indonesia Barat dan  
Wilayah Indonesia  
Timur,  
2011-2012 dan  
2012-2013



Wilayah Barat : Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan  
Wilayah Timur : NTB, NTT, Sulawesi, Maluku dan Papua

## CAPAIAN IPM KABUPATEN/KOTA

Tidak jauh berbeda dengan perkembangan IPM Provinsi, keseluruhan IPM Kabupaten/Kota juga memperlihatkan suatu peningkatan selama periode 2012-2013. Dilihat dari tingkat kecepatan peningkatan IPM antara satu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya, secara umum berbeda. Beberapa kabupaten/kota mencapai peningkatan IPM cukup pesat, sedangkan beberapa Kabupaten/Kota lainnya memiliki tingkat kecepatan yang cukup lambat.

Tabel 3.1 menyajikan urutan lima kabupaten/kota dengan IPM tertinggi dan lima kabupaten/kota dengan IPM terendah pada tahun 2013. Pada tabel tersebut, posisi kabupaten/kota untuk lima urutan terendah umumnya merupakan Kabupaten baru. Selain itu, dapat dilihat bahwa kelima kabupaten/kota dengan IPM tertinggi sebagian besar berasal dari Pulau Jawa, hanya satu kabupaten/kota berasal dari Sulawesi.

**Tabel 3.1**  
Kabupaten/Kota dengan IPM  
Tertinggi dan Terendah, 2013

5 Kabupaten/Kota Tertinggi	IPM 2013
Kota Yogyakarta	80.51
Kota Jakarta Selatan	80.47
Kota Makasar	80.17
Kota Depok	80.14
Kota Jakarta Timur	80.07

5 Kabupaten Terendah	IPM 2013
Puncak	50.18
Mamberamo Tengah	50.11
Yalimo	49.86
Intan Jaya	49.61
Nduga	49.29



**Tabel 3.2**  
Sepuluh  
Kabupaten/Kota yang  
Menghasilkan Reduksi  
*Shortfall* Terbesar,  
2013

Kabupaten/Kota	Provinsi	IPM	Reduksi <i>Shortfall</i>
Kota Ternate	Maluku Utara	78.44	3.68
Bombana	Sulawesi Tenggara	69.67	3.67
Sidoarjo	Jawa Timur	78.15	3.47
Maros	Sulawesi Selatan	73.48	3.41
Bengkulu Utara	Bengkulu	73.67	3.39
Kota Mataram	NTB	74.58	3.37
Kota Makasar	Sulawesi Selatan	80.17	3.33
Mojokerto	jawa timur	75.26	3.27
Wakatobi	Sulawesi Tenggara	69.77	3.19
Bulukumba	Sulawesi Selatan	73.21	3.16

Sementara itu, kelima Kabupaten dengan IPM terendah semuanya berasal dari Provinsi Papua. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi yang berada di ujung timur Indonesia ini masih tertinggal dibanding Provinsi lainnya.

Selanjutnya, Tabel 3.2 menyajikan Kabupaten/Kota yang mencatat kemajuan pesat selama tahun 2012-2013. Terdapat 10 Kabupaten/Kota yang tersebar di beberapa provinsi yang mencatat kemajuan cukup pesat. Kota Ternate di Provinsi Maluku Utara mencatat kemajuan yang tercepat dengan reduksi shortfall sebesar 3,68.

## STATUS PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Seiring dengan peningkatan pencapaian IPM provinsi, capaian pembangunan manusia pada seluruh Kabupaten dan Kota pun mengalami kemajuan pada tahun 2013. Namun demikian, kemajuan pembangunan manusia antar suatu Kabupaten/Kota dengan Kabupaten/Kota lainnya sangat bervariasi. Dengan demikian, kemajuan ini sangat tergantung dari komitmen penyelenggara pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

Hasil yang menggembirakan juga tergambar dari status pencapaiannya. Berdasarkan skala internasional, dari 511 Kabupaten/Kota di Indonesia yang dihitung IPM-nya, terdapat 5 (0,98 persen) Kabupaten/Kota yang sudah tergolong dalam kategori capaian IPM tinggi, dan sebanyak 470 Kabupaten/Kota (91,98 persen) berkategori menengah atas. Selebihnya masih tergolong ke dalam kelompok IPM menengah bawah dan rendah. Kabupaten yang tergolong IPM rendah seluruhnya terletak di Provinsi Papua.

**Tabel 3.3**  
Perbedaan Kemajuan Pembangunan Manusia antara Wilayah Indonesia  
Bagian Barat dan Bagian Timur, 2013

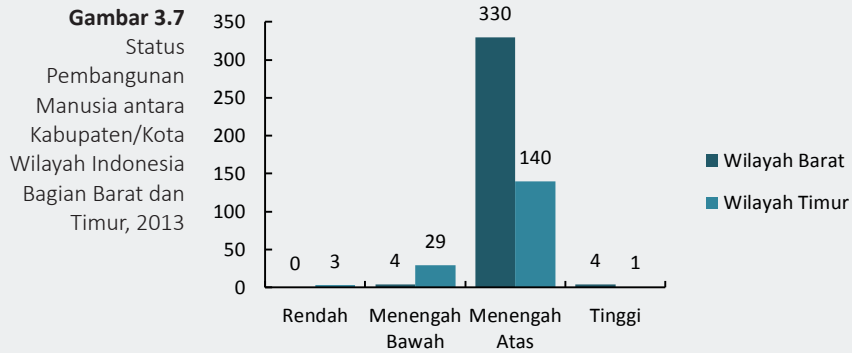
Wilayah Barat Tertinggi	IPM	Wilayah Barat Terendah	IPM
Kota Yogyakarta	80.51	Bangkalan	66.19
Kota Jakarta Selatan	80.47	Situbondo	65.73
Kota Depok	80.14	Bondowoso	65.39
Kota Jakarta Timur	80.07	Probolinggo	65.19
Kabupaten Sleman	79.97	Sampang	62.39

Wilayah Timur Tertinggi	IPM	Wilayah Timur Terendah	IPM
Kota Makasar	80.17	Puncak	50.18
Kota Ambon	79.58	Mamberamo Tengah	50.11
Manado	79.34	Yalimo	49.86
Kota Pare Pare	79.02	Intan Jaya	49.61
Kota Sorong	78.92	Nduga	49.29

Disparitas pencapaian IPM di Kabupaten/Kota di wilayah bagian barat, dan Kabupaten/Kota di wilayah bagian timur masih relatif besar. Meskipun nilai disparitas ini lebih kecil dibandingkan dengan disparitas pencapaian IPM tahun 2012. Di tingkat Kabupaten/Kota, pencapaian IPM tertinggi adalah Kota Yogyakarta, yaitu sebesar 80,51. Sedangkan pencapaian IPM terendah adalah Kabupaten Nduga di Provinsi Papua sebesar 49,29, sehingga disparitas pembangunan manusia antara Kota Yogyakarta dan Kabupaten Nduga sekitar 31,22 poin.

Jika melihat Tabel 3.3, terdapat hal menarik untuk di cermati. Pencapaian IPM tertinggi maupun terendah di wilayah bagian barat sama-sama terdapat di Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa terlihat lebih tinggi dari wilayah lain di bagian barat Indonesia, namun kesenjangan pembangunan manusianya terlihat nyata. Kota Yogyakarta menempati urutan tertinggi dengan IPM sebesar 80,51. Seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya, kabupaten/kota dengan IPM terendah di Pulau Jawa seluruhnya berada di Provinsi Jawa Timur, terutama yang termasuk wilayah tapal kuda. Rendahnya IPM khususnya di wilayah ini terkait dengan budaya masyarakat setempat.



Ketimpangan pembangunan manusia antar Kabupaten/Kota juga dapat dilihat dari status pembangunannya. Dari Gambar 3.7 masih terlihat adanya ketimpangan pembangunan manusia antar Kabupaten/Kota di wilayah bagian barat dan wilayah bagian timur. Pembangunan manusia di Kabupaten/Kota di wilayah bagian barat terlihat relatif lebih maju dibanding wilayah bagian timur. Di wilayah Indonesia bagian barat, sekitar 97,63 persen Kabupaten/Kota memiliki status pembangunan manusia dengan kategori menengah atas, sedangkan di wilayah Indonesia timur hanya terdapat 80,92 persen. Pada kategori IPM menengah bawah, di wilayah Indonesia bagian barat hanya ada 1,18 persen Kabupaten/Kota, sedangkan di wilayah Indonesia bagian timur masih terdapat 16,76 persen Kabupaten/Kota. Selain itu, ternyata masih ada Kabupaten di wilayah Indonesia bagian timur yang memiliki status pembangunan dengan kategori IPM rendah. •

《《周易》》

# INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI 2014



# IKK 2014

## **DEFINISI:**

Indeks yang menggambarkan perbandingan Tingkat Kemahalan Konstruksi (TKK) suatu Kabupaten/Kota atau Provinsi terhadap TKK Kabupaten/Kota atau Provinsi lain yang dijadikan sebagai acuan.

## **SUMBER DATA:**

Harga perdagangan besar bahan bangunan/konstruksi, harga sewa alat berat, dan upah tenaga kerja yang diperoleh melalui survei yang dilakukan di seluruh Kabupaten/Kota.

## **CAKUPAN:**

34 Provinsi dan 511 Kabupaten/Kota. Untuk keperluan DAU, jumlah Kabupaten/Kota tanpa DKI Jakarta adalah 505 Kabupaten/Kota.

## **KONSEP PEMIKIRAN**

IKK digunakan sebagai proksi untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut.

Tidak ada dua gedung kantor yang identik atau jembatan yang sama persis karena masing-masing memiliki karakter dan desain yang dibuat khusus untuk ditempatkan pada lokasi masing-masing.

Penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), karenanya, harus didasarkan atas suatu pendekatan atau kompromi tertentu. Misalnya yang menjadi objek adalah bangunan tempat tinggal, maka bangunan tempat tinggal tersebut harus mengakomodir berbagai macam rancangan dan model.

Untuk tujuan membandingkan harga konstruksi antar wilayah/daerah, ada dua metode penghitungan, yaitu, pertama dengan pendekatan harga input dan yang kedua pendekatan harga output. Pendekatan harga input yaitu dengan mencatat semua material penting yang digunakan digabung dengan upah dan sewa peralatan sesuai dengan bobotnya masing-masing. Kelemahan metode ini adalah bahwa kegiatan konstruksi dianggap mempunyai produktivitas yang sama dan tidak mempertimbangkan *overhead cost*. Pendekatan harga output dilakukan dengan cara menanyakan harga konstruksi yang sudah jadi. Pada harga output kelemahannya adalah bahwa dalam harga bangunan sudah termasuk manajemen *cost* dan keuntungan kontraktor yang bervariasi antar daerah dan antar proyek sehingga tidak memadai untuk tujuan membandingkan kemahalan konstruksi antar wilayah.

Alternatifnya adalah mengumpulkan harga konstruksi yang dapat mencakup *overhead cost* dan produktivitas pekerja tanpa memasukan manajemen *cost* dan keuntungan kontraktor. Caranya adalah dengan mengumpulkan harga komponen bangunan seperti harga dinding, atap, dan sebagainya. Apabila harga-harga komponen tersebut digabungkan maka akan didapatkan harga total proyek yang besarnya berada diatas harga input tetapi di bawah harga output karena sudah memasukkan *overhead cost* dan upah tetapi mengeluarkan biaya manajemen dan keuntungan kontraktor. Data seperti ini bisa didapatkan dari dokumen *Bill of Quantity (BoQ)* satu proyek yang sudah selesai.

Mendapatkan data BoQ dari tiap Kabupaten/Kota setiap tahun adalah hal yang mustahil. Hal ini karena tidak semua Kabupaten/Kota mempunyai proyek yang sama atau sebanding setiap tahun. Disamping itu juga karena volume pekerjaan mengumpulkan BoQ cukup besar padahal IKK harus dihitung setiap tahun dan dirilis pada pertengahan tahun berjalan. Oleh karena itu ditempuh jalan menggunakan BoQ tiap Kabupaten/Kota pada tahun tertentu sebagai penimbang indeks harga bahan bangunan, upah, dan sewa peralatan konstruksi pada tahun berjalan, setelah itu dibobot dengan realisasi APBD pembentukan modal tetap tiap-tiap Kabupaten/Kota untuk menunjukkan kegiatan konstruksi tertentu yang lebih penting di tiap-tiap Kabupaten/Kota, kemudian dibandingkan antar Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Indeks Kemahalan Konstruksi.

Dengan digunakannya realisasi APBD pembentukan modal tetap sebagai salah satu penimbang IKK, maka setiap tahun IKK satu Kabupaten/Kota relatif terhadap Kabupaten/Kota berubah-ubah tergantung dari realisasi APBD masing-masing Kabupaten/Kota.

## **INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI 2014**

IKK sudah dihitung sejak tahun 2003. Penimbang yang digunakan untuk menghitung IKK adalah BoQ tahun 2003. Perkembangan teknik sipil sangat cepat ditambah lagi dengan pesatnya industri bahan bangunan. Saat ini material yang digunakan untuk kegiatan konstruksi sudah banyak yang berubah atau muncul model baru seperti batako ringan, atap baja ringan, kusen aluminium, dsb. Peraturan Pemerintah baik pusat maupun daerah yang mempengaruhi kegiatan konstruksi juga banyak berubah. Hal-hal tersebut mengakibatkan BoQ 2003 yang selama ini digunakan untuk menghitung IKK tidak lagi sesuai dengan kondisi di lapangan. Oleh karena itu mulai tahun 2013 sampai sekarang penghitungan IKK sudah menggunakan BoQ terbaru yang dikumpulkan pada tahun 2012 dan updating BoQ tahun 2013.

IKK tahun 2014 menggunakan data harga komoditi yang dikumpulkan dalam 4 periode pencacahan yaitu periode akhir Juli tahun 2013, periode akhir Oktober tahun 2013, periode akhir Januari tahun 2014, dan periode akhir April tahun 2014 sehingga lebih tervalidasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya menggunakan 2 periode pencacahan.

Dengan menggunakan BoQ tahun 2012 dan 2013, realisasi APBD pembentukan modal tetap 2013, dan rata-rata harga komoditi, upah tenaga kerja, dan sewa alat berat bulan Juli dan Oktober tahun 2013 serta Januari dan April tahun 2014 maka diperoleh Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota tahun 2014 sebagai terlampir. •



# PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PERKAPITA 2013



# PDRB PERKAPITA 2013

**DEFINISI:**

PDRB merupakan penjumlahan nilai tambah bruto (NTB) semua kegiatan ekonomi, mulai dari pertanian sampai dengan jasa-jasa, pada suatu wilayah dalam satu kurun waktu tertentu.

**SUMBER DATA:**

Sensus, survei, dan dari produk administrasi instansi pemerintah, perusahaan dan lembaga lainnya.

**CAKUPAN:**

34 provinsi dan 511 kabupaten/kota. Untuk keperluan DAU, jumlah kabupaten/kota tanpa DKI Jakarta adalah 505 kabupaten/kota.

Bab ini mencakupi definisi atas PDRB, output, input antara, dan nilai tambah (*value added*). Tabel pertumbuhan ekonomi disajikan menurut harga konstan. Selebihnya berdasarkan atas harga berlaku dimana besaran tersebut diperlukan untuk penghitungan dana alokasi umum (DAU).

Harga berlaku atau *current prices* merupakan penilaian terhadap barang dan jasa menurut harga atau nilai yang sesungguhnya atau yang melekat pada barang dan jasa tersebut. Singkatnya, harga yang digunakan untuk menilai barang atau jasa setelah barang atau jasa tersebut diproduksi. Sedangkan harga konstan merupakan penilaian atas barang dan jasa menurut harga atau nilai pada suatu waktu tertentu yang digunakan sebagai basis harga atau nilai. Penyajian atas besaran-besaran PDRB tersebut diharapkan konsisten dengan penyusunan DAU.

PDRB merupakan penjumlahan nilai tambah bruto (NTB) semua kegiatan ekonomi, mulai dari pertanian sampai dengan jasa-jasa, pada suatu wilayah dalam satu kurun waktu tertentu. Dalam penghitungannya, NTB sama dengan output (tingkat produksi) bersih, yakni output bruto dikurangi semua biaya antara yang berhubungan dengan proses produksi.

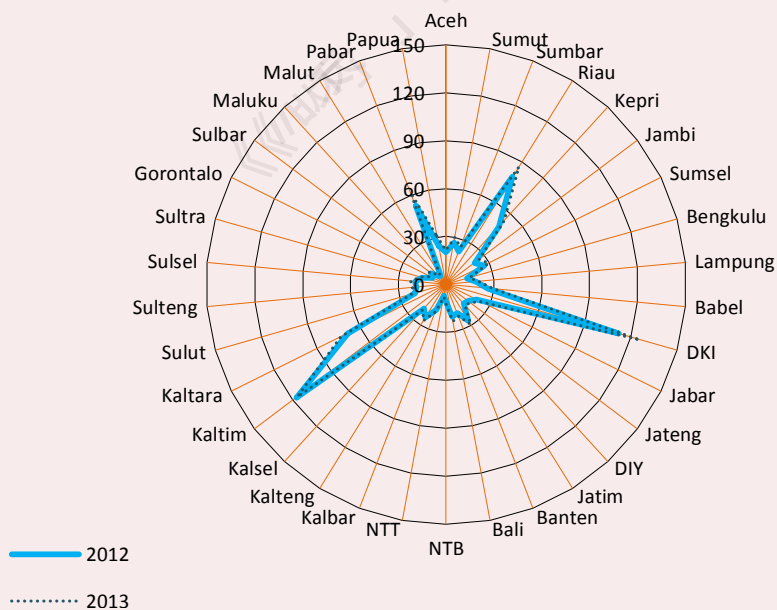
Adapun metode penilaian output menggunakan harga produsen, yakni tingkat harga sebelum terjadi atau dimasukkannya biaya pengiriman melalui pengangkutan dan biaya perdagangan (yang timbul pada tingkat pedagang). Secara teknis, semua biaya antara yang berhubungan dengan proses produksi disebut sebagai input antara. Input antara juga diartikan sebagai biaya produksi.

Ruang lingkup dan sumber data, termasuk untuk keperluan penghitungan DAU, berasal dari 511 PDRB Kabupaten/Kota dan 34 PDRB Provinsi. Dalam hal PDRB Provinsi, bukan berarti penjumlahan PDRB dari Kabupaten/Kota di dalamnya, sehingga total PDRB Kabupaten/Kota suatu propvinsi tidak selalu sama dengan PDRB Provinsinya. Selisihnya disebut dengan diskrepansi statistik (*statistical discrepancy*) yang dapat dijelaskan secara teoritis manakala masih dalam rentang toleransi. PDRB Provinsi dihitung oleh BPS Provinsi secara independen (terhadap PDRB Kabupaten/Kota) dan menggunakan informasi dasar pada masing-masing Provinsi. Sehingga, dalam hal penghitungan DAU Kabupaten/Kota menggunakan PDRB Kabupaten/Kota, dan untuk DAU Provinsi menggunakan PDRB Provinsi.

Capaian PDRB antar provinsi masih menunjukkan disparitas yang sangat tajam, demikian halnya dengan PDRB per kapita. Sebagaimana terlihat dari Gambar 5.1, Provinsi DKI Jakarta mencatat nilai PDRB per kapita tertinggi di Indonesia pada dua periode pengukuran (2012-2013). Pada tahun 2013, PDRB per kapita (dengan migas) DKI Jakarta sebesar Rp. 125,97 Juta diikuti oleh Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp. 116,47 Juta. Sedangkan nilai terendah di Provinsi Maluku Utara (Rp. 6,93 Juta). Tingginya capaian DKI Jakarta tersebut sekaligus menjelaskan mengapa DKI Jakarta menjadi magnet urbanisasi di Indonesia.

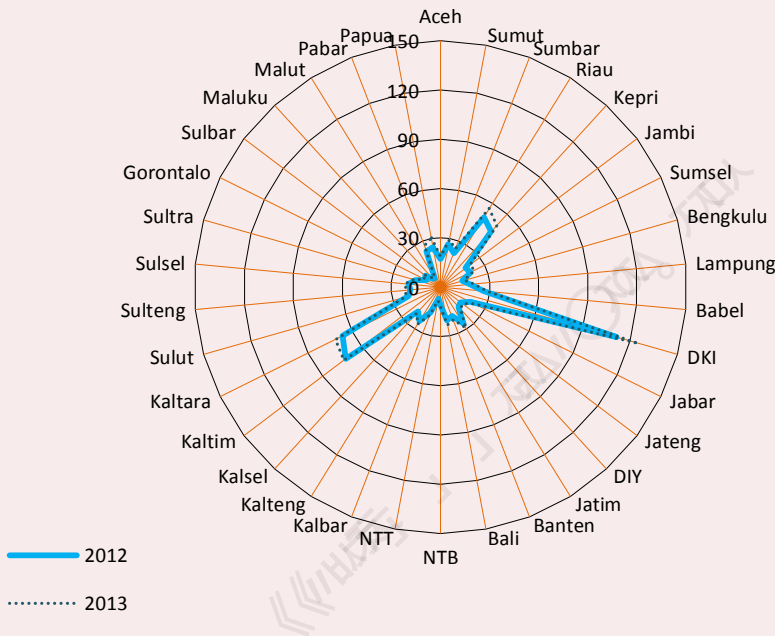
**Gambar 5.1**

PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas (Juta Rupiah), 2012-2013



Adapun besaran PDRB per kapita tanpa migas, tertinggi di tahun 2013 adalah DKI Jakarta (Rp 125,42 Juta) dan Kalimantan Timur (Rp 73,69 Juta), sedangkan terendah adalah Maluku Utara (Rp 6,93 Juta). Sementara untuk tingkat kabupaten/kota, yang memiliki PDRB per kapita tanpa migas tertinggi adalah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, sebesar Rp 370,93 Juta dan Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, sebesar Rp 306,55 Juta dan yang terendah adalah Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, sebesar Rp 3,59 Juta.

**Gambar 5.2**  
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Tanpa Migas (Juta Rupiah),  
2012-2013



## PDRB PER KAPITA 2013

Sesuai dengan sistem neraca nasional yang direkomendasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terdapat tiga pendekatan untuk menyusun PDRB, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Ketiga metode tersebut menyesuaikan dengan data dasar yang tersedia di masing-masing daerah.

Untuk menghitung PDRB menggunakan pendekatan pendapatan, dilakukan dengan cara menjumlahkan balas jasa faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi, yakni upah/gaji, surplus usaha, penyusutan, dan pajak tak langsung netto (pajak dikurangi subsidi). Sementara jika menggunakan pendekatan pengeluaran, dilakukan dengan cara menjumlahkan pengeluaran konsumsi rumahtangga, lembaga nirlaba, pengeluaran konsumsi pemerintah,

investasi, dan ekspor netto. Sedangkan untuk penggunaan pendekatan produksi dengan cara menjumlahkan nilai tambah dari seluruh proses produksi barang dan jasa. Produksi barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut 9 (sembilan) jenis lapangan usaha (1) Pertanian; (2) Pertambangan dan Penggalan; (3) Industri Pengolahan; (4) Listrik, Gas, dan Air Bersih; (5) Konstruksi; (6) Perdagangan, Hotel, dan Restoran; (7) Pengangkutan dan Komunikasi; (8) Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, & Jasa Perusahaan; dan (9) Jasa-Jasa.

PDRB per kapita suatu tahun diperoleh dari hasil pembagian antara PDRB atas dasar harga berlaku pada suatu tahun dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang sama. •



# CATATAN TEKNIS

BAB 6



**DALAM** penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU), salah satu variabel yang digunakan adalah jumlah penduduk menurut wilayah kabupaten/kota. Data tersebut merupakan bagian dari hasil penghitungan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035. Hal ini sejalan dengan rencana pemerintah yang secara serentak menggunakan hasil proyeksi penduduk sebagai data rujukan untuk berbagai keperluan perencanaan, sebagaimana ditegaskan oleh Presiden RI pada saat peluncuran buku Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 pada tanggal 29 Januari 2014 di istana negara.

Proyeksi penduduk nasional dan provinsi dihitung menggunakan metode komponen dan untuk melengkapi estimasi penduduk kabupaten/kota digunakan metode matematik dengan rujukan waktu pertengahan tahun. Proyeksi penduduk provinsi dan estimasi penduduk kabupaten/kota berdasarkan pada data hasil sensus penduduk 2000 dan 2010 dimana konsep penduduk merujuk pada defacto menurut wilayah yaitu dinyatakan sebagai penduduk di wilayah tempat tinggalnya. Konsep ini sangat tepat sebab program pembangunan (penyediaan fasilitas dan pelayanan) yang diberikan sesuai dengan keadaan jumlah penduduknya.

### KONSEP DAN DEFINISI

- Konsep penduduk yang digunakan dalam Sensus Penduduk 2010 sama seperti konsep penduduk yang digunakan pada kegiatan survei kependudukan lainnya yang digunakan oleh BPS.
- Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap.
- Batasan lamanya tinggal diaplikasikan dalam konsep anggota rumah tangga, yang selanjutnya dipakai untuk menentukan seseorang terhitung sebagai penduduk di suatu wilayah tertentu.
- Anggota rumah tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang berada di rumah pada waktu pencacahan maupun yang sementara tidak ada.
- Penduduk mencakup penduduk yang bertempat tinggal tetap dan penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap, seperti tuna wisma, awak kapal, penghuni perahu/rumah apung, masyarakat terpencil, dan pengungsi.

### SUMBER DATA

- Sensus Penduduk 2000
- Sensus Penduduk Aceh Nias 2005
- Sensus Penduduk 2010
- Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035



### URGENSI SP2010 DAN PROYEKSI PENDUDUK

- Memperbarui data kependudukan termasuk parameter demografi.
- Sebagai *master sampling frame* untuk kegiatan survei.
- Memantau kinerja pencapaian tujuan MDGs (*the Millenium Development Goals*) sampai wilayah administrasi terkecil.
- Sebagai sumber data untuk Program Targetting (Beasiswa, Lansia, Bantuan sosial, perumahan, dll.).
- Sebagai data dasar (*baseline*) bagi semua kementerian/instansi dalam menetapkan program dan target ke depan.
- Menggunakan data proyeksi berarti mengurangi resiko bencana yang mungkin terjadi karena kependudukan

### METODOLOGI ESTIMASI PENDUDUK KABUPATEN/KOTA

- Estimasi ini dibuat dengan metode matematik mengadopsi model geometrik, memanfaatkan trend pertumbuhan masa lalu untuk memperkirakan perubahan penduduk yang mungkin terjadi selama 10 tahun kedepan.
- Menggunakan pagu penduduk Indonesia dan provinsi hasil proyeksi untuk memperoleh estimasi penduduk kabupaten/kota dilakukan dengan cara *top down*.
- Penjumlahan estimasi penduduk per kabupaten/kota sama dengan proyeksi penduduk provinsi.

### CAKUPAN WILAYAH DAN HASIL

Seiring dengan perkembangan waktu, terbentuk daerah otonom baru hasil pemekaran wilayah administrasi tahun 2012 dan 2013 sehingga wilayah administrasi Indonesia menjadi sebagai berikut:

- 34 provinsi
- 511 kabupaten/kota
- 6.988 kecamatan
- 80.921 desa/kelurahan
- Kegiatan estimasi penduduk dilakukan untuk 511 kabupaten/kota di seluruh wilayah administrasi Indonesia. Untuk keperluan DAU, jumlah kabupaten/kota tanpa DKI Jakarta adalah 505 kabupaten/kota.
- Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Tahun 2010-2035, jumlah penduduk Indonesia tahun 2014 adalah 252.164.786 jiwa

### PENGERTIAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Konsep pembangunan manusia adalah manusia sebagai kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Salah satu pengukuran pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Beberapa penjelasan mengenai Indeks Pembangunan Manusia;

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang mengukur kualitas hidup manusia. IPM dibangun melalui pendekatan 3 dimensi, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak.
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).  
IPM digunakan sebagai salah satu ukuran kinerja daerah, khususnya dalam hal evaluasi proses pembangunan sumber daya manusia.
- IPM menjelaskan tentang bagaimana manusia mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu proses pembangunan, sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Secara berkala, data IPM digunakan sebagai salah satu indikator dalam penyusunan Dana Alokasi Umum (DAU).
- IPM harus digunakan dengan hati-hati, meskipun indeks-indeks tersebut memberikan petunjuk umum tentang kebutuhan-kebutuhan dan prioritas-prioritas pembangunan manusia. Indeks tersebut masih perlu dilengkapi dengan informasi-informasi kuantitatif dan kualitatif yang harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- Indeks komposit yang disusun dari tiga indikator: lama hidup yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir; pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas; dan standar hidup yang diukur dengan pengeluaran per kapita (PPP rupiah). Nilai indeks berkisar antara 0-100.

### SUMBER DATA

Sumber data yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia terutama adalah Susenas (Kor dan Modul Konsumsi), Sensus Penduduk 2000 (SP2000), SUPAS 2005, IHK.

### KONSEP DAN DEFINISI

- **Angka Melek Huruf penduduk dewasa:** Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya.
- **Angka Harapan Hidup pada waktu lahir ( $e_0$ ):** Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.

- **Rata-rata Lama Sekolah:** Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.
- **Paritas Daya Beli (*Purchasing Power Parity* = PPP):** Indikator ekonomi yang digunakan untuk melakukan perbandingan harga-harga riil antar provinsi dan antar kabupaten/kota. Dalam konteks PPP untuk Indonesia, satu rupiah di suatu daerah (provinsi/kabupaten) memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di Jakarta. PPP dihitung berdasarkan pengeluaran riil per kapita setelah disesuaikan dengan indeks harga konsumen dan penurunan utilitas marginal yang dihitung dengan formula Atkinson.
- **Reduksi *Shortfall*:** Mengukur keberhasilan pembangunan manusia dipandang dari jarak antara yang dicapai terhadap kondisi ideal (IPM=100). Nilai reduksi shortfall yang lebih besar menandakan peningkatan IPM yang lebih cepat.

## METODOLOGI

- Angka Harapan Hidup dihitung dengan menggunakan paket program MORTPAK (metode *Trussel* dengan model *West*), dengan input Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH).
- Angka Melek Huruf, menghitung proporsi penduduk yang dapat baca tulis.
- Rata-rata Lama Sekolah, menghitung rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan penduduk untuk menjalani sekolah.
- Paritas Daya Beli dihitung dengan proses sebagai berikut:
  1.  $Y$  : Pengeluaran per kapita
  2.  $Y_1$  :  $Y + (Y \cdot 20\%)$
  3.  $Y_2$  : Nilai Riil  $Y_1 \rightarrow$  deflasi, IHK
  4. PPP  $\rightarrow$  didasarkan 27 komoditi (lihat Tabel 6.1)

$$PPP = \frac{\sum_j E_{(i,j)}}{\sum_j P_{(x,j)} Q_{(i,j)}}$$

$E_{(i,j)}$  = Pengeluaran untuk komoditi j di wilayah i.

$P_{(x,j)}$  = Harga komoditi j di Jakarta Selatan.

$Q_{(i,j)}$  = Volume komoditi j (unit) yang dikonsumsi di wilayah i.

5.  $Y_3$  :  $Y_2 / PPP$

6.  $Y_4$  : Menghitung nilai  $Y_3$  dengan formula Atkinson

Formula Atkinson

$$C_{(i)}^* = \begin{cases} C_{(i)} & ; \text{jika } C_{(i)} < Z \\ Z + 2(C_{(i)} - Z)^{(1/2)} & ; \text{jika } Z < C_{(i)} < 2Z \\ Z + 2(Z)^{(1/2)} + 3(C_{(i)} - 2Z)^{(1/3)} & ; \text{jika } 2Z < C_{(i)} < 3Z \\ Z + 2(Z)^{(1/2)} + 3(Z)^{(1/3)} + 4(C_{(i)} - 3Z)^{(1/4)} & ; \text{jika } 3Z < C_{(i)} < 4Z \end{cases}$$

$C_{(i)}$  = PPP dari nilai riil pengeluaran per kapita

$Z$  = Batas tingkat pengeluaran yang ditetapkan secara arbitrer sebesar Rp. 549.500,- per kapita per tahun atau Rp. 1.500, per kapita per hari.

## TAHAPAN PENGHITUNGAN

Untuk menghitung IPM, maka setiap komponen dihitung indeksinya. Formula penghitungan indeks sebagai berikut :

$$\text{Indeks } X_{(i,j)} = \frac{(X_{(i,j)} - X_{(i-\min)})}{(X_{(i-\max)} - X_{(i-\min)})}$$

- $X_{(i,j)}$  = Indeks komponen ke-i dari daerah j.  
 $X_{(i-\min)}$  = Nilai minimum dari  $X_i$  (Standar UNDP).  
 $X_{(i-\max)}$  = Nilai maksimum dari  $X_i$  (Standar UNDP).

Dengan menggunakan formula di atas, Indeks Harapan Hidup, Indeks Pendidikan, dan Indeks Daya Beli dapat dihitung. Nilai minimum dan maksimum merupakan angka standar UNDP.

### i. Indeks Lamanya Hidup

$$\text{Index } X_1 = \frac{(X_1 - 25)}{(85 - 25)}$$

### ii. Indeks Pendidikan

#### a. Indeks Melek Huruf

$$\text{Index } X_{21} = \frac{(X_{21} - 0)}{(100 - 0)}$$

#### b. Indeks Lama Sekolah

$$\text{Index } X_{21} = \frac{(X_{22} - 0)}{(15 - 0)}$$

### iii. Indeks Pengeluaran Riil

$$\text{Index } X_3 = \frac{(X_3 - 360)}{(732,72 - 300)}$$

### iv. Nilai IPM dapat dihitung sebagai :

$$IPM = \frac{\text{Index } X_1 + \text{Index } X_2 + \text{Index } X_3}{3}$$

Tabel 6.1. Daftar Paket Komoditi yang Digunakan dalam Penghitungan PPP

Komoditi	Unit	Proporsi dari total konsumsi (%)
1. Beras Lokal	Kg	7,25
2. Tepung terigu	Kg	0,10
3. Singkong	Kg	0,22
4. Tuna/cakalang	Kg	0,50
5. Teri	Ons	0,32
6. Daging sapi	Kg	0,78
7. Ayam	Kg	0,65
8. Telur	Butir	1,48
9. Susu kental manis	397 Gram	0,48
10. Bayam	Kg	0,30
11. Kacang panjang	Kg	0,32
12. Kacang tanah	Kg	0,22
13. Tempe	Kg	0,79
14. Jeruk	Kg	0,39
15. Pepaya	Kg	0,18
16. Kelapa	Butir	0,56
17. Gula	Ons	1,61
18. Kopi	Ons	0,60
19. Garam	Ons	0,15
20. Merica	Ons	0,13
21. Mie instan	80 Gram	0,79
22. Rokok kretek	10 batang	2,86
23. Listrik	Kwh	2,06
24. Air minum	m <sup>3</sup>	0,46
25. Bensin	Liter	1,02
26. Minyak tanah	Liter	1,74
27. Sewa Rumah	Unit	11,56
TOTAL		37,52

Misalkan  $p_{kn}$  adalah harga komponen konstruksi  $n$  di Kabupaten  $k$  ( $k = 1, 2, \dots, K$ ;  $n = 1, 2, \dots, N$ ). Maka model statistik metode *Country Product Dummy* (CPD) dituliskan sebagai berikut,

$$p_{kn} = a_k b_n u_{kn}, \text{ dalam hal ini } k = 1, 2, \dots, K ; n = 1, 2, \dots, N.$$

$a_k$  dan  $b_n$  merupakan parameter yang akan diduga dari data harga, sedangkan  $u_{kn}$  merupakan *random variable* yang berdistribusi identik dan independen. Dengan asumsi bahwa random variabel ini berdistribusi log normal atau dengan kata lain  $\log p_{kn}$  berdistribusi normal dengan mean 0 dan varian  $\sigma^2$ . Dalam bentuk logaritma model di atas berbentuk linear

$$\begin{aligned} \ln p_{kn} &= \ln a_k + \ln b_n + \ln u_{kn} \\ &= \alpha_k + \gamma_n + V_{kn} \end{aligned}$$

Parameter  $a_k$  diartikan sebagai tingkat harga konstruksi di Kabupaten  $k$  relatif terhadap harga konstruksi di Kabupaten lain yang sedang dibandingkan. Bila  $a_k$  dinyatakan sebagai relatif harga konstruksi terhadap Kabupaten yang dijadikan referensi, katakan Kabupaten  $X$ , maka  $a_k$  adalah harga konstruksi di Kabupaten  $K$  relatif terhadap 1 (satu), harga di Kabupaten  $X$ . Dengan kata lain harga konstruksi di Kabupaten  $K$  'setinggi'  $a_k$  dibanding harga konstruksi di Kabupaten  $X$ . Karenanya IKK di Kabupaten  $K$  dinyatakan sebagai

$$IKK_k = \exp(\alpha_k)$$

Untuk memudahkan membaca, persamaan di atas dikalikan dengan 100 sehingga perbandingan data dinyatakan dalam persen. Pada penghitungan IKK tahun 2014 ini Kota Samarinda dijadikan kota referensi dengan maksud supaya ada keterbandingan dengan IKK tahun sebelumnya. Untuk IKK tingkat provinsi data harga yang digunakan adalah rata-rata geometrik setiap komoditi dari seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi masing-masing dengan Provinsi Kalimantan Timur sebagai provinsi referensinya.

Sesuai dengan sistem neraca nasional yang direkomendasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terdapat tiga pendekatan untuk menyusun PDRB, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Ketiga metode tersebut menyesuaikan dengan data dasar yang tersedia di masing-masing daerah.

Untuk menghitung PDRB menggunakan pendekatan pendapatan, dilakukan dengan cara menjumlahkan balas jasa faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi, yakni upah/gaji, surplus usaha, penyusutan, dan pajak tak langsung netto (pajak dikurangi subsidi). Sementara jika menggunakan pendekatan pengeluaran, dilakukan dengan cara menjumlahkan pengeluaran konsumsi rumahtangga, lembaga nirlaba, pengeluaran konsumsi pemerintah, investasi, dan ekspor netto. Sedangkan untuk penggunaan pendekatan produksi dengan cara menjumlahkan nilai tambah dari seluruh proses produksi barang dan jasa. Produksi barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut 9 (sembilan) jenis lapangan usaha (1) Pertanian; (2) Pertambangan dan Penggalan; (3) Industri Pengolahan; (4) Listrik, Gas, dan Air Bersih; (5) Konstruksi; (6) Perdagangan, Hotel, dan Restoran; (7) Pengangkutan dan Komunikasi; (8) Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, & Jasa Perusahaan; dan (9) Jasa-Jasa.

PDRB per kapita suatu tahun diperoleh dari hasil pembagian antara PDRB atas dasar harga berlaku pada suatu tahun dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang sama.





# TABEL RINGKASAN



**Tabel R1**

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 33 Provinsi

Kode	Provinsi	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2014	IPM 2013	IKK 2014	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2013 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Provinsi Aceh	4.906.835	73,05	93,54	21.418.148
2	Provinsi Sumatera Utara	13.766.851	75,55	96,08	29.722.268
3	Provinsi Sumatera Barat	5.131.882	75,01	92,90	25.086.460
4	Provinsi Riau	6.188.442	77,25	102,89	86.560.290
5	Provinsi Jambi	3.344.421	74,35	94,90	26.036.668
6	Provinsi Sumatera Selatan	7.941.495	74,36	98,80	29.593.911
7	Provinsi Bengkulu	1.844.788	74,41	96,21	15.095.290
8	Provinsi Lampung	8.026.191	72,87	91,87	20.724.999
9	Provinsi Bangka Belitung	1.343.881	74,29	102,09	29.605.475
10	Provinsi Kepulauan Riau	1.917.415	76,56	107,34	53.890.551
11	Provinsi DKI Jakarta	10.075.310	78,59	97,13	125.971.147
12	Provinsi Jawa Barat	46.029.668	73,58	88,05	23.602.962
13	Provinsi Jawa Tengah	33.522.663	74,05	83,00	18.751.301
14	Provinsi DI Yogyakarta	3.637.116	77,37	84,81	17.717.081
15	Provinsi Jawa Timur	38.610.202	73,54	87,62	29.620.235
16	Provinsi Banten	11.704.877	71,90	89,19	21.353.270
17	Provinsi Bali	4.104.890	74,11	91,67	23.310.596
18	Provinsi Nusa Tenggara Barat	4.773.795	67,73	81,00	11.946.496
19	Provinsi Nusa Tenggara Timur	5.036.897	68,77	89,31	8.168.262
20	Provinsi Kalimantan Barat	4.716.093	70,93	109,46	18.304.037
21	Provinsi Kalimantan Tengah	2.439.858	75,68	103,23	26.634.205
22	Provinsi Kalimantan Selatan	3.922.790	71,74	99,18	21.627.218
23	Provinsi Kalimantan Timur	3.385.102	77,33	100,00	116.469.205
24	Provinsi Kalimantan Utara	584.538	74,72	109,86	73.544.775
25	Provinsi Sulawesi Utara	2.386.604	77,36	102,10	22.623.866
26	Provinsi Sulawesi Tengah	2.831.283	72,54	86,62	21.052.389
27	Provinsi Sulawesi Selatan	8.432.163	73,28	88,55	22.150.805
28	Provinsi Sulawesi Tenggara	2.448.081	71,73	99,67	17.012.132
29	Provinsi Gorontalo	1.115.633	71,77	93,62	10.703.375
30	Provinsi Sulawesi Barat	1.258.090	71,41	94,79	13.112.416
31	Provinsi Maluku	1.657.409	72,70	104,43	8.133.899
32	Provinsi Maluku Utara	1.138.667	70,63	117,89	6.929.268
33	Provinsi Papua Barat	849.809	70,62	125,79	61.462.220
34	Provinsi Papua	3.091.047	66,25	191,86	30.712.934

**Tabel R2**

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 505 Kabupaten/Kota

Kode	Provinsi	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2014	IPM 2013	IKK 2014	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2013 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1100</b>	<b>Provinsi Aceh</b>	<b>4.906.835</b>	<b>73,05</b>	<b>93,54</b>	<b>21.418.148</b>
1101	Kab. Simeuleu	87.598	70,76	112,83	8.406.641
1102	Kab. Aceh Singkil	112.161	69,79	106,38	9.324.134
1103	Kab. Aceh Selatan	220.971	71,18	89,93	14.402.098
1104	Kab. Aceh Tenggara	196.249	72,81	91,98	10.538.213
1105	Kab. Aceh Timur	394.933	71,79	101,12	19.983.977
1106	Kab. Aceh Tengah	192.204	75,04	103,33	19.668.238
1107	Kab. Aceh Barat	190.244	72,24	100,28	20.758.162
1108	Kab. Aceh Besar	384.618	74,51	91,00	19.990.656
1109	Kab. Aceh Pidie	410.580	73,32	92,18	15.310.795
1110	Kab. Bireuen	423.397	74,03	101,25	19.137.937
1111	Kab. Aceh Utara	572.961	73,51	108,34	22.159.757
1112	Kab. Aceh Barat Daya	138.140	72,07	96,46	15.190.250
1113	Kab. Gayo Lues	86.262	69,09	89,12	13.230.938
1114	Kab. Aceh Tamiang	272.228	72,04	96,75	10.790.404
1115	Kab. Nagan Raya	152.352	71,50	119,46	22.196.419
1116	Kab. Aceh Jaya	86.123	71,00	98,82	15.442.346
1117	Kab. Bener Meriah	134.015	72,39	99,66	18.272.640
1118	Kab. Pidie Jaya	145.584	73,69	93,21	11.471.341
1171	Kota Banda Aceh	249.499	79,00	102,26	49.212.652
1172	Kota Sabang	32.739	77,23	99,30	20.584.477
1173	Kota Langsa	162.814	75,10	93,06	14.811.315
1174	Kota Lhokseumawe	187.455	77,84	105,71	65.136.152
1175	Kota Subulussalam	73.708	70,60	75,83	6.578.807

**Tabel R2**

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 505 Kabupaten/Kota

Kode	Provinsi	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2014	IPM 2013	IKK 2014	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2013 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1200</b>	<b>Provinsi Sumatera Utara</b>	<b>13.766.851</b>	<b>75,55</b>	<b>96,08</b>	<b>29.722.268</b>
1201	Kab. Nias	135.319	69,93	89,54	12.187.447
1202	Kab. Mandailing Natal	426.382	71,72	101,02	13.219.666
1203	Kab. Tapanuli Selatan	273.132	75,13	111,97	16.550.022
1204	Kab. Tapanuli Tengah	342.902	72,55	87,30	9.846.097
1205	Kab. Tapanuli Utara	290.864	75,81	101,53	17.755.285
1206	Kab. Toba Samosir	178.568	77,49	114,86	28.242.211
1207	Kab. Labuhan Batu	453.630	75,71	89,73	24.497.588
1208	Kab. Asahan	699.720	74,23	100,54	25.299.321
1209	Kab. Simalungun	844.033	74,55	91,34	17.529.062
1210	Kab. Dairi	277.575	74,22	80,47	19.367.097
1211	Kab. Tanah Karo	382.622	76,76	95,36	25.440.787
1212	Kab. Deli Serdang	1.984.598	76,82	103,36	30.854.178
1213	Kab. Langkat	1.005.965	74,38	82,90	25.264.322
1214	Kab. Nias Selatan	305.010	68,58	107,24	9.771.060
1215	Kab. Humbang Hasundutan	181.026	73,09	107,86	20.183.211
1216	Kab. Pakpak Bharat	44.520	72,54	112,23	10.998.542
1217	Kab. Samosir	123.065	75,02	122,79	18.299.543
1218	Kab. Serdang Berdagai	606.367	74,41	99,28	23.252.929
1219	Kab. Batu Bara	396.479	73,26	100,85	57.211.227
1220	Kab. Padang Lawas Utara	247.286	73,96	81,16	10.285.985
1221	Kab. Padang Lawas	251.927	73,27	80,99	9.499.042
1222	Kab. Labuhan Batu Selatan	307.171	75,48	116,96	30.589.642
1223	Kab. Labuhan Batu Utara	347.465	75,70	98,72	30.543.882
1224	Kab. Nias Utara	132.735	69,39	113,49	12.311.351
1225	Kab. Nias Barat	84.419	67,91	98,35	10.083.011
1271	Kota Sibolga	86.166	76,19	103,63	24.774.739
1272	Kota Tanjung Balai	164.675	75,44	102,22	24.778.443
1273	Kota Pematang Siantar	245.104	78,62	89,50	21.750.775
1274	Kota Tebing Tinggi	154.804	77,96	97,22	22.636.619
1275	Kota Medan	2.191.140	78,62	87,26	55.151.219
1276	Kota Binjai	261.490	77,79	100,17	28.792.287
1277	Kota Padang Sidempuan	206.496	76,31	109,99	14.109.915
1278	Kota Gunung Sitoli	134.196	72,99	99,79	22.110.915

**Tabel R2**

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 505 Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2014	IPM 2013	IKK 2014	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2013 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1300</b>	<b>Provinsi Sumatera Barat</b>	<b>5.131.882</b>	<b>75,01</b>	<b>92,90</b>	<b>25.086.460</b>
1301	Kab. Kepulauan Mentawai	83.603	69,72	181,95	25.379.404
1302	Kab. Pesisir Selatan	446.479	72,98	95,86	15.019.930
1303	Kab. Solok	361.095	72,46	92,31	21.821.801
1304	Kab. Sawahlunto Sijunjung	218.588	72,15	101,48	20.324.827
1305	Kab. Tanah Datar	343.875	75,29	95,30	22.502.308
1306	Kab. Padang Pariaman	403.530	72,93	100,40	22.810.370
1307	Kab. Agam	472.995	74,50	99,60	20.492.013
1308	Kab. Limapuluh Koto	365.389	72,54	98,96	25.512.577
1309	Kab. Pasaman	266.888	74,10	96,07	18.438.902
1310	Kab. Solok Selatan	156.901	70,23	95,25	13.946.612
1311	Kab. Dharmasraya	216.928	70,52	96,78	18.710.677
1312	Kab. Pasaman Barat	401.624	71,39	99,08	24.059.121
1371	Kota Padang	889.561	78,82	100,68	40.905.431
1372	Kota Solok	64.819	76,85	96,45	24.748.953
1373	Kota Sawahlunto	59.608	76,11	91,55	27.655.413
1374	Kota Padang Panjang	50.208	78,81	97,16	27.205.284
1375	Kota Bukit Tinggi	120.491	79,29	99,05	26.236.092
1376	Kota Payakumbuh	125.690	76,99	99,08	22.773.981
1377	Kota Pariaman	83.610	75,46	89,96	28.361.493

**Tabel R2**

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 505 Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2014	IPM 2013	IKK 2014	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2013 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1400</b>	<b>Provinsi Riau</b>	<b>6.188.442</b>	<b>77,25</b>	<b>102,89</b>	<b>86.560.290</b>
1401	Kab. Kuantan Singingi	310.619	74,77	96,00	66.400.070
1402	Kab. Indragiri Hulu	400.901	75,21	106,77	75.371.820
1403	Kab. Indragiri Hilir	694.614	76,41	106,62	60.818.197
1404	Kab. Pelalawan	377.221	74,27	101,76	68.432.119
1405	Kab. Siak	428.499	77,44	116,54	138.159.940
1406	Kab. Kampar	773.171	75,83	99,44	53.558.637
1407	Kab. Rokan Hulu	568.576	73,87	99,41	34.657.492
1408	Kab. Bengkalis	536.138	76,12	125,07	213.635.960
1409	Kab. Rokan Hilir	627.233	73,45	118,35	81.838.044
1410	Kab. Meranti	179.894	71,80	123,09	69.304.062
1471	Kota Pekanbaru	1.011.467	79,47	109,63	67.144.674
1473	Kota Dumai	280.109	78,99	98,82	75.787.464

**Tabel R2**

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 505 Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2014	IPM 2013	IKK 2014	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2013 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1500</b>	<b>Provinsi Jambi</b>	<b>3.344.421</b>	<b>74,35</b>	<b>94,90</b>	<b>26.036.668</b>
1501	Kab. Kerinci	234.003	75,49	94,02	19.949.430
1502	Kab. Merangin	360.187	73,28	90,86	14.800.465
1503	Kab. Sarolangun	272.203	74,08	96,05	24.169.634
1504	Kab. Batanghari	257.201	74,25	89,78	23.844.190
1505	Kab. Muaro Jambi	388.323	74,10	84,71	17.214.030
1506	Kab. Tanjung Jabung Timur	212.084	73,03	98,88	63.552.621
1507	Kab. Tanjung Jabung Barat	304.899	74,21	118,56	34.771.730
1508	Kab. Tebo	324.919	73,38	92,79	12.438.877
1509	Kab. Bungo	336.320	73,44	97,64	18.877.127
1571	Kota Jambi	568.062	77,52	98,95	26.113.913
1572	Kota Sungai Penuh	86.220	78,11	89,03	27.055.572

**Tabel R2**

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 505 Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2014	IPM 2013	IKK 2014	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2013 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1600</b>	<b>Provinsi Sumatera Selatan</b>	<b>7.941.495</b>	<b>74,36</b>	<b>98,80</b>	<b>29.593.911</b>
1601	Kab. Ogan Komering Ulu	344.932	74,42	95,07	25.943.181
1602	Kab. Ogan Komering Ilir	776.263	71,82	98,19	13.689.133
1603	Kab. Muara Enim	590.975	72,06	100,11	41.189.296
1604	Kab. Lahat	389.034	72,68	97,93	21.632.993
1605	Kab. Musi Rawas	378.987	69,57	108,33	22.058.799
1606	Kab. Musi Banyuasin	602.027	73,67	113,29	64.363.626
1607	Kab. Banyuasin	799.998	71,08	107,21	21.462.532
1608	Kab. OKU Selatan	339.424	72,67	94,55	13.525.110
1609	Kab. OKU Timur	642.206	71,19	93,68	12.599.749
1610	Kab. Ogan Ilir	403.828	70,89	107,79	14.559.960
1611	Kab. Empat Lawang	234.880	70,02	103,80	12.807.786
1612	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	176.936	68,31	113,62	26.732.783
1613	Kab. Musi Rawas Utara	180.266	67,94	114,71	16.808.632
1671	Kota Palembang	1.558.494	77,74	104,34	50.488.417
1672	Kota Prabumulih	174.477	75,83	105,62	25.464.093
1673	Kota Pagar Alam	132.498	74,47	109,26	14.003.928
1674	Kota Lubuk Linggau	216.270	71,83	99,73	14.913.866



**Tabel R2**

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 505 Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2014	IPM 2013	IKK 2014	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2013 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1700</b>	<b>Provinsi Bengkulu</b>	<b>1.844.788</b>	<b>74,41</b>	<b>96,21</b>	<b>15.095.290</b>
1701	Kab. Bengkulu Selatan	150.601	73,66	97,89	11.731.071
1702	Kab. Rejang Lebong	254.583	72,63	94,64	20.884.107
1703	Kab. Bengkulu Utara	281.699	73,67	96,76	8.537.084
1704	Kab. Kaur	114.398	71,54	103,32	6.532.599
1705	Kab. Seluma	183.420	68,40	102,14	6.060.974
1706	Kab. Mukomuko	172.882	71,79	112,53	11.293.747
1707	Kab. Lebong	107.296	71,58	98,58	14.287.561
1708	Kab. Kepahiang	131.016	69,76	103,55	17.989.646
1709	Kab. Bengkulu Tengah	106.017	69,93	102,43	12.069.041
1771	Kota Bengkulu	342.876	78,77	99,45	20.162.241

**Tabel R2**

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 505 Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2014	IPM 2013	IKK 2014	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2013 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1800</b>	<b>Provinsi Lampung</b>	<b>8.026.191</b>	<b>72,87</b>	<b>91,87</b>	<b>20.724.999</b>
1801	Kab. Lampung Barat	290.388	70,37	104,51	9.845.309
1802	Kab. Tanggamus	567.172	72,66	97,10	14.095.551
1803	Kab. Lampung Selatan	961.897	71,25	94,57	16.453.542
1804	Kab. Lampung Timur	998.720	72,14	93,84	15.083.013
1805	Kab. Lampung Tengah	1.227.185	72,30	93,56	20.598.247
1806	Kab. Lampung Utara	602.727	71,70	90,50	24.060.495
1807	Kab. Way Kanan	428.097	71,08	95,61	10.814.891
1808	Kab. Tulang Bawang	423.710	71,86	98,64	21.835.974
1809	Kab. Pesawaran	421.497	71,25	91,62	18.474.422
1810	Kab. Pringsewu	383.101	73,22	87,68	11.798.202
1811	Kab. Mesuji	194.282	68,79	114,66	21.904.664
1812	Kab. Tulang Bawang Barat	262.316	70,38	105,94	20.842.899
1813	Kab. Pesisir Barat	148.412	68,43	88,84	9.478.322
1871	Kota Bandar Lampung	960.695	77,17	98,71	30.929.643
1872	Kota Metro	155.992	77,53	94,65	11.153.955

**Tabel R2**

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 505 Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2014	IPM 2013	IKK 2014	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2013 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1900</b>	<b>Provinsi Bangka Belitung</b>	<b>1.343.881</b>	<b>74,29</b>	<b>102,09</b>	<b>29.605.475</b>
1901	Kab. Bangka	304.485	74,05	103,16	23.398.103
1902	Kab. Belitung	171.271	74,82	109,10	25.801.536
1903	Kab. Bangka Barat	192.395	71,46	109,26	48.374.652
1904	Kab. Bangka Tengah	177.218	72,64	108,47	27.537.114
1905	Kab. Bangka Selatan	189.492	68,58	110,43	25.703.341
1906	Kab. Belitung Timur	117.026	73,46	107,19	30.634.824
1971	Kota Pangkal Pinang	191.994	77,30	103,00	26.240.587

**Tabel R2**

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 505 Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2014	IPM 2013	IKK 2014	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2013 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>2100</b>	<b>Provinsi Kepulauan Riau</b>	<b>1.917.415</b>	<b>76,56</b>	<b>107,34</b>	<b>53.890.551</b>
2101	Kab. Karimun	223.117	74,95	94,81	27.658.100
2102	Kab. Bintan	151.123	76,10	103,00	39.048.628
2103	Kab. Natuna	73.470	72,25	129,27	73.539.066
2104	Kab. Lingga	88.274	72,41	112,54	16.433.774
2105	Kab. Anambas	39.892	70,48	142,00	87.344.755
2171	Kota Batam	1.141.816	78,73	110,46	59.890.522
2172	Kota Tanjung Pinang	199.723	76,19	97,13	33.357.969

**Tabel R2**

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 505 Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2014	IPM 2013	IKK 2014	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2013 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>3100</b>	<b>Provinsi DKI Jakarta</b>	<b>10.075.310</b>	<b>78,59</b>	<b>97,13</b>	<b>125.971.147</b>
<b>3200</b>	<b>Provinsi Jawa Barat</b>	<b>46.029.668</b>	<b>73,58</b>	<b>88,05</b>	<b>23.602.962</b>
3201	Kab. Bogor	5.331.149	73,92	103,85	21.082.024
3202	Kab. Sukabumi	2.422.113	71,96	90,37	9.944.627
3203	Kab. Cianjur	2.235.418	70,38	75,60	11.186.384
3204	Kab. Bandung	3.470.393	75,11	111,41	18.987.204
3205	Kab. Garut	2.526.186	72,43	86,10	13.441.141
3206	Kab. Tasikmalaya	1.728.587	73,26	92,15	9.724.982
3207	Kab. Ciamis	1.162.102	72,68	97,12	15.083.725
3208	Kab. Kuningan	1.049.084	72,47	88,43	11.747.171
3209	Kab. Cirebon	2.109.588	70,25	88,14	12.213.904
3210	Kab. Majalengka	1.176.313	71,90	84,24	11.400.231
3211	Kab. Sumedang	1.131.516	73,58	87,31	14.738.673
3212	Kab. Indramayu	1.682.022	69,52	92,36	37.951.151
3213	Kab. Subang	1.513.093	72,10	93,52	13.321.193
3214	Kab. Purwakarta	910.007	72,75	86,97	24.552.692
3215	Kab. Karawang	2.250.120	71,56	100,79	36.704.997
3216	Kab. Bekasi	3.122.698	74,80	105,79	44.817.877
3217	Kab. Bandung Barat	1.609.512	74,59	90,30	15.530.928
3218	Kab. Pangandaran	388.320	70,74	105,46	16.064.126
3271	Kota Bogor	1.030.720	76,82	93,99	19.283.951
3272	Kota Sukabumi	315.001	76,16	84,63	24.095.615
3273	Kota Bandung	2.470.802	77,32	91,99	52.962.981
3274	Kota Cirebon	304.584	76,67	89,78	48.713.258
3275	Kota Bekasi	2.642.508	77,67	101,67	20.183.520
3276	Kota Depok	2.033.508	80,14	100,02	11.854.685
3277	Kota Cimahi	579.015	76,86	87,72	30.285.002
3278	Kota Tasikmalaya	654.794	75,71	87,21	17.234.988
3279	Kota Banjar	180.515	72,84	88,32	13.354.628

**Tabel R2**

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 505 Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2014	IPM 2013	IKK 2014	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2013 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>3300</b>	<b>Provinsi Jawa Tengah</b>	<b>33.522.663</b>	<b>74,05</b>	<b>83,00</b>	<b>18.751.301</b>
3301	Kab. Cilacap	1.685.631	73,34	90,27	70.192.940
3302	Kab. Banyumas	1.620.772	73,96	82,20	8.867.563
3303	Kab. Purbalingga	889.172	73,49	78,16	9.270.528
3304	Kab. Banjarnegara	896.038	71,13	83,35	10.327.165
3305	Kab. Kebumen	1.180.894	72,25	84,78	7.509.052
3306	Kab. Purworejo	708.006	74,18	84,83	12.378.786
3307	Kab. Wonosobo	773.391	71,90	87,74	6.924.749
3308	Kab. Magelang	1.233.701	73,67	81,00	8.852.033
3309	Kab. Boyolali	957.913	71,88	87,05	11.734.251
3310	Kab. Klaten	1.154.028	74,91	85,01	13.244.364
3311	Kab. Sukoharjo	856.861	74,91	88,50	16.200.184
3312	Kab. Wonogiri	945.682	73,09	83,83	9.353.833
3313	Kab. Karanganyar	848.326	75,27	74,74	15.302.672
3314	Kab. Sragen	875.615	72,31	92,62	11.106.252
3315	Kab. Grobogan	1.343.985	72,37	91,76	6.685.972
3316	Kab. Blora	848.387	72,10	88,87	7.078.443
3317	Kab. Rembang	614.065	73,53	98,36	10.806.394
3318	Kab. Pati	1.225.603	74,58	94,10	10.577.036
3319	Kab. Kudus	821.109	74,09	88,62	50.799.136
3320	Kab. Jepara	1.170.785	74,13	98,27	10.853.429
3321	Kab. Demak	1.106.209	73,85	91,96	7.264.381
3322	Kab. Semarang	987.597	75,48	91,74	16.167.241
3323	Kab. Temanggung	738.881	75,00	88,18	9.448.861
3324	Kab. Kendal	934.627	72,03	85,92	16.102.268
3325	Kab. Batang	736.497	72,03	78,43	9.895.920
3326	Kab. Pekalongan	867.701	73,14	90,02	11.630.098
3327	Kab. Pemalang	1.284.171	71,26	89,99	8.537.601
3328	Kab. Tegal	1.420.106	72,22	80,92	7.766.271
3329	Kab. Brebes	1.773.373	69,85	91,17	11.444.794
3371	Kota Magelang	120.438	77,91	88,37	24.283.727
3372	Kota Surakarta	510.105	79,10	87,05	26.781.509
3373	Kota Salatiga	181.304	77,54	91,41	12.770.235
3374	Kota Semarang	1.672.994	78,54	91,85	37.152.634
3375	Kota Pekalongan	293.718	75,75	85,79	17.880.077
3376	Kota Tegal	244.978	75,02	79,11	13.935.051

**Tabel R2**

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 505 Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2014	IPM 2013	IKK 2014	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2013 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>3400</b>	<b>Provinsi DI Yogyakarta</b>	<b>3.637.116</b>	<b>77,37</b>	<b>84,81</b>	<b>17.717.081</b>
3401	Kab. Kulon Progo	407.709	75,95	81,23	11.513.262
3402	Kab. Bantul	959.445	76,01	84,67	13.441.259
3403	Kab. Gunung Kidul	707.794	71,64	88,42	12.714.252
3404	Kab. Sleman	1.154.501	79,97	80,04	16.733.772
3471	Kota Yogyakarta	407.667	80,51	84,79	39.689.016

**Tabel R2**

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 505 Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2014	IPM 2013	IKK 2014	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2013 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>3500</b>	<b>Provinsi Jawa Timur</b>	<b>38.610.202</b>	<b>73,54</b>	<b>87,62</b>	<b>29.620.235</b>
3501	Kab. Pacitan	549.481	73,36	74,69	8.808.624
3502	Kab. Ponorogo	865.809	72,61	96,65	12.377.030
3503	Kab. Trenggalek	686.781	74,44	96,06	12.480.970
3504	Kab. Tulungagung	1.015.974	74,79	95,11	23.109.487
3505	Kab. Blitar	1.140.793	74,92	82,34	15.235.339
3506	Kab. Kediri	1.538.929	73,29	94,47	14.566.425
3507	Kab. Malang	2.527.087	72,34	97,89	18.667.348
3508	Kab. Lumajang	1.026.378	69,50	85,47	19.268.780
3509	Kab. Jember	2.394.608	66,60	78,34	15.484.704
3510	Kab. Banyuwangi	1.588.082	71,02	74,45	22.411.970
3511	Kab. Bondowoso	756.989	65,39	84,99	13.271.677
3512	Kab. Situbondo	666.013	65,73	93,60	17.783.183
3513	Kab. Probolinggo	1.132.690	65,19	86,19	19.024.752
3514	Kab. Pasuruan	1.569.507	69,77	79,49	14.645.898
3515	Kab. Sidoarjo	2.083.924	78,15	91,60	41.094.359
3516	Kab. Mojokerto	1.070.486	75,26	91,30	25.459.749
3517	Kab. Jombang	1.234.501	74,47	99,16	16.685.013
3518	Kab. Nganjuk	1.037.723	72,49	94,29	15.303.690
3519	Kab. Madiun	673.988	71,46	95,73	14.814.760
3520	Kab. Magetan	626.614	74,34	98,91	16.938.047
3521	Kab. Ngawi	827.829	70,86	98,71	12.529.172
3522	Kab. Bojonegoro	1.232.386	68,32	102,05	26.704.588
3523	Kab. Tuban	1.147.097	70,04	85,25	24.192.079
3524	Kab. Lamongan	1.187.084	71,81	97,72	14.844.089
3525	Kab. Gresik	1.241.613	76,36	101,70	46.666.268
3526	Kab. Bangkalan	945.821	66,19	95,25	11.419.665
3527	Kab. Sampang	925.911	62,39	95,41	8.798.637
3528	Kab. Pamekasan	836.224	67,17	101,29	8.675.175
3529	Kab. Sumenep	1.067.202	66,89	96,83	15.173.920
3571	Kota Kediri	278.072	77,80	100,28	306.546.273
3572	Kota Blitar	136.903	78,70	95,77	21.374.947
3573	Kota Malang	845.973	78,78	93,12	52.092.726
3574	Kota Probolinggo	226.777	75,94	87,66	29.814.449
3575	Kota Pasuruan	193.329	74,75	84,87	19.368.826
3576	Kota Mojokerto	124.719	78,66	95,49	32.157.775
3577	Kota Madiun	174.373	78,17	98,48	42.085.083
3578	Kota Surabaya	2.833.924	78,97	95,14	108.326.463
3579	Kota Batu	198.608	76,09	92,10	24.638.178



**Tabel R2**

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 505 Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2014	IPM 2013	IKK 2014	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2013 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>3600</b>	<b>Provinsi Banten</b>	<b>11.704.877</b>	<b>71,90</b>	<b>89,19</b>	<b>21.353.270</b>
3601	Kab. Pandeglang	1.188.405	69,64	87,67	10.054.041
3602	Kab. Lebak	1.259.305	68,82	87,87	9.222.984
3603	Kab. Tangerang	3.264.776	72,82	93,64	16.131.547
3604	Kab. Serang	1.463.094	70,25	90,49	12.482.830
3671	Kota Tangerang	1.999.894	76,05	98,21	41.034.706
3672	Kota Cilegon	405.303	76,31	98,42	110.881.794
3673	Kota Serang	631.101	73,12	92,66	13.022.166
3674	Kota Tangerang Selatan	1.492.999	77,13	101,20	11.872.619

**Tabel R2**

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 505 Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2014	IPM 2013	IKK 2014	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2013 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>5100</b>	<b>Provinsi Bali</b>	<b>4.104.890</b>	<b>74,11</b>	<b>91,67</b>	<b>23.310.596</b>
5101	Kab. Jembrana	269.795	74,29	88,37	18.591.934
5102	Kab. Tabanan	433.279	76,19	101,06	14.984.199
5103	Kab. Badung	602.696	76,37	91,82	35.632.986
5104	Kab. Gianyar	490.526	75,02	81,63	21.731.981
5105	Kab. Klungkung	174.846	72,25	83,30	21.438.212
5106	Kab. Bangli	221.308	72,28	87,26	14.493.639
5107	Kab. Karangasem	406.551	68,47	87,75	14.428.464
5108	Kab. Buleleng	642.296	72,54	98,86	15.701.707
5171	Kota Denpasar	863.593	79,41	96,16	20.233.565

**Tabel R2**

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 505 Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2014	IPM 2013	IKK 2014	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2013 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>5200</b>	<b>Provinsi Nusa Tenggara Barat</b>	<b>4.773.795</b>	<b>67,73</b>	<b>81,00</b>	<b>11.946.496</b>
5201	Kab. Lombok Barat	644.586	63,82	80,51	8.751.620
5202	Kab. Lombok Tengah	903.432	63,51	80,87	8.035.138
5203	Kab. Lombok Timur	1.153.773	65,78	92,62	7.696.862
5204	Kab. Sumbawa	436.599	68,06	79,17	13.518.671
5205	Kab. Dompu	234.665	68,31	83,92	12.884.710
5206	Kab. Bima	463.419	67,34	85,88	9.740.611
5207	Kab. Sumbawa Barat	129.724	68,50	91,96	79.623.358
5208	Kab. Lombok Utara	210.133	61,90	71,64	9.215.052
5271	Kota Mataram	441.064	74,58	102,44	16.260.170
5272	Kota Bima	156.400	70,73	85,26	9.109.497

**Tabel R2**

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 505 Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2014	IPM 2013	IKK 2014	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2013 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>5300</b>	<b>Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>	<b>5 036 897</b>	<b>68,77</b>	<b>89,31</b>	<b>8 168 262</b>
5301	Kab. Sumba Barat	119 907	65,49	91,86	8 945 170
5302	Kab. Sumba Timur	243 009	63,80	87,59	8 750 696
5303	Kab. Kupang	338 415	67,74	88,23	9 091 432
5304	Kab. Timor Tengah Selatan	456 152	66,83	87,92	7 197 912
5305	Kab. Timor Tengah Utara	242 082	68,94	87,37	5 335 459
5306	Kab. Belu	203 284	66,24	86,37	7 094 417
5307	Kab. Alor	198 200	69,67	102,21	6 013 165
5308	Kab. Lembata	129 482	69,17	93,53	4 874 895
5309	Kab. Flores Timur	244 485	70,03	104,21	8 052 933
5310	Kab. Sikka	311 411	69,18	90,49	7 487 270
5311	Kab. Ende	268 314	68,67	84,62	9 325 434
5312	Kab. Ngada	152 519	70,89	88,68	8 889 051
5313	Kab. Manggarai	314 491	68,69	108,48	5 704 177
5314	Kab. Rote Ndao	142 106	67,70	93,95	5 892 562
5315	Kab. Manggarai Barat	245 817	67,38	97,24	5 679 041
5316	Kab. Sumba Barat Daya	67 393	63,05	88,99	4 634 373
5317	Kab. Sumba Tengah	312 510	62,29	96,40	6 635 019
5318	Kab. Nagekeo	137 919	67,93	93,40	7 221 025
5319	Kab. Manggarai Timur	268 418	67,62	83,32	4 927 008
5320	Kab. Sabu Raijua	83 501	57,74	119,80	6 445 880
5321	Kab. Malaka	177 398	57,01	90,22	6 070 214
5371	Kota Kupang	380 084	78,62	106,65	19 729 580

**Tabel R2**

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 505 Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2014	IPM 2013	IKK 2014	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2013 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>6100</b>	<b>Provinsi Kalimantan Barat</b>	<b>4.716.093</b>	<b>70,93</b>	<b>109,46</b>	<b>18.304.037</b>
6101	Kab. Sambas	519.887	66,81	98,43	16.581.127
6102	Kab. Bengkayang	232.873	69,38	106,71	14.616.227
6103	Kab. Landak	352.897	69,58	105,54	12.041.607
6104	Kab. Pontianak	249.521	70,13	99,89	12.357.820
6105	Kab. Sanggau	438.994	70,30	112,59	16.526.086
6106	Kab. Ketapang	464.227	69,74	166,78	19.108.777
6107	Kab. Sintang	390.796	69,81	129,52	14.688.047
6108	Kab. Kapuas Hulu	240.410	70,97	124,66	14.222.488
6109	Kab. Sekadau	191.797	68,99	105,68	8.943.320
6110	Kab. Melawi	192.301	69,86	165,78	7.884.246
6111	Kab. Kayong Utara	103.282	66,83	108,55	13.475.806
6112	Kab. Kubu Raya	538.815	69,32	132,17	24.079.668
6171	Kota Pontianak	598.097	74,64	118,69	30.802.166
6172	Kota Singkawang	202.196	70,66	113,18	17.735.947

**Tabel R2**

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 505 Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2014	IPM 2013	IKK 2014	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2013 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>6200</b>	<b>Provinsi Kalimantan Tengah</b>	<b>2.439.858</b>	<b>75,68</b>	<b>103,23</b>	<b>26.634.205</b>
6201	Kab. Kotawaringin Barat	269.629	75,11	102,63	25.936.504
6202	Kab. Kotawaringin Timur	416.151	75,40	112,10	29.589.828
6203	Kab. Kapuas	344.955	74,48	101,33	20.982.740
6204	Kab. Barito Selatan	130.609	74,54	112,69	24.799.085
6205	Kab. Barito Utara	126.494	76,13	105,23	26.576.330
6206	Kab. Sukamara	53.190	73,24	132,47	28.985.233
6207	Kab. Lamandau	71.798	73,29	106,48	22.900.484
6208	Kab. Seruyan	167.621	73,36	97,29	21.786.680
6209	Kab. Katingan	157.654	73,83	106,83	25.313.204
6210	Kab. Pulang Pisau	124.015	73,18	108,27	15.599.036
6211	Kab. Gunung Mas	107.467	74,26	115,32	17.504.264
6212	Kab. Barito Timur	110.446	73,86	116,32	19.218.624
6213	Kab. Murung Raya	107.724	73,98	97,49	28.391.320
6271	Kota Palangkaraya	252.105	79,52	107,65	22.399.840

**Tabel R2**

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 505 Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2014	IPM 2013	IKK 2014	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2013 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>6300</b>	<b>Provinsi Kalimantan Selatan</b>	<b>3.922.790</b>	<b>71,74</b>	<b>99,18</b>	<b>21.627.218</b>
6301	Kab. Tanah Laut	319.098	73,46	98,07	19.429.002
6302	Kab. Kota Baru	314.492	73,15	108,05	43.027.461
6303	Kab. Banjar	545.397	72,30	94,71	17.401.729
6304	Kab. Barito Kuala	294.109	69,31	96,19	16.950.515
6305	Kab. Tapin	179.166	72,18	102,87	16.301.673
6306	Kab. Hulu Sungai Selatan	224.474	72,00	100,50	13.058.440
6307	Kab. Hulu Sungai Tengah	257.107	72,21	101,95	11.503.312
6308	Kab. Hulu Sungai Utara	222.314	70,58	105,34	10.158.154
6309	Kab. Tabalong	235.777	71,56	119,00	34.044.187
6310	Kab. Tanah Bumbu	315.815	71,82	109,22	29.223.425
6311	Kab. Balangan	121.318	68,30	111,51	35.780.821
6371	Kota Banjarmasin	666.223	75,28	109,16	21.939.612
6372	Kota Banjar Baru	227.500	76,86	99,85	12.078.757

**Tabel R2**

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 505 Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2014	IPM 2013	IKK 2014	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2013 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>6400</b>	<b>Provinsi Kalimantan Timur</b>	<b>3.385.102</b>	<b>77,33</b>	<b>100,00</b>	<b>116.469.205</b>
6401	Kab. Paser	256.175	76,56	99,94	75.813.702
6402	Kab. Kutai Barat	144.892	74,61	113,75	64.726.248
6403	Kab. Kutai Kartanegara	700.439	74,80	135,09	190.241.229
6404	Kab. Kutai Timur	306.974	74,23	109,42	185.526.551
6405	Kab. Berau	203.223	75,83	103,48	64.934.277
6409	Kab. Penajam Paser Utara	152.119	74,82	103,43	29.130.551
6411	Kab. Mahakam Ulu	25.894	73,00	116,54	20.198.564
6471	Kota Balikpapan	605.096	79,87	118,61	88.619.834
6472	Kota Samarinda	830.676	78,79	100,00	51.586.402
6474	Kota Bontang	159.614	78,40	114,62	445.320.997



**Tabel R2**

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 505 Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2014	IPM 2013	IKK 2014	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2013 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>6500</b>	<b>Provinsi Kalimantan Utara</b>	<b>584.538</b>	<b>74,72</b>	<b>109,86</b>	<b>73.544.775</b>
6501	Kab. Malinau	74.469	74,33	125,99	45.746.965
6502	Kab. Bulungan	126.096	76,31	122,13	26.268.049
6503	Kab. Tana Tidung	20.372	73,20	188,29	26.939.448
6504	Kab. Nunukan	170.042	75,13	94,20	35.818.787
6571	Kota Tarakan	193.559	78,07	114,61	51.561.819

**Tabel R2**

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 505 Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2014	IPM 2013	IKK 2014	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2013 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>7100</b>	<b>Provinsi Sulawesi Utara</b>	<b>2.386.604</b>	<b>77,36</b>	<b>102,10</b>	<b>22.623.866</b>
7101	Kab. Bolaang Mongondow	229.604	74,22	108,98	12.259.767
7102	Kab. Minahasa	325.680	77,06	101,63	18.819.011
7103	Kab. Sangihe	129.103	76,79	131,74	16.127.469
7104	Kab. Kepulauan Talaud	87.922	76,47	133,39	12.069.236
7105	Kab. Minahasa Selatan	203.317	75,82	106,48	18.202.645
7106	Kab. Minahasa Utara	196.419	77,23	92,02	18.612.975
7107	Kab. Bolaang Mongondow Utara	75.290	73,94	105,29	14.522.604
7108	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	65.284	74,56	117,26	13.667.651
7109	Kab. Minahasa Tenggara	103.818	73,79	110,78	23.475.306
7110	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	61.177	72,27	103,66	11.404.373
7111	Kab. Bolaang Mongondow Timur	67.824	73,75	112,72	16.163.675
7171	Kota Manado	423.257	79,34	103,34	42.258.992
7172	Kota Bitung	202.204	76,66	91,27	27.828.669
7173	Kota Tomohon	98.686	77,82	91,44	18.755.836
7174	Kota Kotamobagu	117.019	77,05	108,03	12.505.265

**Tabel R2**

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 505 Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2014	IPM 2013	IKK 2014	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2013 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>7200</b>	<b>Provinsi Sulawesi Tengah</b>	<b>2.831.283</b>	<b>72,54</b>	<b>86,62</b>	<b>21.052.389</b>
7201	Kab. Banggai Kepulauan	114.003	69,12	96,31	12.199.350
7202	Kab. Banggai	348.477	72,75	93,92	23.580.370
7203	Kab. Morowali	111.002	72,27	96,49	28.119.689
7204	Kab. Poso	230.521	71,54	91,17	14.664.926
7205	Kab. Donggala	290.915	71,42	84,57	20.430.799
7206	Kab. Toli-Toli	223.318	70,24	89,36	18.548.322
7207	Kab. Buol	145.889	71,07	87,57	14.340.047
7208	Kab. Parigi Moutong	449.157	70,33	91,25	21.679.318
7209	Kab. Tojo Una Una	145.817	70,00	101,32	12.754.232
7210	Kab. Sigi	226.876	68,96	88,93	21.348.750
7211	Kab. Banggai Laut	68.124	68,61	94,78	12.487.273
7212	Kab. Morowali Utara	114.982	71,20	98,64	37.519.004
7271	Kota Palu	362.202	77,88	90,76	27.305.178

**Tabel R2**

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 505 Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2014	IPM 2013	IKK 2014	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2013 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>7300</b>	<b>Provinsi Sulawesi Selatan</b>	<b>8.432.163</b>	<b>73,28</b>	<b>88,55</b>	<b>22.150.805</b>
7301	Kab. Selayar	128.744	71,00	95,31	15.845.696
7302	Kab. Bulukumba	407.775	73,21	101,22	14.399.997
7303	Kab. Bantaeng	182.283	72,22	90,82	16.302.677
7304	Kab. Jeneponto	353.287	66,22	84,49	10.115.390
7305	Kab. Takalar	283.762	70,77	94,38	11.158.493
7306	Kab. G o w a	709.386	72,12	94,49	11.252.442
7307	Kab. Sinjai	236.497	71,45	88,15	18.241.810
7308	Kab. M a r o s	335.596	73,48	94,64	12.111.007
7309	Kab. Pangkajene Kepulauan	320.293	71,26	101,32	28.059.752
7310	Kab. Barru	170.316	72,16	99,70	14.784.904
7311	Kab. Bone	738.515	72,08	98,40	16.058.522
7312	Kab. Soppeng	225.709	73,31	94,57	18.868.099
7313	Kab. Wajo	391.980	72,55	95,20	22.891.633
7314	Kab. Sidenreng Rappang	286.610	74,05	86,93	19.916.037
7315	Kab. Pinrang	364.087	74,87	85,68	22.866.642
7316	Kab. Enrekang	198.194	75,67	97,79	16.887.478
7317	Kab. Luwu	347.096	75,33	102,63	16.826.189
7318	Kab. Tana Toraja	227.588	73,76	105,16	11.352.196
7322	Kab. Luwu Utara	299.989	75,36	92,58	16.317.588
7325	Kab. Luwu Timur	269.405	73,96	99,40	48.628.373
7326	Kab. Toraja Utara	224.003	71,69	104,55	11.742.177
7371	Kota Makassar	1.429.242	80,17	93,91	41.761.041
7372	Kota Pare-pare	136.903	79,02	92,94	20.502.729
7373	Kota Palopo	164.903	77,70	87,30	19.162.176

**Tabel R2**

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 505 Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2014	IPM 2013	IKK 2014	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2013 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>7400</b>	<b>Provinsi Sulawesi Tenggara</b>	<b>2.448.081</b>	<b>71,73</b>	<b>99,67</b>	<b>17.012.132</b>
7401	Kab. Buton	261.802	70,35	121,19	11.245.137
7402	Kab. Muna	284.977	68,97	103,88	12.756.838
7403	Kab. Konawe	229.801	71,67	100,57	13.787.527
7404	Kab. Kolaka	182.121	72,39	105,50	43.637.302
7405	Kab. Konawe Selatan	289.815	70,70	98,51	13.232.549
7406	Kab. Bombana	159.718	69,67	102,88	10.403.828
7407	Kab. Wakatobi	94.789	69,77	113,60	12.546.924
7408	Kab. Kolaka Utara	136.883	70,65	115,28	21.143.507
7409	Kab. Buton Utara	58.918	70,13	115,59	21.114.640
7410	Kab. Konawe Utara	57.077	70,66	108,14	25.902.107
7411	Kab. Kolaka Timur	173.623	68,59	109,33	11.119.883
7412	Kab. Konawe Kepulauan	31.183	66,04	128,31	12.906.347
7471	Kota Kendari	335.889	77,02	101,74	21.632.157
7472	Kota Bau-bau	151.485	75,10	108,34	19.949.716

**Tabel R2**

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 505 Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2014	IPM 2013	IKK 2014	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2013 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>7501</b>	<b>Provinsi Gorontalo</b>	<b>1.115.633</b>	<b>71,77</b>	<b>93,62</b>	<b>10.703.375</b>
7501	Kab. Boalemo	145.580	69,78	106,24	7.874.287
7502	Kab. Gorontalo	368.149	71,45	93,24	9.058.742
7503	Kab. Pohuwato	143.338	71,32	101,95	13.666.876
7504	Kab. Bone Bolango	151.094	73,24	93,25	8.173.192
7505	Kab. Gorontalo Utara	109.502	70,81	101,14	6.246.392
7571	Kota Gorontalo	197.970	74,71	94,73	13.530.446

**Tabel R2**

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 505 Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2014	IPM 2013	IKK 2014	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2013 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>7600</b>	<b>Provinsi Sulawesi Barat</b>	<b>1.258.090</b>	<b>71,41</b>	<b>94,79</b>	<b>13.112.416</b>
7601	Kab. Majene	161.132	73,16	101,82	11.634.240
7602	Kab. Polewali Mandar	417.472	69,17	82,93	12.320.495
7603	Kab. Mamasa	149.809	72,56	113,94	11.451.740
7604	Kab. Mamuju	258.984	71,38	100,88	15.122.647
7605	Kab. Mamuju Utara	152.505	71,14	97,26	17.844.765
7606	Kab. Mamuju Tengah	118.188	71,59	102,95	11.786.324

**Tabel R2**

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 505 Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2014	IPM 2013	IKK 2014	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2013 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>8100</b>	<b>Provinsi Maluku</b>	<b>1.657.409</b>	<b>72,70</b>	<b>104,43</b>	<b>8.133.899</b>
8101	Kab. Maluku Tenggara Barat	109.589	69,87	129,20	7.683.351
8102	Kab. Maluku Tenggara	98.474	73,60	121,80	6.836.393
8103	Kab. Maluku Tengah	368.290	71,81	108,96	5.201.391
8104	Kab. Pulau Buru	124.022	70,79	86,89	4.341.355
8105	Kab. Kepulauan Aru	89.995	71,29	119,08	6.770.333
8106	Kab. Seram Bagian Barat	168.829	70,75	102,20	5.480.733
8107	Kab. Seram Bagian Timur	106.698	69,11	111,39	4.141.270
8108	Kab. Maluku Barat Daya	72.010	67,67	156,21	7.947.583
8109	Kab. Buru Selatan	58.197	70,23	134,85	6.473.319
8171	Kota Ambon	395.423	79,58	87,53	15.512.621
8172	Kota Tual	65.882	77,91	144,79	7.116.521



**Tabel R2**

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 505 Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2014	IPM 2013	IKK 2014	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2013 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8200	<b>Provinsi Maluku Utara</b>	<b>1.138.667</b>	<b>70,63</b>	<b>117,89</b>	<b>6.929.268</b>
8201	Kab. Halmahera Barat	108.769	68,56	116,20	4.472.680
8202	Kab. Halmahera Tengah	48.414	70,55	136,09	13.189.428
8203	Kab. Kepulauan Sula	93.435	69,59	138,85	6.269.510
8204	Kab. Halmahera Selatan	215.791	69,45	92,32	6.049.811
8205	Kab. Halmahera Utara	176.573	70,36	121,75	6.843.474
8206	Kab. Halmahera Timur	82.914	69,42	119,28	8.601.530
8207	Kab. Pulau Morotai	59.102	67,03	121,45	5.220.404
8208	Kab. Pulau Taliabu	50.067	64,99	141,40	5.161.757
8271	Kota Ternate	207.789	78,44	126,94	7.422.898
8272	Kota Tidore Kepulauan	95.813	70,80	131,61	6.778.042

**Tabel R2**

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 505 Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2014	IPM 2013	IKK 2014	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2013 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>9100</b>	<b>Provinsi Papua Barat</b>	<b>849.809</b>	<b>70,62</b>	<b>125,79</b>	<b>61.462.220</b>
9101	Kab. Fak Fak	72.189	73,33	175,77	30.502.824
9102	Kab. Kaimana	52.473	71,87	151,52	26.063.150
9103	Kab. Teluk Wondama	29.098	67,54	118,88	19.864.509
9104	Kab. Teluk Bintuni	57.922	67,95	147,42	425.141.075
9105	Kab. Manokwari	154.296	68,61	116,60	25.794.964
9106	Kab. Sorong Selatan	42.028	67,28	126,09	15.842.620
9107	Kab. Sorong	78.698	69,74	115,63	96.721.717
9108	Kab. Raja Ampat	45.310	66,08	169,66	30.989.740
9109	Kab. Tambrauw	13.497	51,54	198,63	8.292.386
9110	Kab. Maybrat	36.601	67,60	178,33	7.707.933
9111	Kab. Manokwari Selatan	21.282	61,91	138,21	20.069.091
9112	Kab. Pegunungan Arfak	27.616	61,75	199,63	4.719.526
9171	Kota Sorong	218.799	78,92	113,99	24.930.128

**Tabel R2**

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 505 Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2014	IPM 2013	IKK 2014	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2013 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>9400</b>	<b>Provinsi PAPUA</b>	<b>3.091.047</b>	<b>66,25</b>	<b>191,86</b>	<b>30.712.934</b>
9401	Kab. Merauke	213.484	67,48	247,59	25.003.119
9402	Kab. Jayawijaya	204.112	57,55	254,25	7.826.174
9403	Kab. Jayapura	119.383	73,79	144,52	24.852.796
9404	Kab. Nabire	137.776	68,49	164,59	19.931.634
9408	Kab. Yapen Waropen	89.994	71,40	158,31	11.029.102
9409	Kab. Biak Numfor	135.831	71,03	153,17	15.991.015
9410	Kab. Paniai	162.489	60,81	214,95	3.939.776
9411	Kab. Puncak Jaya	113.280	68,68	413,38	6.634.112
9412	Kab. Mimika	199.311	70,39	193,34	238.825.952
9413	Kab. Boven Digoel	61.283	51,93	180,93	37.914.469
9414	Kab. Mappi	89.790	52,08	219,06	14.481.972
9415	Kab. Asmat	86.614	52,44	226,59	11.215.119
9416	Kab. Yahukimo	178.193	51,14	197,53	3.733.577
9417	Kab. Pegunungan Bintang	70.697	50,32	386,29	13.714.837
9418	Kab. Tolikara	127.526	53,06	385,95	5.152.517
9419	Kab. Sarmi	35.787	68,18	242,60	33.785.659
9420	Kab. Keerom	53.002	70,42	176,76	23.782.865
9426	Kab. Waropen	27.723	64,77	152,10	20.051.041
9427	Kab. Supiori	17.288	69,50	185,87	27.967.969
9428	Kab. Mamberamo Raya	20.514	60,64	187,03	27.755.464
9429	Kab. Nduga	92.530	49,29	321,30	3.587.094
9430	Kab. Lanny Jaya	170.589	51,07	357,07	3.961.931
9431	Kab. Mamberamo Tengah	45.398	50,11	399,62	7.421.889
9432	Kab. Yalimo	57.585	49,86	388,65	5.192.948
9433	Kab. Puncak	101.515	50,18	462,84	9.293.448
9434	Kab. Dogiyai	90.822	51,42	235,19	8.549.419
9435	Kab. Intan Jaya	44.812	49,61	431,26	7.574.078
9436	Kab. Deiyai	68.025	50,19	222,61	5.166.809
9471	Kota Jayapura	275.694	77,12	172,80	46.540.537

**Tabel R3**

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2013 Menurut Kabupaten/Kota

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup 2013 (tahun)	Angka Melek Huruf 2013 (persen)	Rata-Rata Lama Sekolah 2013 (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan 2013 (ribu Rp)	IPM 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>1100</b>	<b>Provinsi ACEH</b>	<b>69,40</b>	<b>97,04</b>	<b>9,02</b>	<b>621,40</b>	<b>73,05</b>
1101	Kab. Simeuleu	63,32	99,79	8,97	628,09	70,76
1102	Kab. Aceh Singkil	65,58	96,27	7,83	620,40	69,79
1103	Kab. Aceh Selatan	67,54	96,60	8,51	616,71	71,18
1104	Kab. Aceh Tenggara	69,69	98,08	9,38	609,76	72,81
1105	Kab. Aceh Timur	70,26	98,33	8,58	599,27	71,79
1106	Kab. Aceh Tengah	70,26	98,98	9,77	628,15	75,04
1107	Kab. Aceh Barat	70,55	95,12	8,81	610,22	72,24
1108	Kab. Aceh Besar	71,17	97,00	9,86	619,61	74,51
1109	Kab. Aceh Pidie	70,34	96,32	8,75	622,80	73,32
1110	Kab. Bireuen	72,63	98,55	9,31	603,75	74,03
1111	Kab. Aceh Utara	70,26	97,87	9,26	616,46	73,51
1112	Kab. Aceh Barat Daya	67,78	96,51	8,35	628,41	72,07
1113	Kab. Gayo Lues	67,62	88,19	8,76	610,93	69,09
1114	Kab. Aceh Tamiang	68,75	98,38	8,89	610,37	72,04
1115	Kab. Nagan Raya	70,26	92,12	8,40	615,23	71,50
1116	Kab. Aceh Jaya	68,53	95,67	8,77	607,36	71,00
1117	Kab. Bener Meriah	68,04	98,94	8,98	617,52	72,39
1118	Kab. Pidie Jaya	69,76	95,54	8,75	634,12	73,69
1171	Kota Banda Aceh	71,72	99,39	12,27	643,83	79,00
1172	Kota Sabang	71,89	99,14	10,63	636,22	77,23
1173	Kota Langsa	71,23	99,36	10,60	613,00	75,10
1174	Kota Lhokseumawe	72,03	99,69	10,67	641,23	77,84
1175	Kota Subulussalam	66,63	96,57	7,66	624,12	70,60

**Tabel R3**

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2013 Menurut Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup 2013 (tahun)	Angka Melek Huruf 2013 (persen)	Rata-Rata Lama Sekolah 2013 (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan 2013 (ribu Rp)	IPM 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>1200</b>	<b>Provinsi SUMATERA UTARA</b>	<b>69,90</b>	<b>97,84</b>	<b>9,13</b>	<b>646,83</b>	<b>75,55</b>
1201	Kab. Nias	70,12	90,80	6,47	618,20	69,93
1202	Kab. Mandailing Natal	63,79	99,36	7,99	647,85	71,72
1203	Kab. Tapanuli Selatan	67,61	99,88	8,98	653,60	75,13
1204	Kab. Tapanuli Tengah	68,57	96,40	8,21	630,49	72,55
1205	Kab. Tapanuli Utara	70,47	98,68	9,22	642,83	75,81
1206	Kab. Toba Samosir	70,86	98,57	9,89	655,68	77,49
1207	Kab. Labuhan Batu	70,25	99,08	8,79	646,10	75,71
1208	Kab. Asahan	69,32	98,27	8,33	640,40	74,23
1209	Kab. Simalungun	69,24	97,62	8,82	642,32	74,55
1210	Kab. Dairi	68,99	98,76	8,97	635,10	74,22
1211	Kab. Tanah Karo	72,44	99,08	9,60	636,24	76,76
1212	Kab. Deli Serdang	71,31	99,35	9,68	643,51	76,82
1213	Kab. Langkat	69,25	97,98	8,82	639,03	74,38
1214	Kab. Nias Selatan	70,86	85,38	6,47	611,02	68,58
1215	Kab. Humbang Hasundutan	68,09	98,23	9,38	624,50	73,09
1216	Kab. Pakpak Bharat	68,20	97,52	8,81	624,12	72,54
1217	Kab. Samosir	70,01	97,99	9,57	634,56	75,02
1218	Kab. Serdang Berdagai	69,27	97,94	8,69	640,64	74,41
1219	Kab. Batu Bara	68,92	97,18	8,03	636,82	73,26
1220	Kab. Padang Lawas Utara	66,76	99,59	8,97	645,38	73,96
1221	Kab. Padang Lawas	67,19	99,67	8,46	637,97	73,27
1222	Kab. Labuhan Batu Selatan	70,67	99,05	8,63	641,73	75,48
1223	Kab. Labuhan Batu Utara	70,47	99,35	8,71	644,49	75,70
1224	Kab. Nias Utara	69,39	91,02	6,46	615,94	69,39
1225	Kab. Nias Barat	69,40	84,48	6,19	618,17	67,91
1271	Kota Sibolga	70,39	99,34	10,08	638,23	76,19
1272	Kota Tanjung Balai	71,25	99,43	9,09	631,55	75,44
1273	Kota Pematang Siantar	72,54	99,67	10,97	644,74	78,62
1274	Kota Tebing Tinggi	71,68	99,54	10,14	650,73	77,96
1275	Kota Medan	72,37	99,57	10,90	646,92	78,62
1276	Kota Binjai	72,07	99,47	10,08	646,49	77,79
1277	Kota Padang Sidempuan	69,89	99,77	10,37	639,36	76,31
1278	Kota Gunung Sitoli	70,82	94,92	8,51	621,32	72,99

**Tabel R3**

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2013 Menurut Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup 2013 (tahun)	Angka Melek Huruf 2013 (persen)	Rata-Rata Lama Sekolah 2013 (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan 2013 (ribu Rp)	IPM 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>1300</b>	<b>Provinsi SUMATERA BARAT</b>	<b>70,09</b>	<b>97,38</b>	<b>8,63</b>	<b>644,59</b>	<b>75,01</b>
1301	Kab. Kepulauan Mentawai	68,72	93,88	6,76	613,89	69,72
1302	Kab. Pesisir Selatan	67,92	96,56	8,43	638,20	72,98
1303	Kab. Solok	67,33	97,30	8,06	637,14	72,46
1304	Kab. Sawahlunto Sijunjung	67,63	94,83	7,59	642,70	72,15
1305	Kab. Tanah Datar	71,75	97,41	8,43	638,22	75,29
1306	Kab. Padang Pariaman	69,44	94,86	7,47	640,82	72,93
1307	Kab. Agam	69,43	98,36	8,63	640,06	74,50
1308	Kab. Limapuluh Koto	69,20	99,08	8,02	620,00	72,54
1309	Kab. Pasaman	68,17	98,93	7,87	649,47	74,10
1310	Kab. Solok Selatan	64,94	97,72	8,17	623,15	70,23
1311	Kab. Dharmasraya	66,55	97,33	8,26	615,50	70,52
1312	Kab. Pasaman Barat	65,77	98,37	8,06	631,43	71,39
1371	Kota Padang	71,44	99,52	10,94	656,01	78,82
1372	Kota Solok	70,05	99,32	10,51	645,09	76,85
1373	Kota Sawahlunto	72,11	98,64	9,42	633,06	76,11
1374	Kota Padang Panjang	72,08	99,35	10,76	653,52	78,81
1375	Kota Bukit Tinggi	71,89	99,94	10,59	660,99	79,29
1376	Kota Payakumbuh	70,96	99,36	9,91	646,09	76,99
1377	Kota Pariaman	69,54	99,05	10,04	636,08	75,46

**Tabel R3**

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2013 Menurut Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup 2013 (tahun)	Angka Melek Huruf 2013 (persen)	Rata-Rata Lama Sekolah 2013 (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan 2013 (ribu Rp)	IPM 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>1400</b>	<b>Provinsi RIAU</b>	<b>71,73</b>	<b>98,48</b>	<b>8,78</b>	<b>657,26</b>	<b>77,25</b>
1401	Kab. Kuantan Singingi	68,61	98,12	8,17	654,50	74,77
1402	Kab. Indragiri Hulu	69,03	98,23	8,14	657,21	75,21
1403	Kab. Indragiri Hilir	71,95	99,20	7,66	653,45	76,41
1404	Kab. Pelalawan	69,17	98,53	8,37	640,80	74,27
1405	Kab. Siak	72,07	98,69	9,16	652,96	77,44
1406	Kab. Kampar	68,92	98,64	8,97	656,90	75,83
1407	Kab. Rokan Hulu	67,28	98,44	7,96	653,49	73,87
1408	Kab. Bengkalis	70,61	98,18	9,22	647,40	76,12
1409	Kab. Rokan Hilir	67,41	98,20	7,90	648,34	73,45
1410	Kab. Meranti	69,00	90,57	7,41	642,18	71,80
1471	Kota Pekanbaru	71,94	99,90	11,42	655,07	79,47
1473	Kota Dumai	72,29	99,43	9,76	663,70	78,99

**Tabel R3**

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2013 Menurut Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup 2013 (tahun)	Angka Melek Huruf 2013 (persen)	Rata-Rata Lama Sekolah 2013 (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan 2013 (ribu Rp)	IPM 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>1500</b>	<b>Provinsi JAMBI</b>	<b>69,61</b>	<b>96,85</b>	<b>8,32</b>	<b>644,05</b>	<b>74,35</b>
1501	Kab. Kerinci	71,19	97,27	8,38	645,68	75,49
1502	Kab. Merangin	69,15	97,54	7,69	637,61	73,28
1503	Kab. Sarolangun	69,85	95,35	7,60	650,05	74,08
1504	Kab. Batanghari	69,80	97,59	7,95	642,88	74,25
1505	Kab. Muaro Jambi	69,49	97,60	8,21	640,61	74,10
1506	Kab. Tanjung Jabung Timur	71,23	92,44	6,53	645,12	73,03
1507	Kab. Tanjung Jabung Barat	70,29	97,94	7,69	640,23	74,21
1508	Kab. Tebo	69,47	96,27	7,60	641,12	73,38
1509	Kab. Bungo	67,95	96,68	8,20	645,78	73,44
1571	Kota Jambi	70,15	99,08	10,57	653,23	77,52
1572	Kota Sungai Penuh	71,19	98,15	9,69	664,55	78,11



**Tabel R3**

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2013 Menurut Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup 2013 (tahun)	Angka Melek Huruf 2013 (persen)	Rata-Rata Lama Sekolah 2013 (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan 2013 (ribu Rp)	IPM 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>1600</b>	<b>Provinsi SUMATERA SELATAN</b>	<b>70,10</b>	<b>97,55</b>	<b>8,04</b>	<b>641,35</b>	<b>74,36</b>
1601	Kab. Ogan Komering Ulu	69,70	98,54	8,51	637,63	74,42
1602	Kab. Ogan Komering Ilir	68,52	96,65	6,83	633,91	71,82
1603	Kab. Muara Enim	68,11	98,90	7,65	625,64	72,06
1604	Kab. Lahat	68,99	97,92	8,37	623,27	72,68
1605	Kab. Musi Rawas	65,56	97,37	7,19	620,49	69,57
1606	Kab. Musi Banyuasin	70,44	98,86	7,70	629,37	73,67
1607	Kab. Banyuasin	67,84	96,55	7,09	627,15	71,08
1608	Kab. OKU Selatan	69,59	98,36	7,70	624,03	72,67
1609	Kab. OKU Timur	68,56	94,93	7,42	624,78	71,19
1610	Kab. Ogan Ilir	66,90	97,80	7,62	622,74	70,89
1611	Kab. Empat Lawang	65,78	98,71	7,69	616,16	70,02
1612	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	64,95	96,30	7,09	612,77	68,31
1613	Kab. Musi Rawas Utara	63,82	97,64	6,24	620,24	67,94
1671	Kota Palembang	71,67	98,95	10,30	648,11	77,74
1672	Kota Prabumulih	72,80	98,74	9,29	625,47	75,83
1673	Kota Pagar Alam	70,70	98,63	9,01	626,01	74,47
1674	Kota Lubuk Linggau	66,05	98,55	9,44	621,44	71,83

**Tabel R3**

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2013 Menurut Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup 2013 (tahun)	Angka Melek Huruf 2013 (persen)	Rata-Rata Lama Sekolah 2013 (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan 2013 (ribu Rp)	IPM 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>1700</b>	<b>Provinsi BENGKULU</b>	<b>70,44</b>	<b>96,55</b>	<b>8,55</b>	<b>637,50</b>	<b>74,41</b>
1701	Kab. Bengkulu Selatan	67,77	96,57	9,05	642,13	73,66
1702	Kab. Rejang Lebong	68,03	96,32	8,02	637,51	72,63
1703	Kab. Bengkulu Utara	69,97	95,41	8,10	638,82	73,67
1704	Kab. Kaur	67,93	97,37	8,17	619,56	71,54
1705	Kab. Seluma	66,26	95,46	7,63	601,69	68,40
1706	Kab. Mukomuko	68,17	94,40	7,74	633,86	71,79
1707	Kab. Lebong	67,49	96,70	7,95	627,40	71,58
1708	Kab. Kepahiang	64,93	96,56	8,10	621,20	69,76
1709	Kab. Bengkulu Tengah	70,28	92,63	7,47	602,25	69,93
1771	Kota Bengkulu	70,86	99,44	11,26	656,70	78,77

**Tabel R3**

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2013 Menurut Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup 2013 (tahun)	Angka Melek Huruf 2013 (persen)	Rata-Rata Lama Sekolah 2013 (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan 2013 (ribu Rp)	IPM 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>1800</b>	<b>Provinsi LAMPUNG</b>	<b>70,09</b>	<b>95,92</b>	<b>7,89</b>	<b>628,24</b>	<b>72,87</b>
1801	Kab. Lampung Barat	67,81	97,59	7,47	611,41	70,37
1802	Kab. Tanggamus	70,21	95,74	7,43	629,53	72,66
1803	Kab. Lampung Selatan	69,05	94,98	7,57	620,44	71,25
1804	Kab. Lampung Timur	70,74	94,52	7,76	619,34	72,14
1805	Kab. Lampung Tengah	69,72	94,88	7,60	629,24	72,30
1806	Kab. Lampung Utara	68,49	96,60	8,10	620,66	71,70
1807	Kab. Way Kanan	69,96	95,22	7,36	613,01	71,08
1808	Kab. Tulang Bawang	69,46	96,13	7,39	623,78	71,86
1809	Kab. Pesawaran	68,71	97,14	7,57	616,73	71,25
1810	Kab. Pringsewu	68,77	96,20	8,64	634,31	73,22
1811	Kab. Mesuji	68,50	94,48	6,39	605,29	68,79
1812	Kab. Tulang Bawang Barat	68,78	95,36	7,49	610,75	70,38
1813	Kab. Pesisir Barat	63,98	96,55	7,71	614,52	68,43
1871	Kota Bandar Lampung	71,68	98,78	10,30	641,13	77,17
1872	Kota Metro	72,98	98,45	10,15	638,80	77,53

**Tabel R3**

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2013 Menurut Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup 2013 (tahun)	Angka Melek Huruf 2013 (persen)	Rata-Rata Lama Sekolah 2013 (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan 2013 (ribu Rp)	IPM 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>1900</b>	<b>Provinsi BANGKA BELITUNG</b>	<b>69,46</b>	<b>96,44</b>	<b>7,73</b>	<b>651,22</b>	<b>74,29</b>
1901	Kab. Bangka	68,26	96,80	8,10	652,23	74,05
1902	Kab. Belitung	69,56	97,65	7,99	651,40	74,82
1903	Kab. Bangka Barat	68,32	94,08	7,09	635,73	71,46
1904	Kab. Bangka Tengah	68,39	96,81	7,18	641,67	72,64
1905	Kab. Bangka Selatan	68,33	94,60	6,44	603,00	68,58
1906	Kab. Belitung Timur	69,50	97,63	7,76	636,50	73,46
1971	Kota Pangkal Pinang	70,95	98,30	10,06	651,75	77,30

**Tabel R3**

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2013 Menurut Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup 2013 (tahun)	Angka Melek Huruf 2013 (persen)	Rata-Rata Lama Sekolah 2013 (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan 2013 (ribu Rp)	IPM 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>2100</b>	<b>Provinsi KEPULAUAN RIAU</b>	<b>69,97</b>	<b>98,07</b>	<b>9,91</b>	<b>651,37</b>	<b>76,56</b>
2101	Kab. Karimun	70,11	97,35	8,22	647,71	74,95
2102	Kab. Bintan	69,91	97,32	9,01	656,68	76,10
2103	Kab. Natuna	68,57	97,22	7,94	626,93	72,25
2104	Kab. Lingga	70,48	91,86	7,31	636,68	72,41
2105	Kab. Anambas	67,80	92,14	6,68	636,19	70,48
2171	Kota Batam	70,96	99,30	10,90	659,27	78,73
2172	Kota Tanjung Pinang	69,75	98,74	10,18	643,61	76,19

**Tabel R3**

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2013 Menurut Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup 2013 (tahun)	Angka Melek Huruf 2013 (persen)	Rata-Rata Lama Sekolah 2013 (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan 2013 (ribu Rp)	IPM 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>3100</b>	<b>Provinsi DKI JAKARTA</b>	<b>73,56</b>	<b>99,22</b>	<b>11,00</b>	<b>637,92</b>	<b>78,59</b>
<b>3200</b>	<b>Provinsi JAWA BARAT</b>	<b>68,84</b>	<b>96,87</b>	<b>8,11</b>	<b>641,63</b>	<b>73,58</b>
3201	Kab. Bogor	70,20	96,77	8,01	637,42	73,92
3202	Kab. Sukabumi	67,90	98,03	6,97	634,88	71,96
3203	Kab. Cianjur	66,80	98,02	6,88	623,21	70,38
3204	Kab. Bandung	69,37	98,80	8,49	648,36	75,11
3205	Kab. Garut	66,51	99,03	7,39	644,10	72,43
3206	Kab. Tasikmalaya	68,80	98,98	7,35	639,00	73,26
3207	Kab. Ciamis	67,73	98,71	7,68	636,81	72,68
3208	Kab. Kuningan	68,11	97,04	7,52	637,63	72,47
3209	Kab. Cirebon	66,04	93,26	6,90	640,62	70,25
3210	Kab. Majalengka	67,38	96,03	7,27	640,85	71,90
3211	Kab. Sumedang	68,13	98,23	8,06	643,30	73,58
3212	Kab. Indramayu	67,74	86,11	6,25	645,70	69,52
3213	Kab. Subang	69,89	92,54	6,98	638,23	72,10
3214	Kab. Purwakarta	67,74	97,19	7,71	641,64	72,75
3215	Kab. Karawang	67,80	93,45	7,42	639,28	71,56
3216	Kab. Bekasi	70,45	94,94	8,84	644,37	74,80
3217	Kab. Bandung Barat	69,23	99,17	8,14	645,01	74,59
3218	Kab. Pangandaran	66,59	94,22	7,51	634,33	70,74
3271	Kota Bogor	69,25	99,05	9,82	657,97	76,82
3272	Kota Sukabumi	70,36	99,74	9,37	643,75	76,16
3273	Kota Bandung	70,13	99,74	10,63	648,33	77,32
3274	Kota Cirebon	69,04	98,24	10,14	656,73	76,67
3275	Kota Bekasi	70,16	98,60	10,85	653,79	77,67
3276	Kota Depok	73,64	99,04	10,98	658,25	80,14
3277	Kota Cimahi	69,82	99,82	10,76	643,19	76,86
3278	Kota Tasikmalaya	70,80	99,79	8,89	639,11	75,71
3279	Kota Banjar	66,89	98,41	8,19	640,72	72,84

**Tabel R3**

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2013 Menurut Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup 2013 (tahun)	Angka Melek Huruf 2013 (persen)	Rata-Rata Lama Sekolah 2013 (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan 2013 (ribu Rp)	IPM 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>3300</b>	<b>Provinsi JAWA TENGAH</b>	<b>71,97</b>	<b>91,71</b>	<b>7,43</b>	<b>646,44</b>	<b>74,05</b>
3301	Kab. Cilacap	71,63	91,97	7,06	642,66	73,34
3302	Kab. Banyumas	70,23	94,77	7,80	645,54	73,96
3303	Kab. Purbalingga	71,08	93,78	7,23	641,63	73,49
3304	Kab. Banjarnegara	69,56	89,02	6,36	644,06	71,13
3305	Kab. Kebumen	69,73	91,78	6,93	644,00	72,25
3306	Kab. Purworejo	71,44	93,53	8,02	641,04	74,18
3307	Kab. Wonosobo	70,58	92,30	6,56	635,33	71,90
3308	Kab. Magelang	70,63	93,64	7,55	644,48	73,67
3309	Kab. Boyolali	70,71	88,12	7,46	637,53	71,88
3310	Kab. Klaten	72,16	90,01	8,33	652,61	74,91
3311	Kab. Sukoharjo	70,64	91,36	8,82	654,95	74,91
3312	Kab. Wonogiri	72,82	84,60	6,71	655,31	73,09
3313	Kab. Karanganyar	72,56	90,32	8,27	654,01	75,27
3314	Kab. Sragen	73,05	84,49	7,34	637,91	72,31
3315	Kab. Grobogan	70,45	91,78	6,86	640,93	72,37
3316	Kab. Blora	72,02	85,46	6,55	647,35	72,10
3317	Kab. Rembang	70,64	92,07	7,30	649,63	73,53
3318	Kab. Pati	73,05	89,56	7,04	655,69	74,58
3319	Kab. Kudus	69,83	94,16	8,49	645,15	74,09
3320	Kab. Jepara	71,23	94,26	7,70	642,98	74,13
3321	Kab. Demak	71,95	93,09	7,62	638,22	73,85
3322	Kab. Semarang	72,90	94,59	8,07	643,84	75,48
3323	Kab. Temanggung	72,87	95,99	7,10	643,28	75,00
3324	Kab. Kendal	69,42	90,23	7,19	645,34	72,03
3325	Kab. Batang	70,97	90,67	6,74	637,12	72,03
3326	Kab. Pekalongan	69,96	93,42	6,80	650,31	73,14
3327	Kab. Pemalang	68,52	91,09	6,56	645,35	71,26
3328	Kab. Tegal	69,58	91,03	6,62	649,84	72,22
3329	Kab. Brebes	68,36	87,68	6,07	642,84	69,85
3371	Kota Magelang	70,74	98,11	10,42	658,26	77,91
3372	Kota Surakarta	72,75	96,87	10,53	661,88	79,10
3373	Kota Salatiga	71,45	96,73	9,98	656,59	77,54
3374	Kota Semarang	72,44	97,72	10,37	655,84	78,54
3375	Kota Pekalongan	70,83	96,24	8,75	651,02	75,75
3376	Kota Tegal	69,42	94,93	8,33	659,71	75,02

**Tabel R2**

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2013 Menurut Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup 2013 (tahun)	Angka Melek Huruf 2013 (persen)	Rata-Rata Lama Sekolah 2013 (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan 2013 (ribu Rp)	IPM 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>3400</b>	<b>Provinsi DI YOGYAKARTA</b>	<b>73,62</b>	<b>92,86</b>	<b>9,33</b>	<b>656,19</b>	<b>77,37</b>
3401	Kab. Kulon Progo	75,03	93,13	8,37	635,96	75,95
3402	Kab. Bantul	71,62	92,81	9,02	656,07	76,01
3403	Kab. Gunung Kidul	71,36	85,22	7,79	634,88	71,64
3404	Kab. Sleman	75,79	95,11	10,55	656,00	79,97
3471	Kota Yogyakarta	73,71	98,43	11,56	658,76	80,51



**Tabel R3**

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2013 Menurut Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup 2013 (tahun)	Angka Melek Huruf 2013 (persen)	Rata-Rata Lama Sekolah 2013 (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan 2013 (ribu Rp)	IPM 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>3500</b>	<b>Provinsi JAWA TIMUR</b>	<b>70,37</b>	<b>90,49</b>	<b>7,53</b>	<b>654,02</b>	<b>73,54</b>
3501	Kab. Pacitan	72,18	91,67	7,01	640,29	73,36
3502	Kab. Ponorogo	70,85	89,37	7,49	642,06	72,61
3503	Kab. Trenggalek	72,33	93,07	7,33	646,05	74,44
3504	Kab. Tulungagung	72,02	94,92	7,97	641,29	74,79
3505	Kab. Blitar	71,80	92,12	7,41	658,05	74,92
3506	Kab. Kediri	70,65	92,97	7,75	639,53	73,29
3507	Kab. Malang	69,70	91,22	7,08	645,48	72,34
3508	Kab. Lumajang	67,95	86,63	6,52	639,89	69,50
3509	Kab. Jember	63,64	83,79	6,80	638,75	66,60
3510	Kab. Banyuwangi	68,58	88,44	7,25	642,85	71,02
3511	Kab. Bondowoso	63,95	81,22	5,94	636,55	65,39
3512	Kab. Situbondo	63,95	78,62	6,28	645,21	65,73
3513	Kab. Probolinggo	62,10	80,95	6,31	644,49	65,19
3514	Kab. Pasuruan	64,81	91,71	6,89	647,78	69,77
3515	Kab. Sidoarjo	71,43	97,91	10,23	658,79	78,15
3516	Kab. Mojokerto	71,13	94,47	8,22	652,72	75,26
3517	Kab. Jombang	70,64	94,45	8,06	647,56	74,47
3518	Kab. Nganjuk	69,82	91,16	7,62	641,55	72,49
3519	Kab. Madiun	69,68	90,04	7,47	633,89	71,46
3520	Kab. Magetan	71,96	91,42	7,86	647,09	74,34
3521	Kab. Ngawi	70,97	85,99	7,06	632,35	70,86
3522	Kab. Bojonegoro	67,81	85,13	6,72	627,94	68,32
3523	Kab. Tuban	68,71	86,00	6,82	640,27	70,04
3524	Kab. Lamongan	68,98	89,09	7,79	643,16	71,81
3525	Kab. Gresik	71,57	96,38	9,00	650,79	76,36
3526	Kab. Bangkalan	64,02	82,93	5,75	643,34	66,19
3527	Kab. Sampang	64,52	69,47	4,39	642,16	62,39
3528	Kab. Pamekasan	65,19	84,48	6,42	636,61	67,17
3529	Kab. Sumenep	65,49	78,75	5,73	654,08	66,89
3571	Kota Kediri	71,36	97,86	10,29	654,26	77,80
3572	Kota Blitar	73,00	97,48	9,87	659,38	78,70
3573	Kota Malang	71,14	98,38	10,89	661,39	78,78
3574	Kota Probolinggo	71,16	92,66	8,79	661,00	75,94
3575	Kota Pasuruan	66,75	97,12	9,07	661,84	74,75
3576	Kota Mojokerto	72,48	97,58	10,12	659,92	78,66
3577	Kota Madiun	71,89	98,15	10,54	652,16	78,17
3578	Kota Surabaya	72,13	98,40	10,12	664,11	78,97
3579	Kota Batu	70,32	98,37	8,76	652,91	76,09

**Tabel R3**

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2013 Menurut Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup 2013 (tahun)	Angka Melek Huruf 2013 (persen)	Rata-Rata Lama Sekolah 2013 (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan 2013 (ribu Rp)	IPM 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>3600</b>	<b>Provinsi BANTEN</b>	<b>65,47</b>	<b>96,87</b>	<b>8,61</b>	<b>639,28</b>	<b>71,90</b>
3601	Kab. Pandeglang	64,35	96,78	7,04	633,32	69,64
3602	Kab. Lebak	63,62	96,05	6,29	637,32	68,82
3603	Kab. Tangerang	66,33	96,37	8,96	643,04	72,82
3604	Kab. Serang	64,39	96,04	7,48	638,78	70,25
3671	Kota Tangerang	68,56	98,48	10,07	652,08	76,05
3672	Kota Cilegon	68,97	98,87	9,72	654,88	76,31
3673	Kota Serang	66,65	97,35	8,59	645,47	73,12
3674	Kota Tangerang Selatan	69,17	98,62	10,99	652,52	77,13

**Tabel R3**

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2013 Menurut Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup 2013 (tahun)	Angka Melek Huruf 2013 (persen)	Rata-Rata Lama Sekolah 2013 (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan 2013 (ribu Rp)	IPM 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>5100</b>	<b>Provinsi BALI</b>	<b>71,20</b>	<b>91,03</b>	<b>8,58</b>	<b>643,78</b>	<b>74,11</b>
5101	Kab. Jembrana	72,31	92,65	7,87	640,30	74,29
5102	Kab. Tabanan	74,91	91,92	8,40	643,24	76,19
5103	Kab. Badung	72,24	93,93	9,51	648,25	76,37
5104	Kab. Gianyar	72,56	89,38	8,90	647,37	75,02
5105	Kab. Klungkung	69,52	84,47	7,43	661,73	72,25
5106	Kab. Bangli	72,18	85,91	6,70	645,69	72,28
5107	Kab. Karangasem	68,32	76,94	5,90	657,79	68,47
5108	Kab. Buleleng	70,00	90,53	7,55	643,38	72,54
5171	Kota Denpasar	73,46	97,95	11,05	652,54	79,41

**Tabel R3**

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2013 Menurut Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup 2013 (tahun)	Angka Melek Huruf 2013 (persen)	Rata-Rata Lama Sekolah 2013 (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan 2013 (ribu Rp)	IPM 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>5200</b>	<b>Provinsi NUSA TENGGARA BARAT</b>	<b>63,21</b>	<b>85,19</b>	<b>7,20</b>	<b>648,66</b>	<b>67,73</b>
5201	Kab. Lombok Barat	62,13	79,22	6,11	633,44	63,82
5202	Kab. Lombok Tengah	62,44	75,89	6,19	636,00	63,51
5203	Kab. Lombok Timur	62,14	86,16	6,92	630,94	65,78
5204	Kab. Sumbawa	61,43	92,07	7,65	641,66	68,06
5205	Kab. Dompu	61,68	89,07	7,99	648,44	68,31
5206	Kab. Bima	63,95	88,42	7,60	625,11	67,34
5207	Kab. Sumbawa Barat	62,13	93,14	8,03	635,60	68,50
5208	Kab. Lombok Utara	61,72	77,03	5,73	621,41	61,90
5271	Kota Mataram	68,12	93,68	9,69	653,79	74,58
5272	Kota Bima	63,62	95,91	10,22	624,72	70,73

**Tabel R3**

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2013 Menurut Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup 2013 (tahun)	Angka Melek Huruf 2013 (persen)	Rata-Rata Lama Sekolah 2013 (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan 2013 (ribu Rp)	IPM 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>5300</b>	<b>Provinsi NUSA TENGGARA TIMUR</b>	<b>68,05</b>	<b>90,34</b>	<b>7,16</b>	<b>612,88</b>	<b>68,77</b>
5301	Kab. Sumba Barat	65,75	82,16	6,64	615,31	65,49
5302	Kab. Sumba Timur	62,33	87,31	6,49	604,68	63,80
5303	Kab. Kupang	65,94	90,99	7,49	609,65	67,74
5304	Kab. Timor Tengah Selatan	67,26	84,44	6,71	614,65	66,83
5305	Kab. Timor Tengah Utara	69,19	88,82	6,94	613,28	68,94
5306	Kab. Belu	66,75	85,54	6,76	606,93	66,24
5307	Kab. Alor	67,67	96,02	7,56	607,09	69,67
5308	Kab. Lembata	66,88	93,98	7,38	613,77	69,17
5309	Kab. Flores Timur	68,79	91,55	7,10	620,89	70,03
5310	Kab. Sikka	69,66	92,10	6,80	604,90	69,18
5311	Kab. Ende	65,31	95,01	7,76	612,03	68,67
5312	Kab. Ngada	67,46	96,94	7,66	620,81	70,89
5313	Kab. Manggarai	67,74	93,16	6,87	608,68	68,69
5314	Kab. Rote Ndao	68,74	90,14	6,71	598,92	67,70
5315	Kab. Manggarai Barat	66,84	93,04	6,87	598,49	67,38
5316	Kab. Sumba Barat Daya	64,20	75,60	6,23	617,75	63,05
5317	Kab. Sumba Tengah	63,14	77,60	5,39	617,82	62,29
5318	Kab. Nagekeo	63,89	96,39	7,39	612,24	67,93
5319	Kab. Manggarai Timur	68,19	93,82	6,57	592,53	67,62
5320	Kab. Sabu Raijua	68,01	78,33	5,72	518,35	57,74
5321	Kab. Malaka	66,87	82,43	6,07	501,83	57,01
5371	Kota Kupang	73,46	98,62	11,29	638,03	78,62

**Tabel R3**

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2013 Menurut Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup 2013 (tahun)	Angka Melek Huruf 2013 (persen)	Rata-Rata Lama Sekolah 2013 (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan 2013 (ribu Rp)	IPM 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>6100</b>	<b>Provinsi KALIMANTAN BARAT</b>	<b>67,40</b>	<b>91,70</b>	<b>7,17</b>	<b>641,41</b>	<b>70,93</b>
6101	Kab. Sambas	62,31	91,59	6,22	634,12	66,81
6102	Kab. Bengkayang	69,61	91,42	6,55	612,23	69,38
6103	Kab. Landak	66,35	94,23	7,55	620,61	69,58
6104	Kab. Pontianak	67,66	91,59	6,66	634,52	70,13
6105	Kab. Sanggau	69,39	91,60	6,74	623,43	70,30
6106	Kab. Ketapang	68,37	91,63	6,65	624,23	69,74
6107	Kab. Sintang	69,04	91,60	6,74	619,57	69,81
6108	Kab. Kapuas Hulu	67,17	92,67	7,18	640,73	70,97
6109	Kab. Sekadau	67,71	92,09	6,84	616,12	68,99
6110	Kab. Melawi	68,29	92,45	7,29	617,95	69,86
6111	Kab. Kayong Utara	66,30	89,07	6,02	614,92	66,83
6112	Kab. Kubu Raya	66,83	89,10	7,12	632,59	69,32
6171	Kota Pontianak	67,88	96,07	9,86	647,82	74,64
6172	Kota Singkawang	67,86	92,17	7,70	628,29	70,66

**Tabel R3**

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2013 Menurut Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup 2013 (tahun)	Angka Melek Huruf 2013 (persen)	Rata-Rata Lama Sekolah 2013 (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan 2013 (ribu Rp)	IPM 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>6200</b>	<b>Provinsi KALIMANTAN TENGAH</b>	<b>71,47</b>	<b>97,99</b>	<b>8,17</b>	<b>646,01</b>	<b>75,68</b>
6201	Kab. Kotawaringin Barat	71,79	96,12	7,99	643,40	75,11
6202	Kab. Kotawaringin Timur	69,92	98,78	8,08	652,24	75,40
6203	Kab. Kapuas	71,11	97,29	7,35	643,00	74,48
6204	Kab. Barito Selatan	68,47	99,28	8,48	646,15	74,54
6205	Kab. Barito Utara	72,39	98,72	8,41	640,84	76,13
6206	Kab. Sukamara	68,04	96,61	7,62	648,38	73,24
6207	Kab. Lamandau	67,45	98,70	7,84	645,12	73,29
6208	Kab. Seruyan	68,12	99,33	7,80	639,78	73,36
6209	Kab. Katingan	67,72	99,50	8,45	641,96	73,83
6210	Kab. Pulang Pisau	67,79	96,56	7,93	646,52	73,18
6211	Kab. Gunung Mas	68,28	99,70	8,81	639,58	74,26
6212	Kab. Barito Timur	68,00	98,03	8,84	640,91	73,86
6213	Kab. Murung Raya	68,28	99,96	7,53	647,49	73,98
6271	Kota Palangkaraya	73,69	99,55	10,90	649,15	79,52

**Tabel R3**

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2013 Menurut Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup 2013 (tahun)	Angka Melek Huruf 2013 (persen)	Rata-Rata Lama Sekolah 2013 (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan 2013 (ribu Rp)	IPM 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>6300</b>	<b>Provinsi KALIMANTAN SELATAN</b>	<b>64,82</b>	<b>97,18</b>	<b>8,01</b>	<b>646,77</b>	<b>71,74</b>
6301	Kab. Tanah Laut	69,29	96,77	7,65	641,54	73,46
6302	Kab. Kota Baru	66,45	96,73	7,10	663,33	73,15
6303	Kab. Banjar	66,18	96,73	7,33	652,07	72,30
6304	Kab. Barito Kuala	63,04	94,19	7,27	643,78	69,31
6305	Kab. Tapin	68,03	96,87	7,36	636,41	72,18
6306	Kab. Hulu Sungai Selatan	64,87	96,83	7,40	656,68	72,00
6307	Kab. Hulu Sungai Tengah	66,43	97,50	7,61	644,16	72,21
6308	Kab. Hulu Sungai Utara	64,17	96,73	7,57	641,95	70,58
6309	Kab. Tabalong	63,72	97,82	8,25	648,21	71,56
6310	Kab. Tanah Bumbu	65,86	96,59	7,73	644,72	71,82
6311	Kab. Balangan	62,50	96,73	7,05	629,42	68,30
6371	Kota Banjarmasin	66,66	98,91	10,06	654,79	75,28
6372	Kota Banjar Baru	68,32	99,54	10,68	655,46	76,86



**Tabel R3**

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2013 Menurut Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup 2013 (tahun)	Angka Melek Huruf 2013 (persen)	Rata-Rata Lama Sekolah 2013 (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan 2013 (ribu Rp)	IPM 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>6400</b>	<b>Provinsi KALIMANTAN TIMUR</b>	<b>71,78</b>	<b>97,95</b>	<b>9,39</b>	<b>653,70</b>	<b>77,33</b>
6401	Kab. Pasir	73,99	97,13	8,35	640,09	76,56
6402	Kab. Kutai Barat	70,63	97,12	8,43	638,13	74,61
6403	Kab. Kutai Kartanegara	68,39	98,34	8,89	648,89	74,80
6404	Kab. Kutai Timur	69,17	99,32	8,63	635,61	74,23
6405	Kab. Berau	70,73	97,85	8,82	647,45	75,83
6409	Kab. Penajam Paser Utara	71,94	95,81	7,82	641,13	74,82
6411	Kab. Mahakam Ulu	70,14	97,12	7,33	631,45	73,00
6471	Kota Balikpapan	72,81	98,99	10,49	665,61	79,87
6472	Kota Samarinda	71,92	98,62	10,38	660,08	78,79
6474	Kota Bontang	73,12	99,25	10,45	643,88	78,40

**Tabel R3**

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2013 Menurut Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup 2013 (tahun)	Angka Melek Huruf 2013 (persen)	Rata-Rata Lama Sekolah 2013 (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan 2013 (ribu Rp)	IPM 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>6500</b>	<b>Provinsi KALIMANTAN UTARA</b>	<b>69,70</b>	<b>96,40</b>	<b>8,52</b>	<b>647,51</b>	<b>74,72</b>
6501	Kab. Malinau	68,62	94,11	8,54	656,74	74,33
6502	Kab. Bulungan	73,32	95,97	8,24	646,03	76,31
6503	Kab. Tana Tidung	72,76	91,39	7,65	628,59	73,20
6504	Kab. Nunukan	72,01	94,82	7,57	649,91	75,13
6571	Kota Tarakan	72,19	98,98	9,50	656,27	78,07

**Tabel R3**

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2013 Menurut Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup 2013 (tahun)	Angka Melek Huruf 2013 (persen)	Rata-Rata Lama Sekolah 2013 (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan 2013 (ribu Rp)	IPM 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>7100</b>	<b>Provinsi SULAWESI UTARA</b>	<b>72,62</b>	<b>99,56</b>	<b>9,09</b>	<b>646,19</b>	<b>77,36</b>
7101	Kab. Bolaang Mongondow	72,06	98,34	7,48	628,58	74,22
7102	Kab. Minahasa	72,80	99,90	9,55	635,56	77,06
7103	Kab. Sangihe	73,55	98,78	7,76	647,10	76,79
7104	Kab. Kepulauan Talaud	72,57	99,60	8,82	637,53	76,47
7105	Kab. Minahasa Selatan	72,76	99,87	8,80	627,05	75,82
7106	Kab. Minahasa Utara	73,09	99,79	9,42	637,33	77,23
7107	Kab. Bolaang Mongondow Utara	70,42	98,68	7,44	636,06	73,94
7108	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	69,00	99,82	8,65	639,39	74,56
7109	Kab. Minahasa Tenggara	70,34	99,56	8,43	622,70	73,79
7110	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	71,47	99,09	7,32	606,76	72,27
7111	Kab. Bolaang Mongondow Timur	71,51	99,59	7,50	622,45	73,75
7171	Kota Manado	72,96	99,93	10,92	650,81	79,34
7172	Kota Bitung	70,90	99,44	9,47	646,31	76,66
7173	Kota Tomohon	73,13	99,88	10,30	635,90	77,82
7174	Kota Kotamobagu	72,34	99,68	9,54	639,49	77,05

**Tabel R3**

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2013 Menurut Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup 2013 (tahun)	Angka Melek Huruf 2013 (persen)	Rata-Rata Lama Sekolah 2013 (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan 2013 (ribu Rp)	IPM 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>7200</b>	<b>Provinsi SULAWESI TENGAH</b>	<b>67,21</b>	<b>96,22</b>	<b>8,22</b>	<b>640,69</b>	<b>72,54</b>
7201	Kab. Banggai Kepulauan	64,85	95,11	7,96	618,98	69,12
7202	Kab. Banggai	69,03	96,05	8,05	632,34	72,75
7203	Kab. Morowali	65,95	97,54	8,28	641,88	72,27
7204	Kab. Poso	65,52	97,98	8,82	629,02	71,54
7205	Kab. Donggala	66,29	94,75	7,67	642,32	71,42
7206	Kab. Toli-Toli	64,82	95,76	8,09	630,53	70,24
7207	Kab. Buol	65,95	98,75	8,38	621,86	71,07
7208	Kab. Parigi Moutong	66,02	94,85	7,19	634,41	70,33
7209	Kab. Tojo Una Una	64,22	97,58	7,94	628,01	70,00
7210	Kab. Sigi	66,00	96,59	8,09	603,03	68,96
7211	Kab. Banggai Laut	63,33	97,57	8,08	615,02	68,61
7212	Kab. Morowali Utara	69,46	95,20	8,29	609,31	71,20
7271	Kota Palu	70,72	99,37	11,07	648,20	77,88

**Tabel R3**

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2013 Menurut Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup 2013 (tahun)	Angka Melek Huruf 2013 (persen)	Rata-Rata Lama Sekolah 2013 (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan 2013 (ribu Rp)	IPM 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>7300</b>	<b>Provinsi SULAWESI SELATAN</b>	<b>70,60</b>	<b>89,69</b>	<b>8,01</b>	<b>646,71</b>	<b>73,28</b>
7301	Kab. Selayar	68,08	91,76	7,26	636,53	71,00
7302	Kab. Bulukumba	72,62	88,23	7,17	643,43	73,21
7303	Kab. Bantaeng	74,59	81,40	6,48	642,77	72,22
7304	Kab. Jeneponto	65,40	78,92	6,27	640,30	66,22
7305	Kab. Takalar	70,30	84,69	7,02	640,22	70,77
7306	Kab. G o w a	72,04	83,11	7,37	646,35	72,12
7307	Kab. Sinjai	72,83	88,44	7,10	619,20	71,45
7308	Kab. M a r o s	73,55	85,52	7,27	647,13	73,48
7309	Kab. Pangkajene Kepulauan	69,16	90,21	7,22	636,88	71,26
7310	Kab. Barru	69,52	89,55	7,89	641,47	72,16
7311	Kab. Bone	70,56	89,04	6,73	645,58	72,08
7312	Kab. Soppeng	71,93	88,74	7,37	646,38	73,31
7313	Kab. Wajo	72,11	85,62	6,98	647,99	72,55
7314	Kab. Sidenreng Rappang	73,38	90,25	7,77	637,24	74,05
7315	Kab. Pinrang	72,81	91,99	7,89	645,86	74,87
7316	Kab. Enrekang	75,66	91,35	8,39	632,76	75,67
7317	Kab. Luwu	74,68	91,82	7,94	638,45	75,33
7318	Kab. Tana Toraja	74,28	90,14	8,26	622,62	73,76
7322	Kab. Luwu Utara	72,03	93,11	7,51	658,27	75,36
7325	Kab. Luwu Timur	71,29	93,87	8,21	636,53	73,96
7326	Kab. Toraja Utara	73,66	87,38	7,88	611,88	71,69
7371	Kota Makassar	74,38	97,83	10,90	657,68	80,17
7372	Kota Pare-pare	75,04	97,36	9,91	648,80	79,02
7373	Kota Palopo	72,93	97,45	10,19	643,94	77,70

**Tabel R3**

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2013 Menurut Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup 2013 (tahun)	Angka Melek Huruf 2013 (persen)	Rata-Rata Lama Sekolah 2013 (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan 2013 (ribu Rp)	IPM 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>7400</b>	<b>Provinsi SULAWESI TENGGERA</b>	<b>68,56</b>	<b>92,59</b>	<b>8,44</b>	<b>628,77</b>	<b>71,73</b>
7401	Kab. Buton	69,38	86,65	7,13	634,61	70,35
7402	Kab. Muna	66,66	88,73	7,55	626,42	68,97
7403	Kab. Konawe	68,32	94,73	8,90	619,08	71,67
7404	Kab. Kolaka	67,74	93,46	8,28	642,27	72,39
7405	Kab. Konawe Selatan	68,24	94,15	7,69	620,40	70,70
7406	Kab. Bombana	68,52	91,47	7,57	613,89	69,67
7407	Kab. Wakatobi	68,60	93,03	8,07	605,36	69,77
7408	Kab. Kolaka Utara	66,13	94,54	7,82	632,73	70,65
7409	Kab. Buton Utara	69,32	89,36	8,14	614,64	70,13
7410	Kab. Konawe Utara	67,93	94,03	8,43	615,24	70,66
7411	Kab. Kolaka Timur	63,53	92,64	8,98	618,93	68,59
7412	Kab. Konawe Kepulauan	64,81	90,99	6,86	601,74	66,04
7471	Kota Kendari	69,64	98,69	11,41	643,47	77,02
7472	Kota Bau-bau	71,39	95,71	9,97	628,36	75,10

**Tabel R3**

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2013 Menurut Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup 2013 (tahun)	Angka Melek Huruf 2013 (persen)	Rata-Rata Lama Sekolah 2013 (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan 2013 (ribu Rp)	IPM 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>7500</b>	<b>Provinsi GORONTALO</b>	<b>67,54</b>	<b>96,87</b>	<b>7,52</b>	<b>633,14</b>	<b>71,77</b>
7501	Kab. Boalemo	68,64	95,82	6,60	611,25	69,78
7502	Kab. Gorontalo	69,57	95,55	6,90	624,02	71,45
7503	Kab. Pohuwato	68,17	97,09	7,04	626,72	71,32
7504	Kab. Bone Bolango	69,28	98,87	7,86	630,70	73,24
7505	Kab. Gorontalo Utara	67,37	96,67	6,93	628,08	70,81
7571	Kota Gorontalo	67,54	99,67	10,28	636,58	74,71

**Tabel R3**

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2013 Menurut Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup 2013 (tahun)	Angka Melek Huruf 2013 (persen)	Rata-Rata Lama Sekolah 2013 (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan 2013 (ribu Rp)	IPM 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>7600</b>	<b>Provinsi SULAWESI BARAT</b>	<b>68,34</b>	<b>90,54</b>	<b>7,35</b>	<b>642,66</b>	<b>71,41</b>
7601	Kab. Majene	66,11	96,53	8,51	652,90	73,16
7602	Kab. Polewali Mandar	65,62	87,64	7,08	644,06	69,17
7603	Kab. Mamasa	71,48	89,43	7,19	639,65	72,56
7604	Kab. Mamuju	69,08	91,20	7,58	632,74	71,38
7605	Kab. Mamuju Utara	67,66	95,65	7,37	628,95	71,14
7606	Kab. Mamuju Tengah	70,95	91,14	6,66	631,00	71,59



**Tabel R3**

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2013 Menurut Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup 2013 (tahun)	Angka Melek Huruf 2013 (persen)	Rata-Rata Lama Sekolah 2013 (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan 2013 (ribu Rp)	IPM 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>8100</b>	<b>Provinsi MALUKU</b>	<b>67,88</b>	<b>98,25</b>	<b>9,20</b>	<b>622,59</b>	<b>72,70</b>
8101	Kab. Maluku Tenggara Barat	64,62	99,94	8,99	606,50	69,87
8102	Kab. Maluku Tenggara	68,47	99,60	8,93	628,71	73,60
8103	Kab. Maluku Tengah	66,09	99,15	8,90	624,30	71,81
8104	Kab. Pulau Buru	68,98	92,87	7,95	617,56	70,79
8105	Kab. Kepulauan Aru	68,24	99,16	8,31	607,65	71,29
8106	Kab. Seram Bagian Barat	66,88	98,33	8,74	608,75	70,75
8107	Kab. Seram Bagian Timur	66,35	98,21	7,95	599,09	69,11
8108	Kab. Maluku Barat Daya	64,59	98,60	8,11	590,54	67,67
8109	Kab. Buru Selatan	67,85	89,80	7,34	632,97	70,23
8171	Kota Ambon	73,33	99,67	11,39	647,46	79,58
8172	Kota Tual	69,41	99,78	9,96	667,54	77,91

**Tabel R3**

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2013 Menurut Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup 2013 (tahun)	Angka Melek Huruf 2013 (persen)	Rata-Rata Lama Sekolah 2013 (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan 2013 (ribu Rp)	IPM 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>8200</b>	<b>Provinsi MALUKU UTARA</b>	<b>66,97</b>	<b>97,45</b>	<b>8,72</b>	<b>609,26</b>	<b>70,63</b>
8201	Kab. Halmahera Barat	65,23	97,51	8,03	601,37	68,56
8202	Kab. Halmahera Tengah	67,78	96,86	8,27	608,39	70,55
8203	Kab. Kepulauan Sula	66,01	97,48	8,58	603,81	69,59
8204	Kab. Halmahera Selatan	66,30	96,27	7,70	611,91	69,45
8205	Kab. Halmahera Utara	66,61	97,91	8,46	609,45	70,36
8206	Kab. Halmahera Timur	66,28	97,26	7,85	607,40	69,42
8207	Kab. Pulau Morotai	66,07	95,45	7,41	587,29	67,03
8208	Kab. Pulau Taliabu	64,74	94,55	7,66	570,58	64,99
8271	Kota Ternate	71,66	99,56	11,24	646,53	78,44
8272	Kota Tidore Kepulauan	65,54	97,76	9,06	617,58	70,80

**Tabel R3**

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2013 Menurut Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup 2013 (tahun)	Angka Melek Huruf 2013 (persen)	Rata-Rata Lama Sekolah 2013 (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan 2013 (ribu Rp)	IPM 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>9100</b>	<b>Provinsi PAPUA BARAT</b>	<b>69,14</b>	<b>94,14</b>	<b>8,53</b>	<b>604,82</b>	<b>70,62</b>
9101	Kab. Fak Fak	71,33	99,12	9,65	599,05	73,33
9102	Kab. Kaimana	70,11	97,49	8,39	605,73	71,87
9103	Kab. Teluk Wondama	68,06	85,79	7,62	605,45	67,54
9104	Kab. Teluk Bintuni	68,90	87,41	7,22	604,05	67,95
9105	Kab. Manokwari	68,73	89,98	8,62	592,86	68,61
9106	Kab. Sorong Selatan	67,07	88,56	8,10	596,59	67,28
9107	Kab. Sorong	68,65	92,09	8,19	606,19	69,74
9108	Kab. Raja Ampat	67,07	94,86	7,64	567,35	66,08
9109	Kab. Tambrauw	66,48	77,72	5,83	449,68	51,54
9110	Kab. Maybrat	66,95	91,41	8,64	588,25	67,60
9111	Kab. Manokwari Selatan	66,64	77,45	7,10	571,62	61,91
9112	Kab. Pegunungan Arfak	66,93	74,89	8,09	565,41	61,75
9171	Kota Sorong	72,80	99,71	11,02	646,11	78,92

**Tabel R3**

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2013 Menurut Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup 2013 (tahun)	Angka Melek Huruf 2013 (persen)	Rata-Rata Lama Sekolah 2013 (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan 2013 (ribu Rp)	IPM 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>9400</b>	<b>Provinsi PAPUA</b>	<b>69,13</b>	<b>75,92</b>	<b>6,87</b>	<b>616,76</b>	<b>66,25</b>
9401	Kab. Merauke	63,85	88,55	9,47	609,35	67,48
9402	Kab. Jayawijaya	66,86	53,08	5,32	600,90	57,55
9403	Kab. Jayapura	67,74	97,21	9,79	635,13	73,79
9404	Kab. Nabire	68,05	83,73	7,33	626,51	68,49
9408	Kab. Yapen Waropen	69,10	90,94	6,76	641,47	71,40
9409	Kab. Biak Numfor	67,06	99,01	9,67	600,19	71,03
9410	Kab. Paniai	68,36	62,97	6,23	595,13	60,81
9411	Kab. Puncak Jaya	67,86	86,83	6,13	632,95	68,68
9412	Kab. Mimika	70,88	88,27	6,94	621,51	70,39
9413	Kab. Boven Digoel	67,62	35,28	3,65	589,86	51,93
9414	Kab. Mappi	66,66	33,50	4,37	596,97	52,08
9415	Kab. Asmat	67,34	31,18	4,44	602,78	52,44
9416	Kab. Yahukimo	67,44	32,77	2,93	595,08	51,14
9417	Kab. Pegunungan Bintang	66,24	32,64	2,62	596,51	50,32
9418	Kab. Tolikara	66,24	33,56	3,48	621,15	53,06
9419	Kab. Sarmi	66,58	87,77	7,02	624,57	68,18
9420	Kab. Keerom	67,53	92,50	7,45	628,84	70,42
9426	Kab. Waropen	66,24	78,35	6,56	614,24	64,77
9427	Kab. Supiori	66,53	96,76	8,15	605,17	69,50
9428	Kab. Mamberamo Raya	66,34	65,43	5,21	610,20	60,64
9429	Kab. Nduga	66,02	30,61	2,82	588,62	49,29
9430	Kab. Lanny Jaya	66,70	36,93	3,75	579,59	51,07
9431	Kab. Mamberamo Tengah	66,62	34,58	2,94	582,29	50,11
9432	Kab. Yalimo	66,78	33,72	2,85	581,32	49,86
9433	Kab. Puncak	67,85	32,17	2,86	582,12	50,18
9434	Kab. Dogiyai	67,44	34,68	4,17	581,24	51,42
9435	Kab. Intan Jaya	66,87	28,08	2,30	598,91	49,61
9436	Kab. Deiyai	66,64	31,05	2,97	593,06	50,19
9471	Kota Jayapura	68,77	99,86	11,07	650,99	77,12

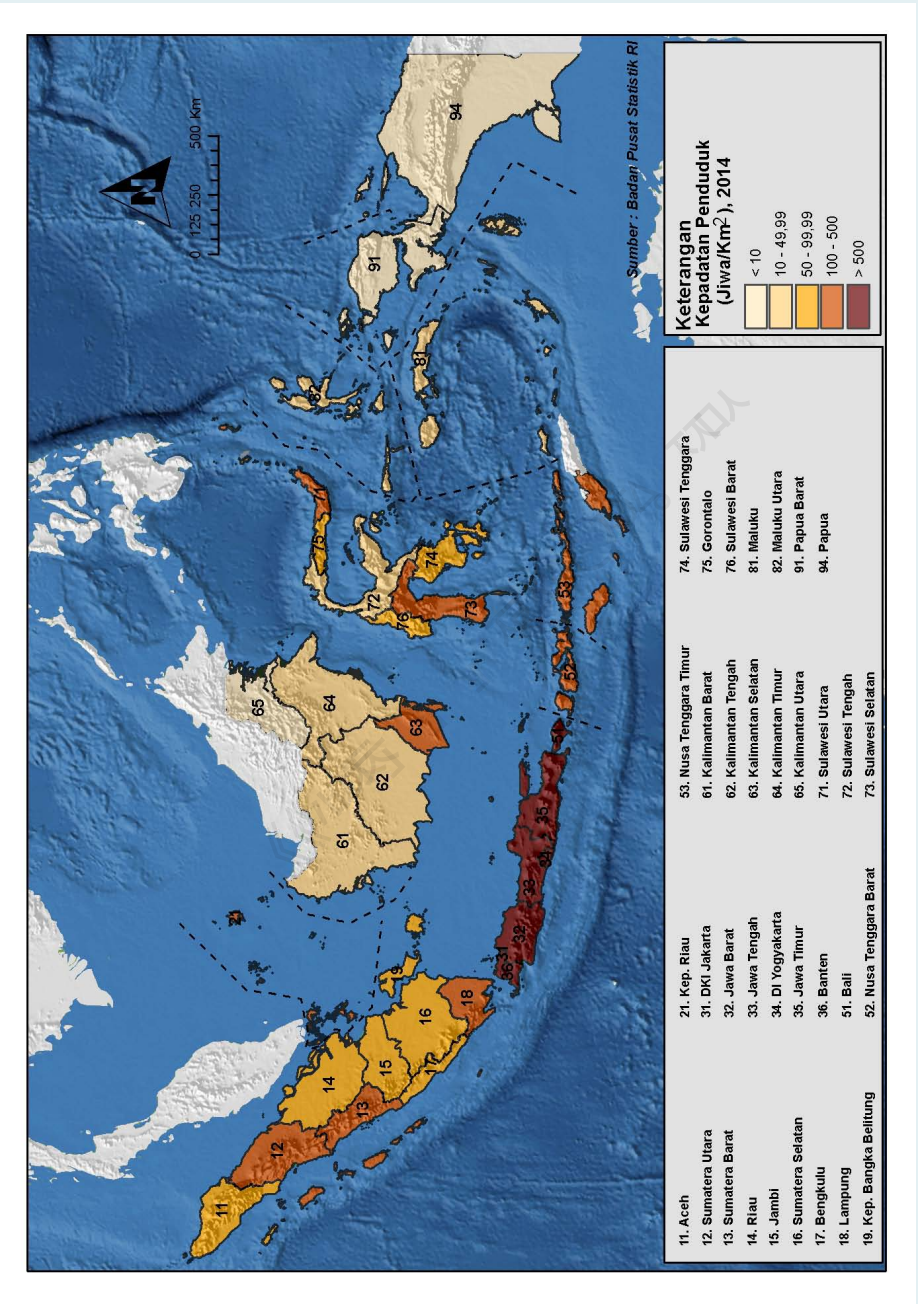
# LAMPIRAN

BAB 8



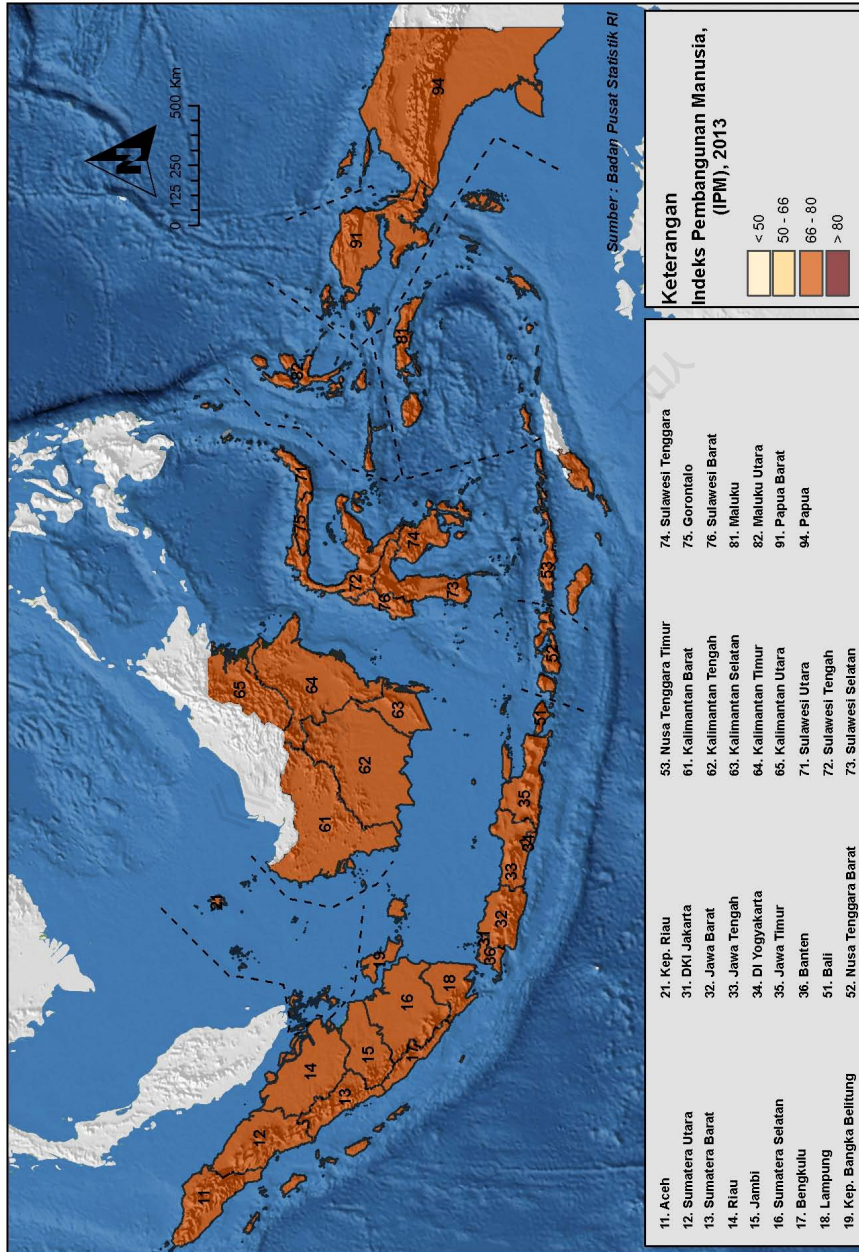
Lampiran 1

Kepadatan Penduduk Pertengahan Tahun Indonesia Menurut Provinsi, 2014



## Lampiran 2

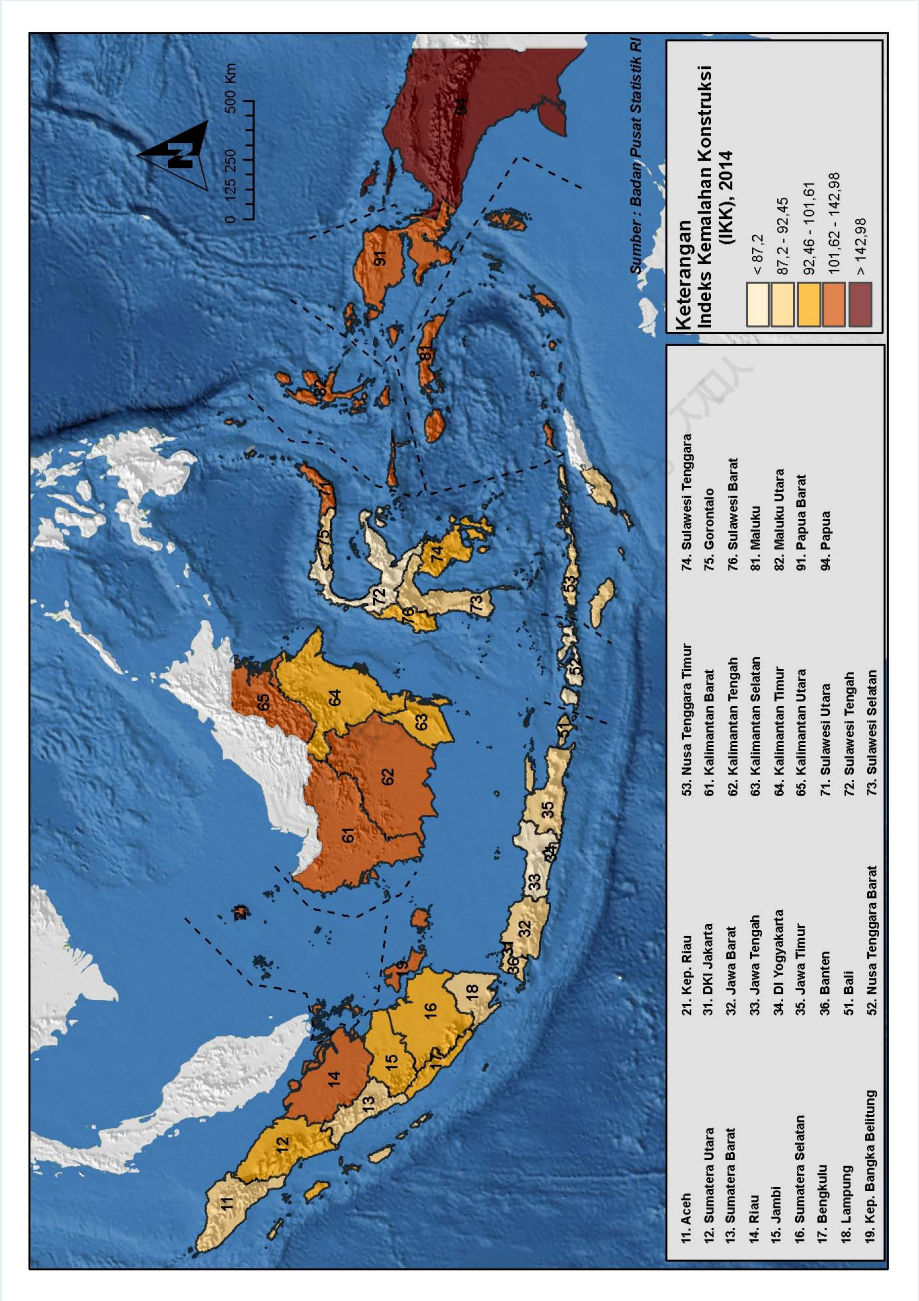
### Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi, 2014





Lampiran 3

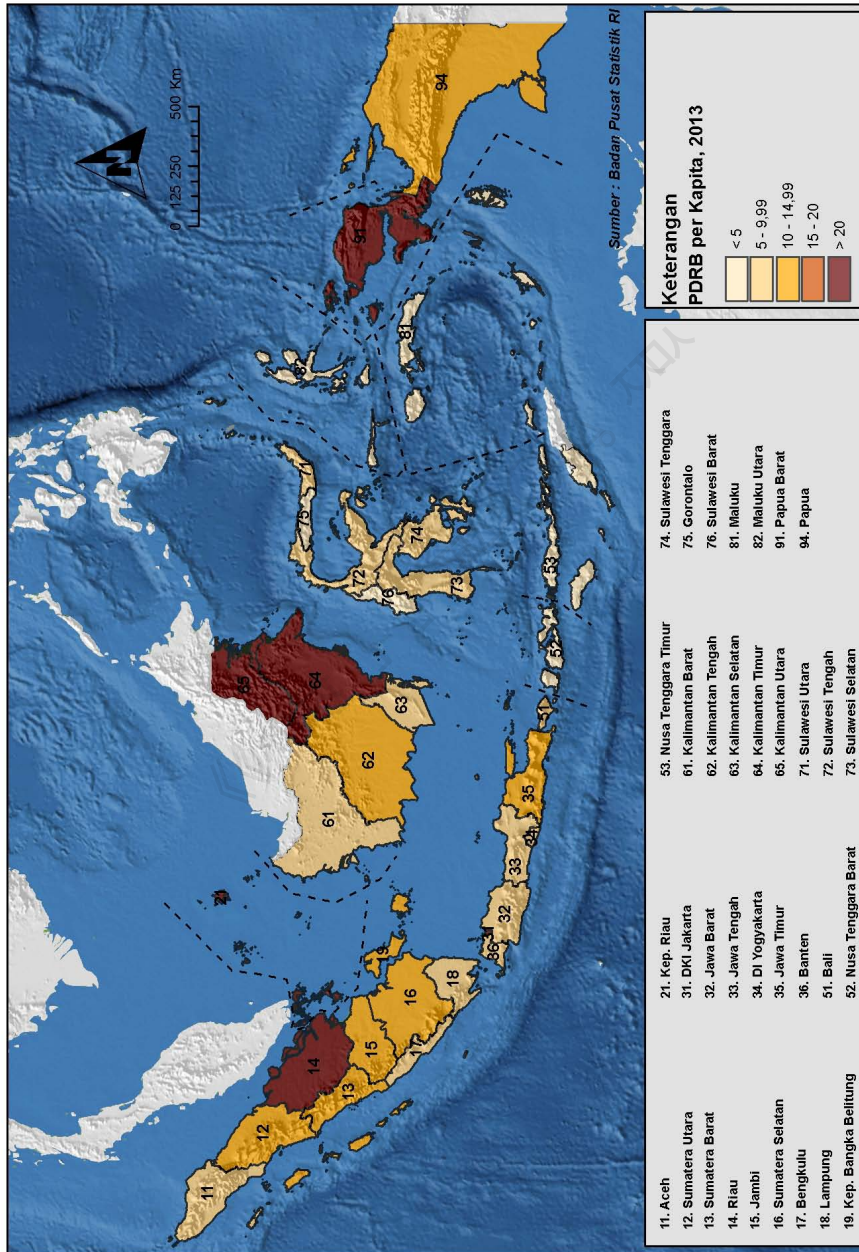
Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Provinsi, 2014





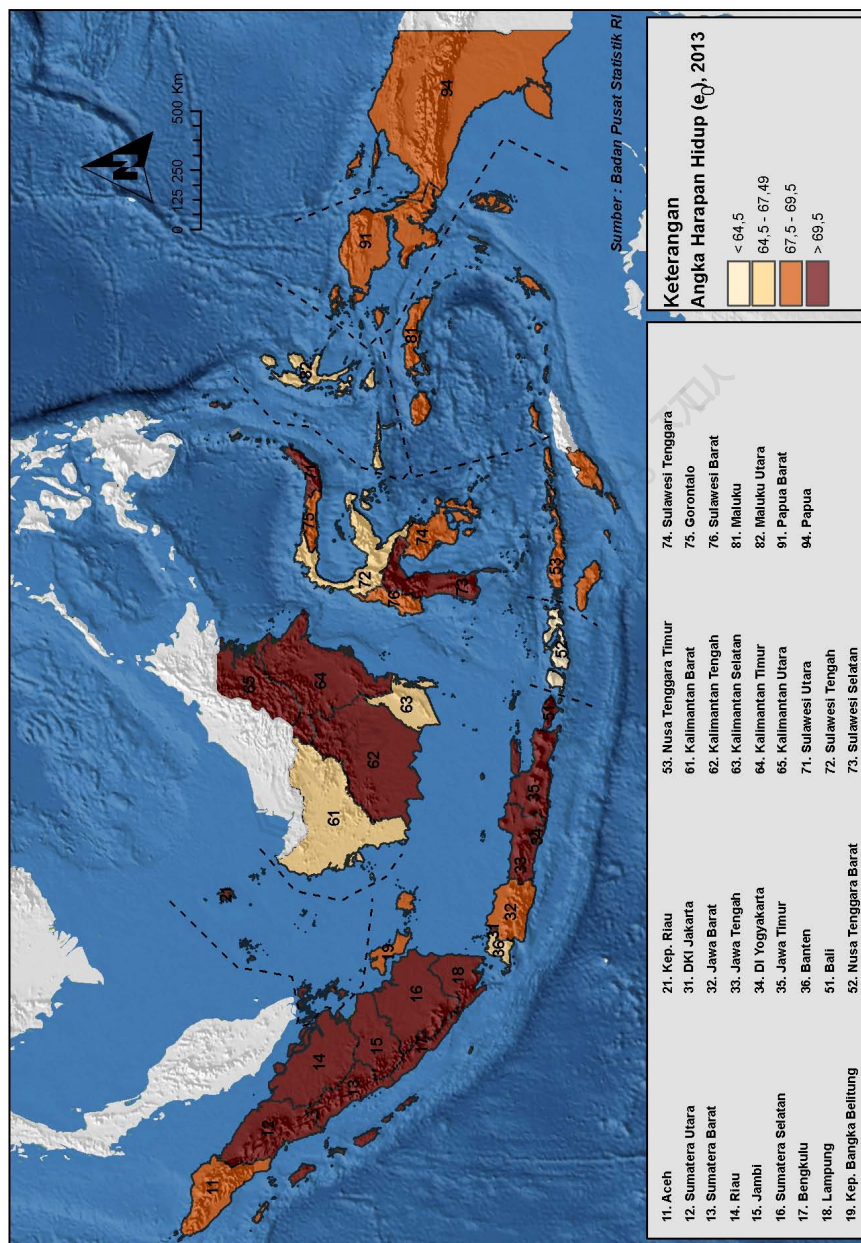
## Lampiran 4

PDRB Per Kapita Atas dasar harga Berlaku Dengan Migas Menurut Provinsi, 2013



## Lampiran 5

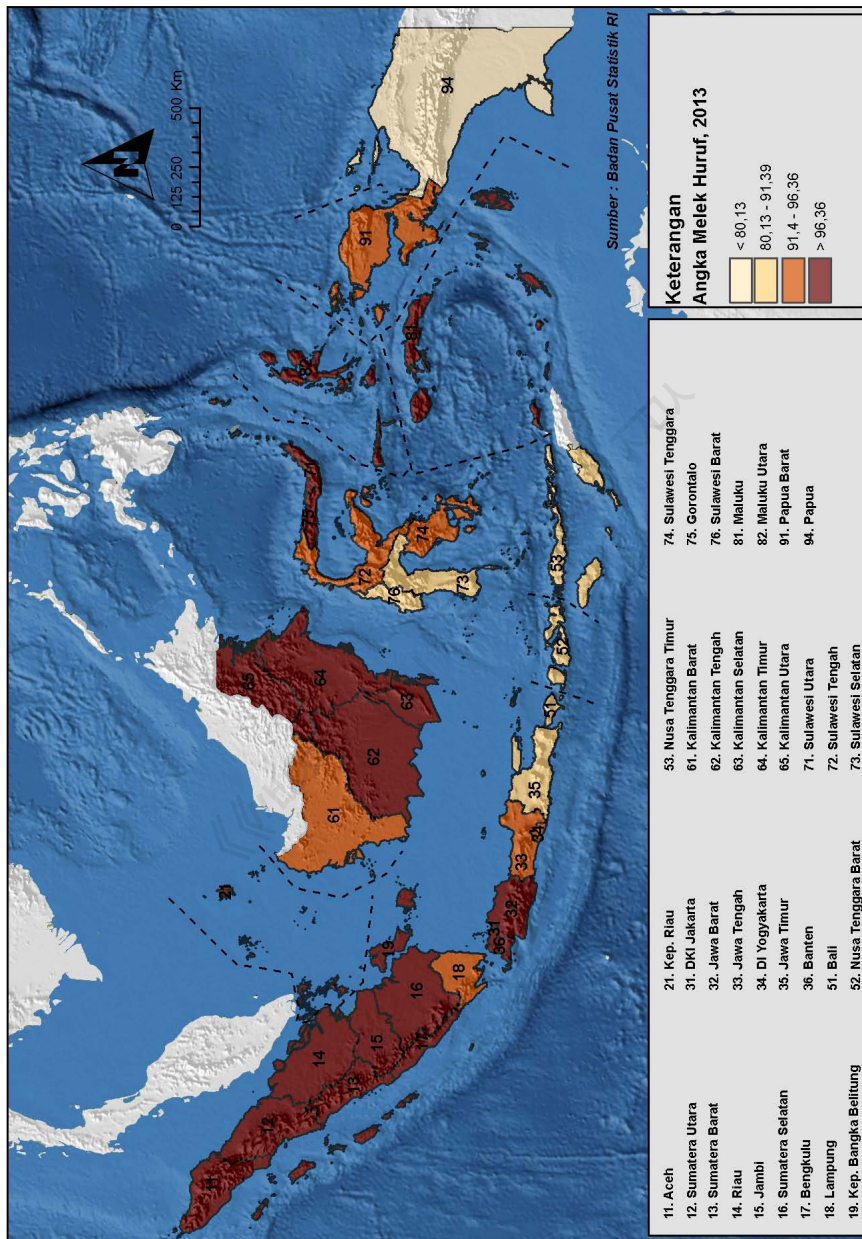
Angka harapan Hidup ( $e_0$ ) Menurut Provinsi, 2012





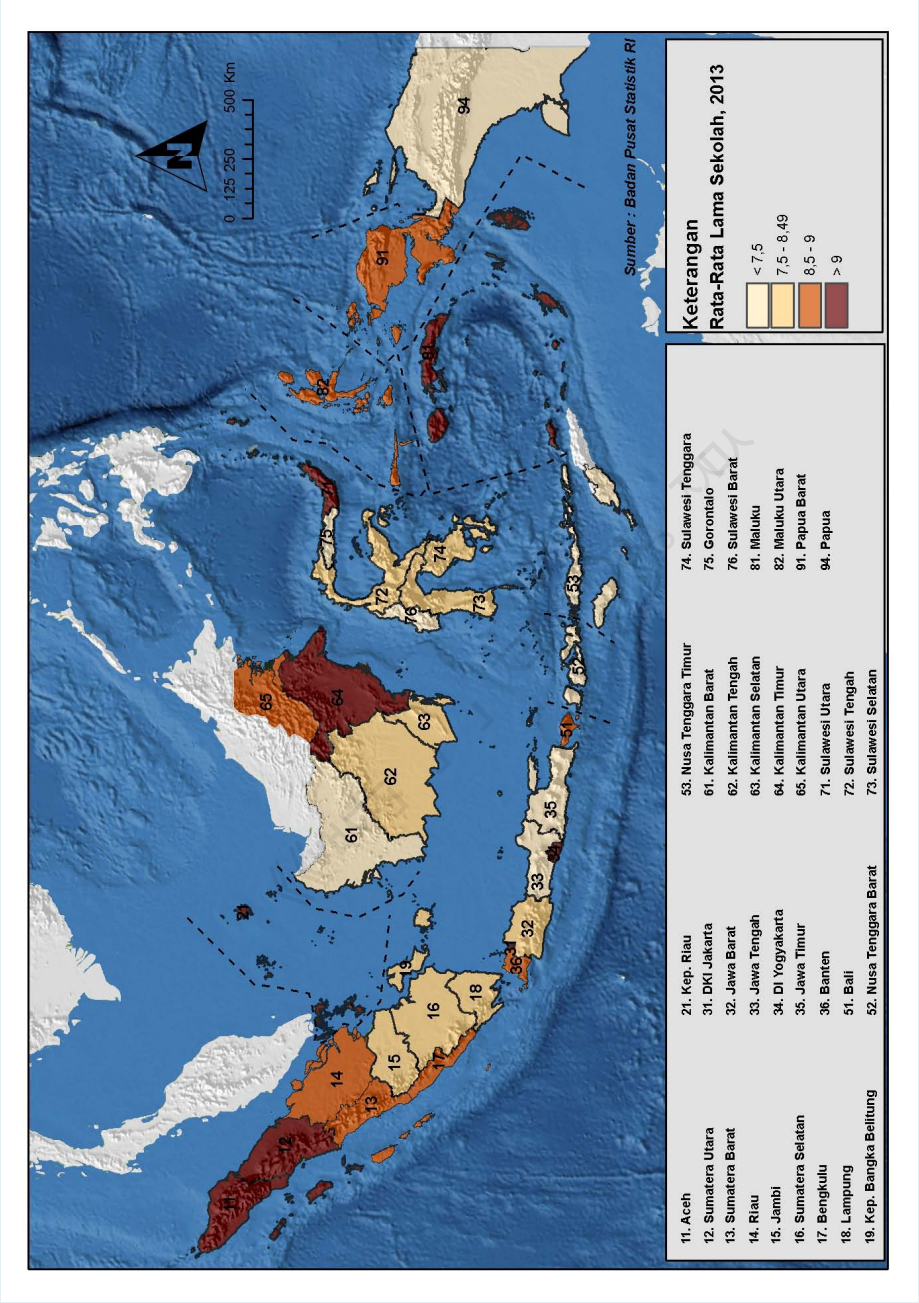
## Lampiran 6

Angka Melek Huruf (AMH) Menurut Provinsi, 2013



Lampiran 7

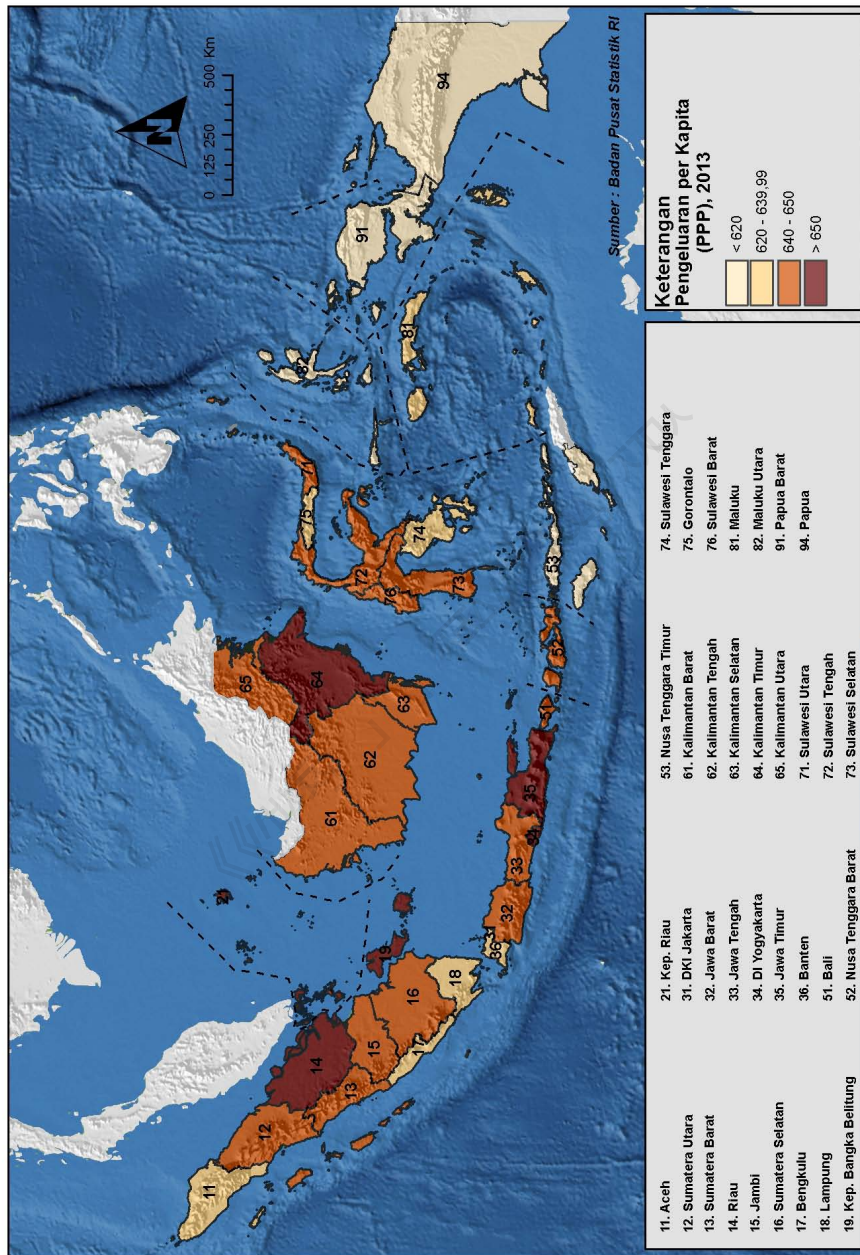
Rata-rata Lama Sekolah Menurut Provinsi, 2013





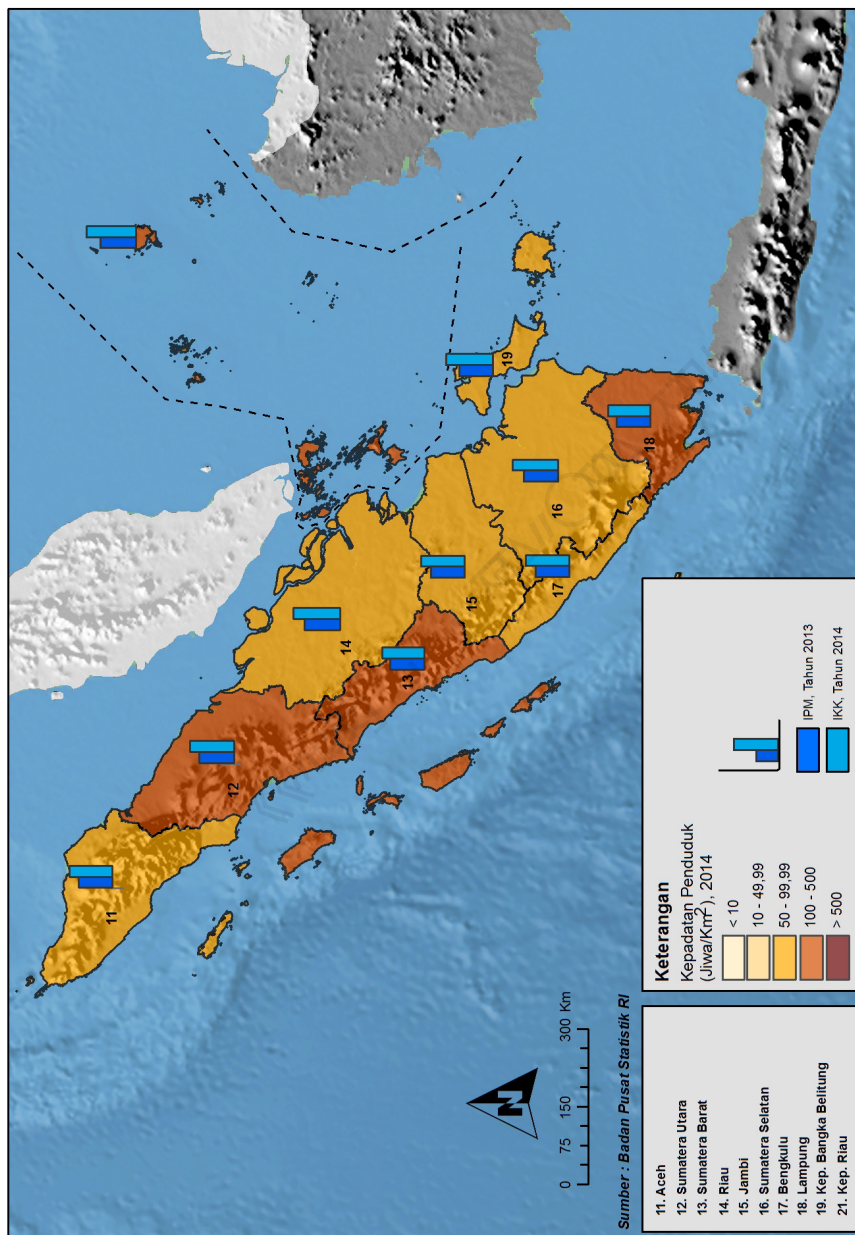
## Lampiran 8

Paritas Daya Beli (PPP) Menurut Provinsi, 2013



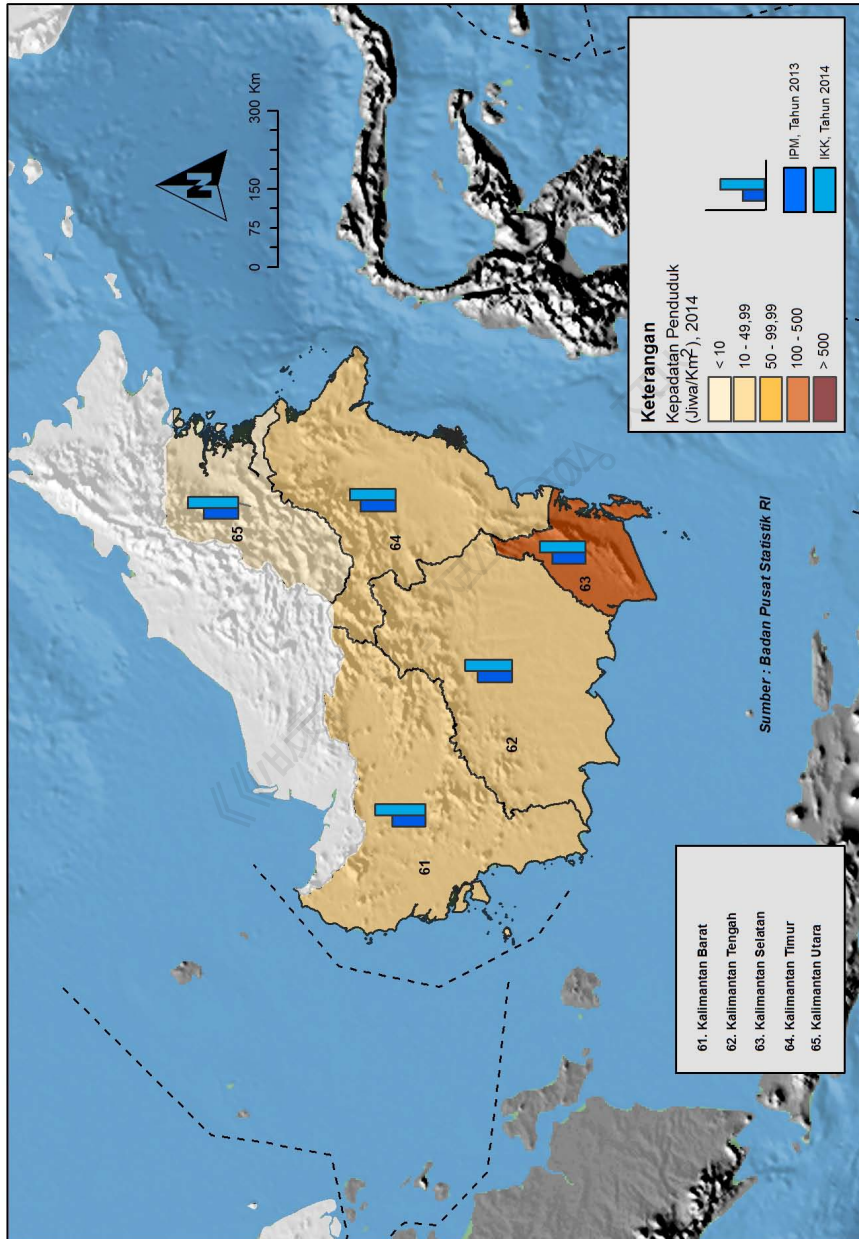
## Lampiran 9

Kepadatan Penduduk Pertengahan Tahun 2014, IPM 2013, dan IKK 2013 Menurut Provinsi di Pulau Sumatera



## Lampiran 10

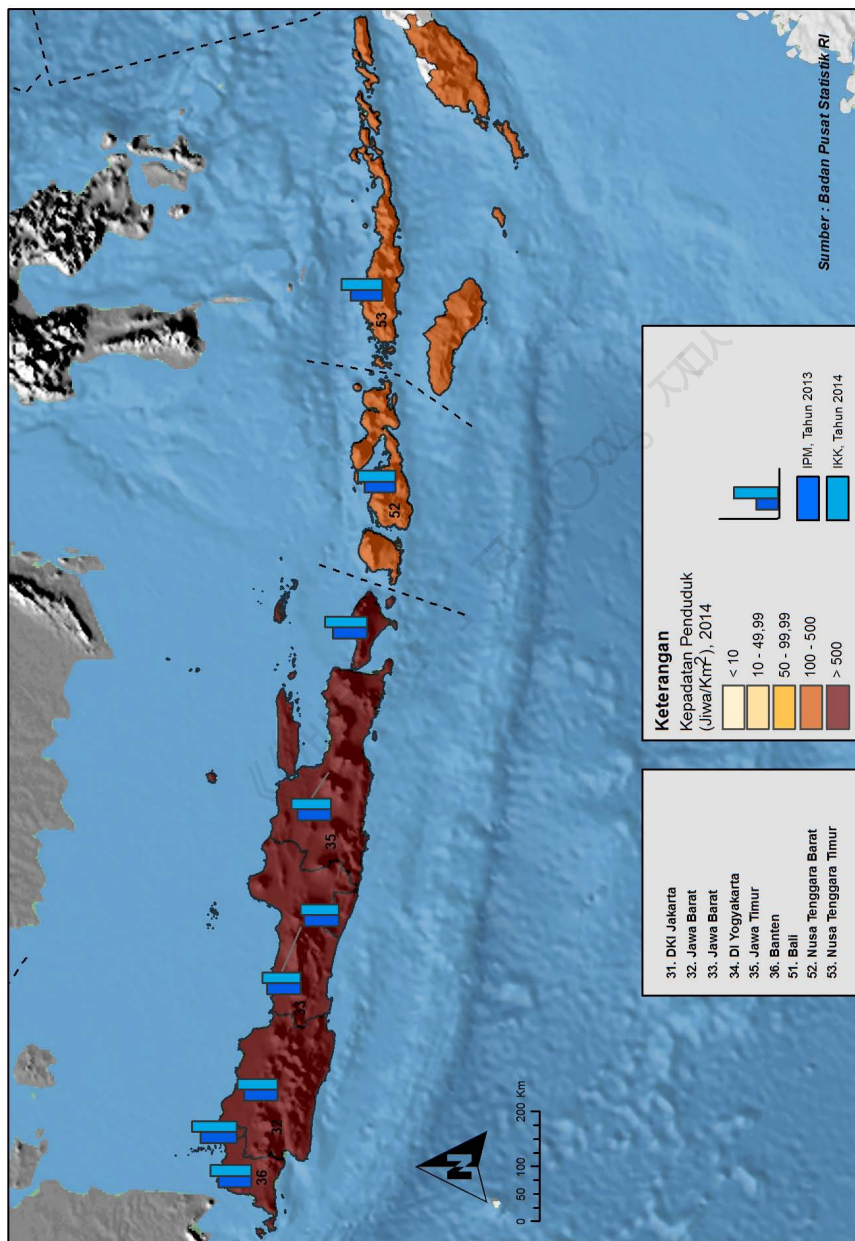
Kepadatan Penduduk Pertengahan Tahun 2014, IPM 2013, dan IKK 2013 Menurut Provinsi di Pulau Kalimantan





## Lampiran 11

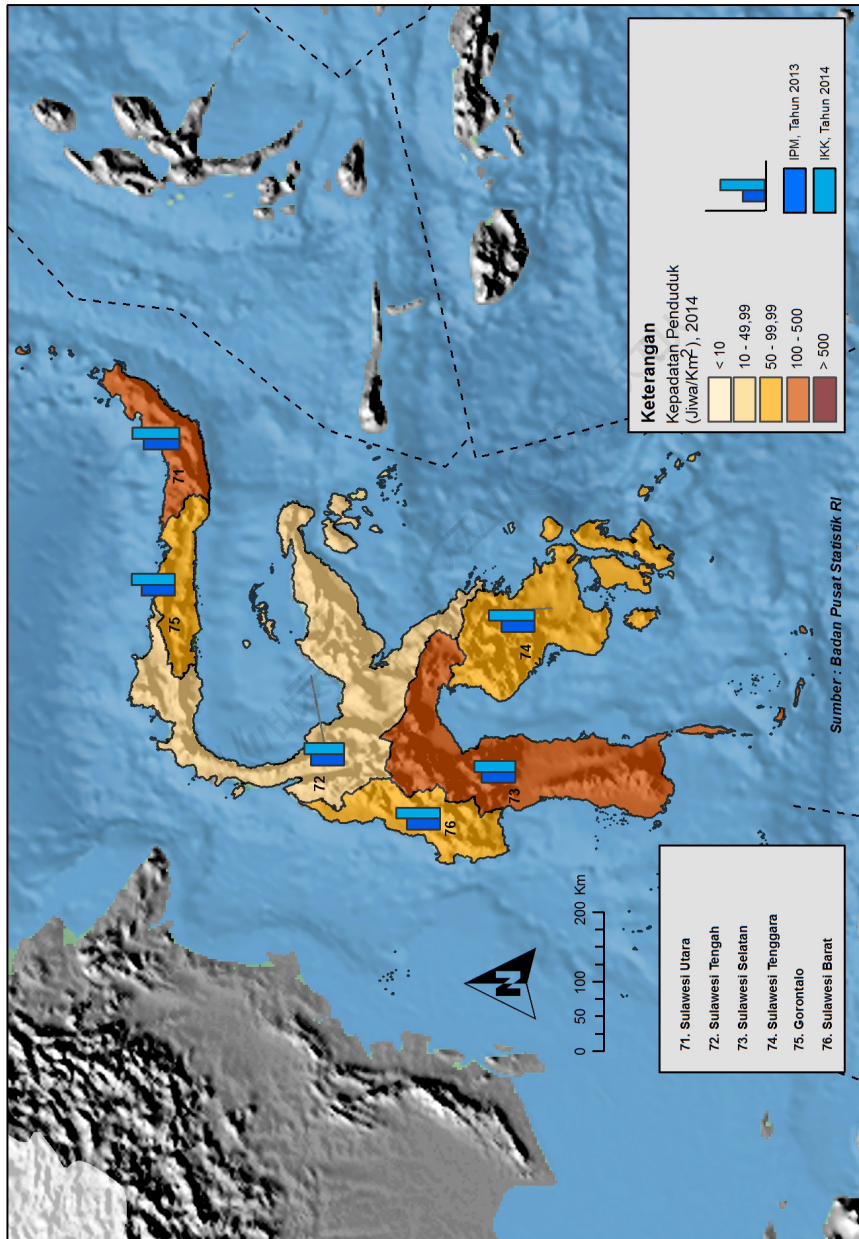
Kepadatan Penduduk Pertengahan Tahun 2014, IPM 2013, dan IKK 2013 Menurut Provinsi di Pulau Jawa





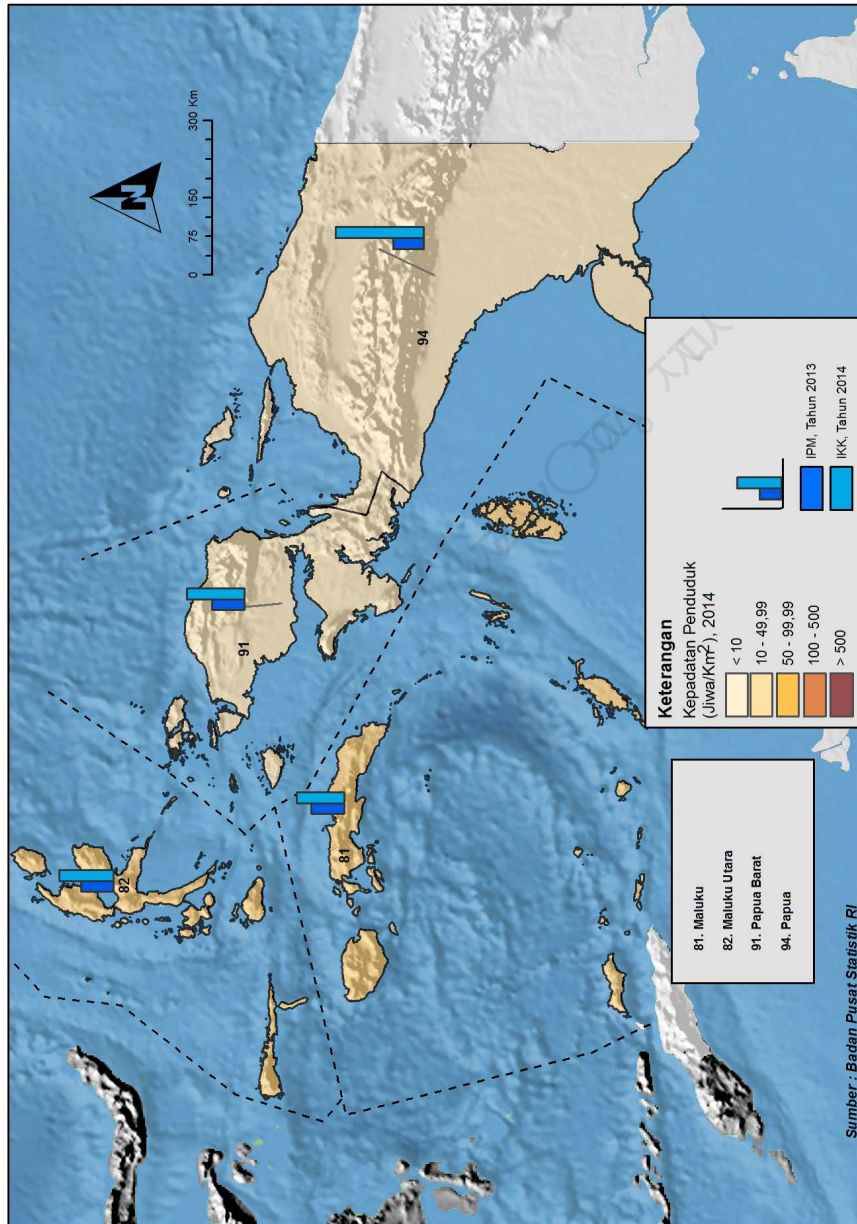
## Lampiran 12

Kepadatan Penduduk Pertengahan Tahun 2014, IPM 2013, dan IKK 2013 Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi



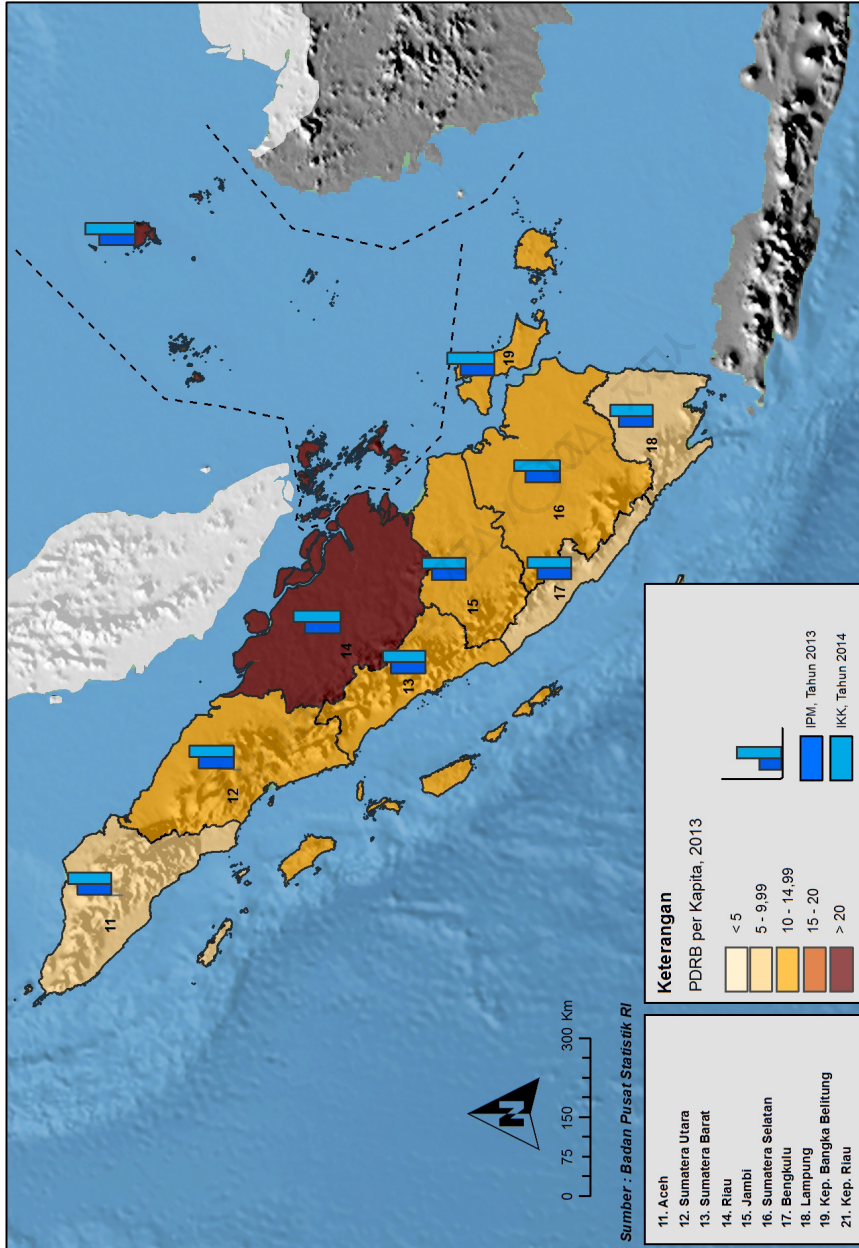
### Lampiran 13

Kepadatan Penduduk Pertengahan Tahun 2014, IPM 2013, dan IKK 2013 Menurut Provinsi di Pulau Maluku dan Papua



## Lampiran 14

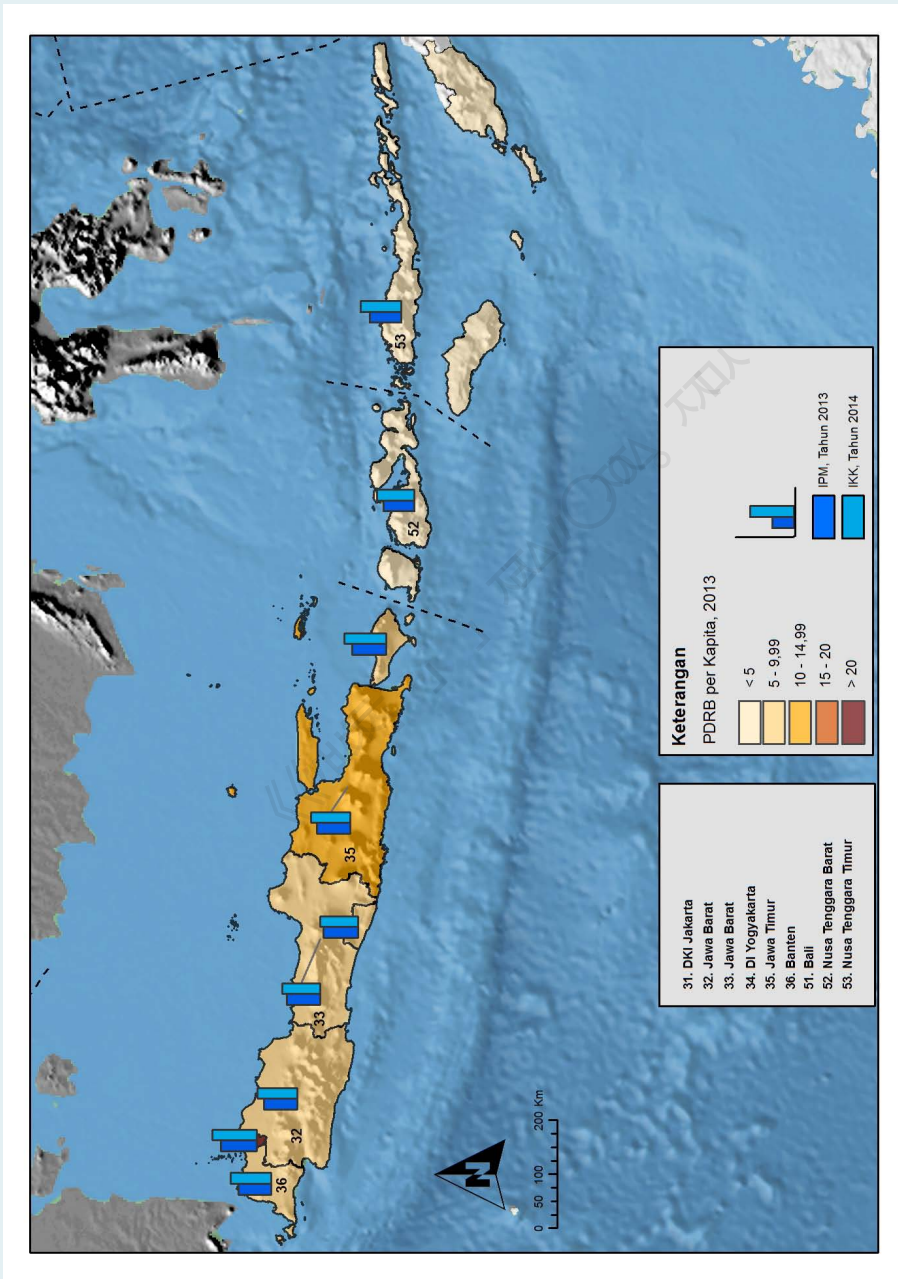
PDRB Per kapita Atas dasar harga Berlaku Dengan Migas 2013, IPM 2013, dan IKK 2014 Menurut Provinsi di Pulau Sumatera





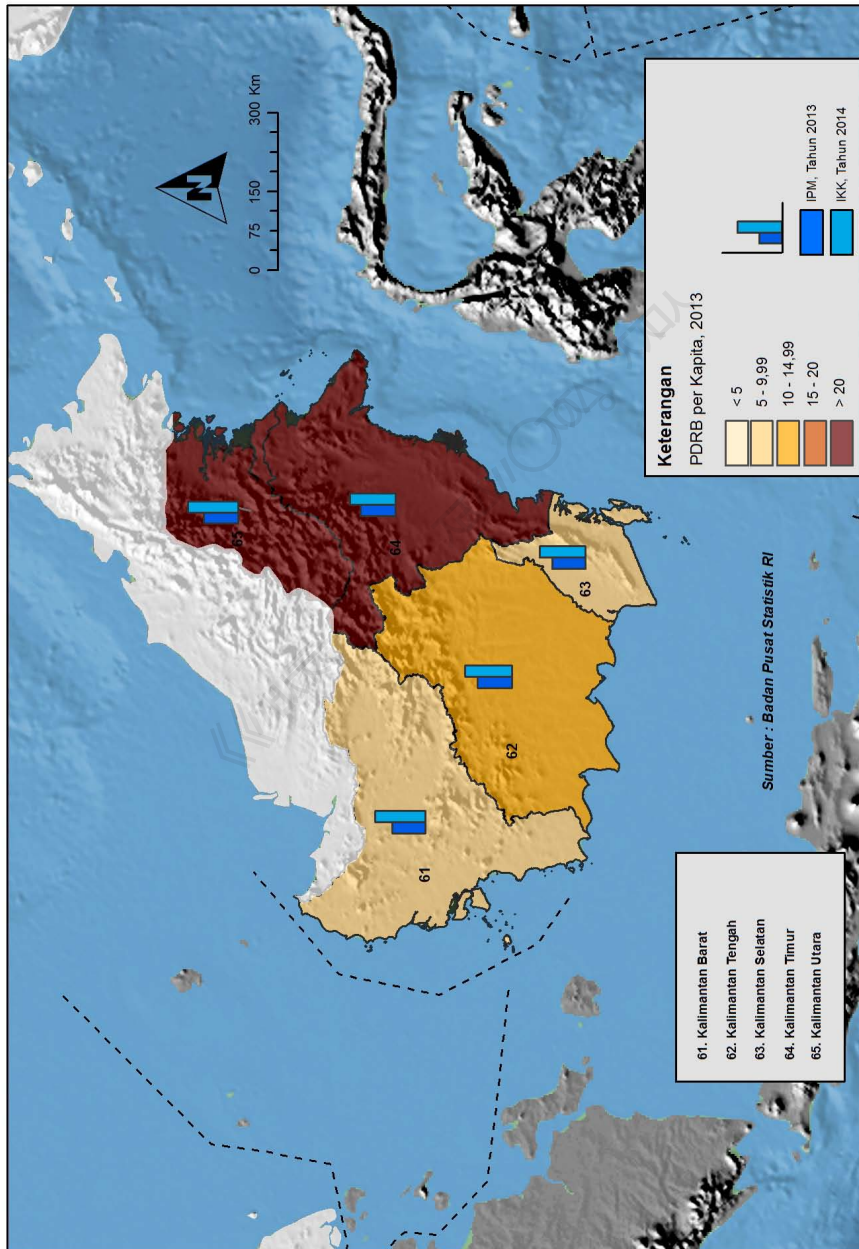
## Lampiran 15

PDRB Per kapita Atas dasar harga Berlaku Dengan Migas 2013, IPM 2013, dan IKK 2014 Menurut Provinsi di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara



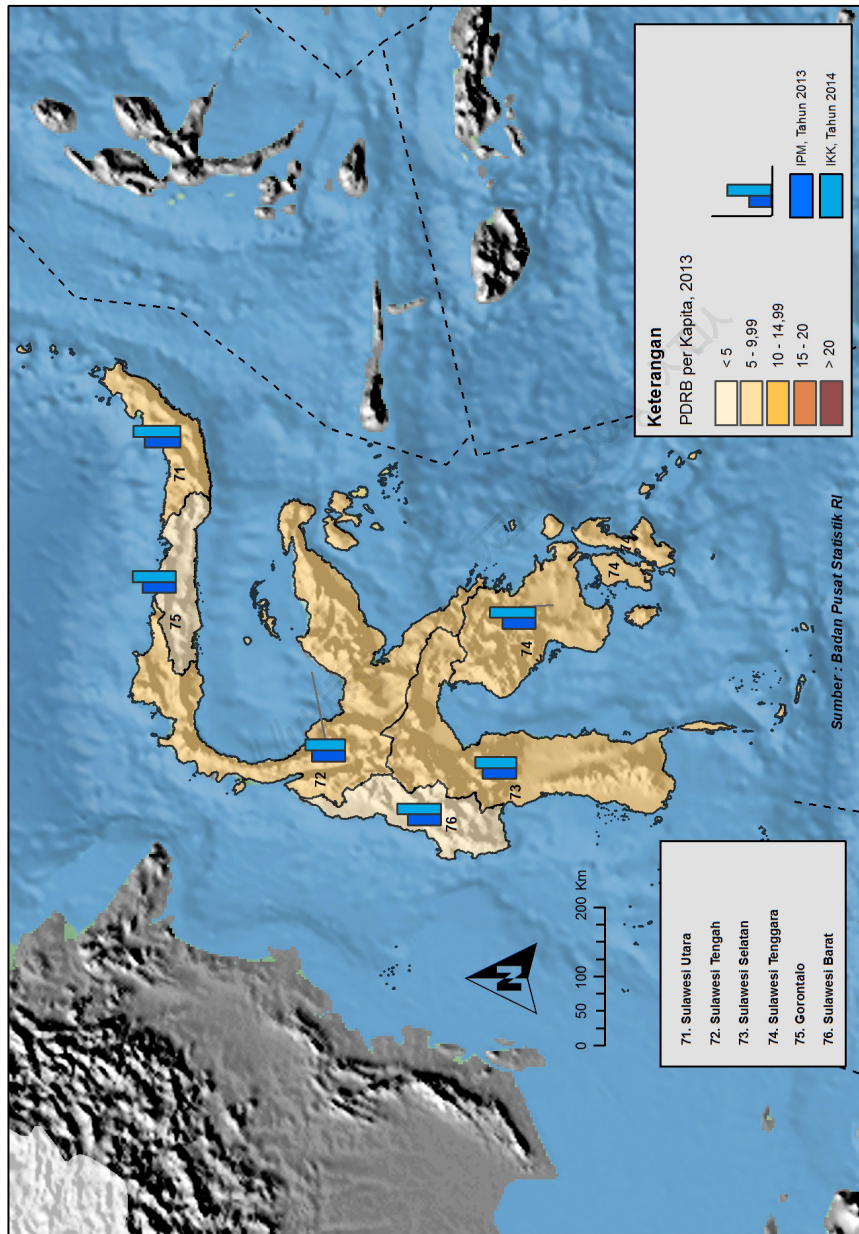
## Lampiran 16

PDRB Per kapita Atas dasar harga Berlaku Dengan Migas 2013, IPM 2013, dan IKK 2014 Menurut Provinsi di Pulau Kalimantan



## Lampiran 17

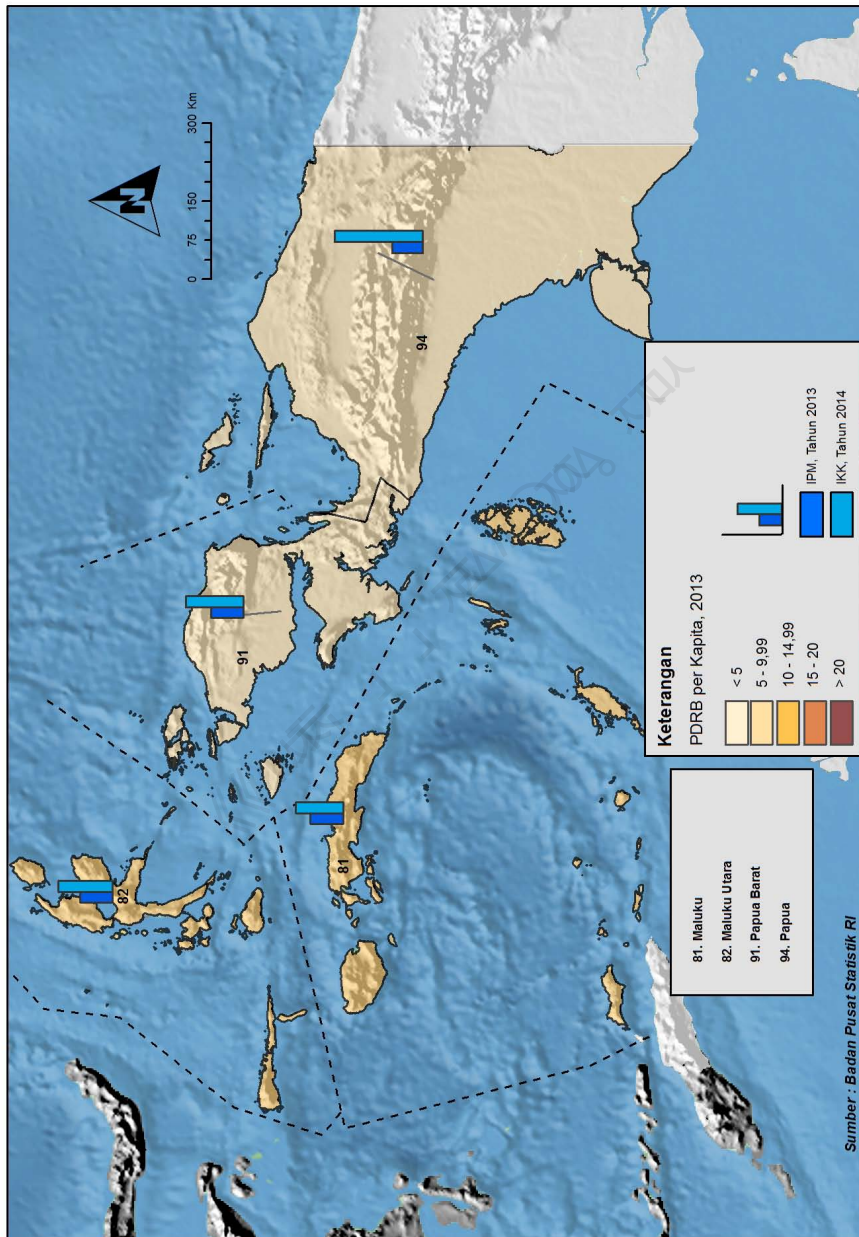
PDRB Per kapita Atas dasar harga Berlaku Dengan Migas 2013, IPM 2013, dan IKK 2014 Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi





## Lampiran 18

PDRB Per kapita Atas dasar harga Berlaku Dengan Migas 2013, IPM 2013, dan IKK 2014 Menurut Provinsi di Pulau Papua









# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK**

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax : (021) 3857046

Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : [bpsHQ@bps.go.id](mailto:bpsHQ@bps.go.id)